

**TUGAS AKHIR - KS 141501**

**KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI  
PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL  
2007**

***SUITABILITY OF THE INFORMATION TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT PLANNING IN GOVERNMENT  
INSTITUTIONS AGAINST THE GOVERNANCE OF  
NATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY 2007***

**MUHAMMAD ATSIL HUSNI RAFI**  
**NRP 05211440000022**

**Dosen Pembimbing**  
**Ir. Khakim Ghozali, M.MT**

**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI**  
**Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**Surabaya 2018**

**TUGAS AKHIR – KS 141501**

**KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI  
PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA  
KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI NASIONAL 2007**

**Muhammad Atsil Husni Rafi**  
**05211440000022**

**Dosen Pembimbing**  
**Ir. Khakim Ghozali, M.MT**

**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI**  
**Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**Surabaya 2018**



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**FINAL PROJECT – KS 141501**

***SUITABILITY OF THE INFORMATION  
TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLANNING  
IN GOVERNMENT INSTITUTIONS AGAINST  
THE GOVERNANCE OF NATIONAL  
INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY 2007***

**Muhammad Atsil Husni Rafi**  
**05211440000022**

**Supervisor :**  
**Ir. Khakim Ghozali, M.MT**

**INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT**  
**Information and Communications Technology Faculty**  
**Sepuluh Nopember Institut of Technology**  
**Surabaya 2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 2007

#### TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
pada

Departemen Sistem Informasi  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**MUHAMMAD ATSIL HUSNI RAFI**

**05211440000022**

Surabaya, 2018

**KEPALA  
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI**

**Dr. Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom.**

**NIP 19650310 199102 1 001**



## LEMBAR PERSETUJUAN

### KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 2007

#### TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
pada  
Departemen Sistem Informasi  
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

Muhammad Atsil Husni Rafi  
05211440000022

Disetujui Tim Penguji: Tanggal Ujian: Juli 2018  
Periode Wisuda: September 2018

Ir. Khakim Ghozali, M.MT

(Pembimbing 1)

Tony Dwi Susanto, S.T, M.T, Ph.D

(Penguji 1)

Feby Artwodini Muqtadiroh, S.Kom, M.T

(Penguji 2)



# **KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 2007**

Nama mahasiswa : Muhammad Atsil Husni Rafi

NRP : 05211440000022

Departemen : Sistem Informasi FTIK-ITS

Dosen Pembimbing I : Ir. Khakim Ghozali, M.MT

## **ABSTRAK**

*Setiap 5 tahun sekali institusi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan TIK mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menyusun dokumen perencanaan pengembangan TIK sebaiknya institusi pemerintahan perlu mengikuti terhadap panduan yang ada. Selain sebagai harmonisasi dokumen antar institusi, penggunaan panduan merupakan sebuah best practice, karena telah disusun berdasarkan batasan permasalahan yang sesuai.*

*Maka dari itu tugas akhir ini berfokus untuk menganalisis apakah dokumen perencanaan pengembangan TIK pada institusi pemerintahan sekarang sudah sesuai dengan panduan yang ada. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan cara mempelajari panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional, sehingga bisa mendapatkan sebuah dasar berupa 5 komponen perencanaan yang nantinya akan menjadi sebuah perangkat pengujian. Hal ini nantinya akan dijadikan sebagai sebuah acuan untuk menentukan apakah sebuah dokumen perencanaan pengembangan TIK di institusi pemerintah telah sesuai dengan panduan. Setelah proses tersebut selesai maka akan mendapatkan hasil berupa analisis mengenai kelengkapan/kesesuaian dokumen terhadap 5 komponen perencanaan. 5 komponen perencanaan tersebut adalah*

*arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, organisasi dan manajemen, pendekatan dan roadmap implementasi. Nantinya dari hasil analisis tersebut akan muncul beberapa rekomendasi/evaluasi yang akan diberikan oleh penulis terhadap kekurangan dokumen perencanaan pengembangan TIK di institusi pemerintahan. Rekomendasi/evaluasi yang diberikan berdasarkan pada best practice, peraturan, ataupun framework yang ada.*

***Kata Kunci: perencanaan pengembangan TIK, panduan tata kelola TIK nasional, komponen perencanaan***



***SUITABILITY OF THE INFORMATION TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT PLANNING IN GOVERNMENT  
INSTITUTIONS AGAINST THE GOVERNANCE OF  
NATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY 2007***

Student Name : Muhammad Atsil Husni Rafi

NRP : 05211440000022

Department : Information Systems FTIK-ITS

Supervisor I : Ir. Khakim Ghozali, M.MT

**ABSTRACT**

*Every 5 years' government institutions are required to prepare their own ICT development planning documents. Based on the above, in preparing the ICT development planning document, government institutions should follow the guidelines. Besides being a harmonization of inter-institutional documents, the use of guidance is a best practice, since it has been prepared on the basis of appropriate issues.*

*Therefore, this final project focuses on analyzing whether the planning documents of ICT development in government institutions are now in accordance with existing guidelines. The method used in this final project is to study the general guidance of governance of information technology and national communication, so that it can get a theoretical base, in the form of 5 planning components which will become a testing tool. This will be used as a reference to determine whether a document for planning ICT development in government institutions is in accordance with the guidelines. After the process is complete it will get results in the form of an analysis of the completeness / suitability of documents against the 5 components of the planning. The five components of the plan are information architecture, application architecture, infrastructure architecture, organization and management, approach and roadmap implementation. Later from the results of the analysis*

*will appear some recommendations / evaluations to be provided by the authors against the lack of documents planning ICT development in government institutions. Recommendations / evaluations given are based on best practices, rules, or existing frameworks*

***Keywords: ICT development planning, national ICT governance guidelines, planning components***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Tugas Akhir yang berjudul “KESESUAIAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL 2007”. Sehingga penulis bisa memenuhi syarat kelulusan pada Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan banyak hal, baik berupa bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, kasih sayang, semangat kepada penulis, sehingga tugas akhir ini bisa selesai tepat pada waktunya. Beberapa pihak tersebut yaitu:

1. Orang tua, ketiga, kakak ipar dan kedua keponakan penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan bantuan dalam banyak hal selama proses pengerjaan tugas akhir maupun masa perkuliahan berlangsung.
2. Bapak Ir Khakim Ghazali, M.MT selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam menyusun buku tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Apol Pribadi Subriadi ST., MT. selaku dosen wali dari penulis yang selalu membantu dalam masa masa perkuliahan terutama saat FRS.
4. Bapak Hermono selaku admin laboratorium MSI (Manajemen Sistem Informasi) yang telah membantu proses administrasi selama proses pengerjaan tugas akhir

5. Teman-teman grup SG yang merupakan teman terdekat penulis saat masa perkuliahan yang selalu menemani dan membantu dalam masa-masa perkuliahan
6. Teman-teman Kaporits maupun kontrakan ungu yang selalu menemani penulis ketika melakukan pembuatan buku tugas akhir ini selama berada di kontrakan
7. Teman-teman seperjuangan Lab MSI, OSIRIS, maupun Anak Abi yang telah menemani masa perkuliahan, dan telah menjadi keluarga penulis selama berada di Surabaya.
8. Anggota tim proyek probolinggo, yang selalu menemani penulis untuk bimbingan mengenai tugas akhir ketika telah selesai melakukan cek pekerjaan mingguan proyek
9. Pada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tak langsung yang tidak bisa penulis cantumkan satu per satu.

Kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT semata, sehingga penulis menyadari bahwa memiliki kekurangan yang ada pada buku tugas akhir ini, Sehingga penulis memohon maaf dan akan menerima segala bentuk kritik dan saran yang diberikan demi memperbaiki buku tugas akhir ini. Akhir kata semoga buku tugas akhir ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dan memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan terutama penelitian terkait.

Surabaya, 21 Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| ABSTRAK .....  | i    |
| ABSTRACT .....   | iii  |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| DAFTAR ISI .....   | vii  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii |
| DAFTAR TABEL .....   | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| 1.1.    Latar Belakang .....   | 1    |
| 1.2.    Rumusan Masalah .....  | 2    |
| 1.3.    Batasan Masalah .....  | 3    |
| 1.4.    Tujuan Penelitian .....  | 4    |
| 1.5.    Manfaat Penelitian .....   | 4    |
| 1.6.    Relevansi Tugas Akhir .....  | 5    |
| 1.7.    Target Luaran .....  | 6    |
| 1.8.    Sistematika Penulisan .....  | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9    |
| 2.1.    Penelitian Sebelumnya .....  | 9    |
| 2.2.    Dasar Teori .....  | 13   |
| 2.2.1    Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi<br>dan Komunikasi (TIK) Nasional ..... | 13   |
| 2.2.2    Proses Perencanaan Sistem .....   | 16   |
| 2.2.2.1.    Ruang Lingkup .....  | 16   |

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| A.                              | Sinkronasi dan Integrasi .....  | 16        |
| B.                              | Siklus dan Lingkup Perencanaan.....   | 17        |
| 2.2.3                           | Komponen Perencanaan Sistem .....   | 18        |
| 2.2.3.1                         | Perencanaan Arsitektur Informasi .....  | 18        |
| 2.2.3.2                         | Perencanaan Arsitektur Aplikasi .....   | 18        |
| 2.2.3.3                         | Perencanaan Infrastruktur Teknologi .....   | 20        |
| 2.2.3.4                         | Perencanaan Manajemen dan Organisasi .....  | 20        |
| 2.2.3.5                         | Perencanaan Pendekatan dan Roadmap Implementasi .....   | 20        |
| 2.2.4                           | Rencana Induk TIK .....   | 21        |
| 2.2.5                           | Perangkat Pengujian .....   | 22        |
| 2.2.6                           | Perencanaan Strategis SI/TI.....  | 23        |
| 2.2.7                           | Model penilaian Cengiz Hakan Aydin dan Deniz Tasci  | 24        |
| <b>BAB III METODOLOGI .....</b> |   | <b>25</b> |
| 3.1.                            | Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir .....   | 25        |
| 3.2.                            | Uraian Metodologi.....  | 27        |
| 3.2.1                           | Studi Literatur.....  | 27        |
| 3.2.2                           | Mengumpulkan Dokumen Rencana Induk TIK  | 28        |
| 3.2.3                           | Membuat Perangkat Kesesuaian Berdasarkan Template ICT Pura .....                              | 28        |
| 3.2.4                           | Analisis Kesesuaian Dokumen Rencana Induk TIK terhadap Panduan Tata Kelola TIK Nasional ..... | 28        |
| 3.2.5                           | Membuat Rekomendasi .....   | 29        |



|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| 3.2.6                             | Penyusunan Laporan Tugas Akhir .....   | 29  |
| 3.2.7                             | Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir .....                                    | 30  |
| BAB IV PERANCANGAN .....          |  | 31  |
| 4.1                               | Perancangan Perangkat Kesesuaian .....   | 31  |
| 4.1.1                             | Arsitektur Informasi .....   | 31  |
| 4.2                               | Metode pengolahan dan penialaian data .....                                    | 43  |
| BAB V IMPLEMENTASI .....          |  | 45  |
| 5.1.                              | Pengumpulan Dokumen .....  | 45  |
| 5.2.                              | Pembuatan Perangkat Kesesuaian.....  | 46  |
| 5.3.                              | Analisa Kesesuaian .....   | 47  |
| 5.4.                              | Perhitungan Tingkat Kesusaian.....   | 47  |
| BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN ..... |  | 49  |
| 6.1.                              | Data Hasil Analisis.....   | 49  |
| 6.1.1.                            | Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Provinsi Riau 2016-2020..... | 49  |
| 6.1.1.1.                          | Arsitektur Informasi .....   | 49  |
| 6.1.1.2.                          | Arsitektur Aplikasi .....  | 58  |
| 6.1.1.3.                          | Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....                                       | 60  |
| 6.1.I.4.                          | Manajemen dan Organisasi .....   | 68  |
| 6.1.1.5.                          | Pendekatan Roadmap Implementasi .....  | 83  |
| 6.2.                              | Perhitungan Tingkat Kesesuaian.....  | 87  |
| 6.3.                              | Hasil Akhir Perhitungan.....   | 100 |
| 6.4.                              | Rekomendasi .....  | 101 |

|  |      |
|--|------|
| BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....   | 105  |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 109  |
| A LAMPIRAN – PERANCANGAN .....   | A-1  |
| I. Arsitektur Aplikasi .....   | A-1  |
| II. Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....   | A-3  |
| III. Manajemen dan Organisasi .....  | A-9  |
| IV. Pendekatan Roadmap Implementasi.....   | A-27 |
| B LAMPIRAN - DATA HASIL ANALISIS .....   | B-1  |
| 1. Rencana Induk Pengembangan E-Government<br>Provinsi Gorontalo 2009-2013 .....                     | B-1  |
| 1.1. Arsitektur Informasi .....  | B-1  |
| 1.2. Arsitektur Aplikasi .....   | B-10 |
| 1.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....   | B-14 |
| 1.4. Manajemen dan Organisasi .....  | B-22 |
| 1.5. Pendekatan Roadmap Implementasi.....  | B-37 |
| 2. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Pemerintah Kabupaten Karangasem 2010-2014 ..... | B-42 |
| 2.1. Arsitektur Informasi .....  | B-42 |
| 2.2. Arsitektur Aplikasi .....   | B-49 |
| 2.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....   | B-51 |
| 2.4. Manajemen dan Organisasi .....  | B-56 |
| 2.5. Pendekatan Roadmap Implementasi.....  | B-70 |
| 3. Master Plan E-Government Pemerintah Daerah<br>Kabupaten Banjar 2014-2019.....                     | B-74 |

|      |   |       |
|------|---|-------|
| 3.1. | Arsitektur Informasi .....  | B-74  |
| 3.2. | Arsitektur Aplikasi .....   | B-81  |
| 3.3  | Arsitektur Infrastruktur Teknologi.....   | B-83  |
| 3.4. | Manajemen dan Organisasi .....  | B-88  |
| 3.5. | Pendekatan Roadmap Implementasi .....   | B-102 |
| 4.   | Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Pemerintah Kabupaten Kerinci 2014-2019 .....            | B-108 |
| 4.1. | Arsitektur Informasi .....  | B-108 |
| 4.2. | Arsitektur Aplikasi .....   | B-114 |
| 4.3  | Arsitektur Infrastruktur Teknologi.....   | B-116 |
| 4.4. | Manajemen dan Organisasi .....  | B-121 |
| 4.5. | Pendekatan Roadmap Implementasi .....   | B-136 |
| 6.   | Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Pemerintah Kota Bogor 2014-2018.....                    | B-140 |
| 6.1. | Arsitektur Informasi .....  | B-140 |
| 6.2. | Arsitektur Aplikasi .....   | B-146 |
| 6.3. | Arsitektur Infrastruktur Teknologi.....   | B-148 |
| 6.4. | Manajemen dan Organisasi .....  | B-154 |
| 6.5. | Pendekatan Roadmap Implementasi .....   | B-168 |
| 7.   | Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 ..... | B-172 |
| 7.1. | Arsitektur Informasi .....  | B-172 |
| 7.2. | Arsitektur Aplikasi .....   | B-179 |

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| 7.3.                 | Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....  | B-181 |
| 7.4.                 | Manajemen dan Organisasi .....  | B-188 |
| 7.5.                 | Pendekatan Roadmap Implementasi.....  | B-203 |
| 8.                   | Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros 2016-2020.....   | B-207 |
| 8.1.                 | Arsitektur Informasi .....  | B-207 |
| 8.2.                 | Arsitektur Aplikasi .....   | B-213 |
| 8.3.                 | Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....  | B-215 |
| 8.4.                 | Manajemen dan Organisasi .....  | B-220 |
| 8.5.                 | Pendekatan Roadmap Implementasi.....  | B-234 |
| 9.                   | Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen 2016-2021 ..... | B-238 |
| 9.1.                 | Arsitektur Informasi .....  | B-238 |
| 9.2.                 | Arsitektur Aplikasi .....   | B-244 |
| 9.3.                 | Arsitektur Infrastruktur Teknologi .....  | B-246 |
| 9.4.                 | Manajemen dan Organisasi .....  | B-251 |
| 9.5.                 | Pendekatan Roadmap Implementasi.....  | B-265 |
| BIODATA PENULIS..... |   | 429   |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Relevansi Usulan Tugas Akhir dengan Roadmap Laboratorium MSI.....           | 6  |
| Gambar 2.2 Model Tata Kelola TIK Nasional [1] .....                                    | 14 |
| Gambar 2.3 Model penilaian Aydin dan Tasci.....  | 24 |
| Gambar 3.4 Metode Pengerjaan Tugas Akhir .....   | 26 |
| Gambar 6.5 <i>Datawarehouse</i> Prov Riau 2016-2020 .....                              | 52 |
| Gambar 6.6 <i>Datawarehouse</i> Prov Riau 2016-2020 .....                              | 52 |
| Gambar 6.7 Topologi LAN dan WAN Area Provinsi Riau ...                                 | 63 |
| Gambar 6.8 Struktur Organisasi Diskominfo Prov Riau.....                               | 69 |
| Gambar 6.9 Tabel paket pengembangan TIK Prov Riau .....                                | 83 |
| Gambar 6.10 Contoh pendanaan TIK yang ada di Prov Riau                                 | 84 |
| Gambar 6.11 penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan Prov Riau..... | 86 |
| Gambar 6.12 Hasil akhir perhitungan Provinsi Riau .....                                | 88 |
| Gambar 6.13 Hasil akhir perhitungan Provinsi Gorontalo.....                            | 89 |
| Gambar 6.14 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Karangasem .....                         | 91 |
| Gambar 6.15 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Banjar .....                             | 92 |
| Gambar 6.16 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Kerinci .....                            | 94 |
| Gambar 6.17 Hasil akhir perhitungan Kota Bogor.....                                    | 95 |
| Gambar 6.18 Hasil akhir perhitungan Provinsi NTB .....                                 | 97 |
| Gambar 6.19 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Maros.....                               | 98 |

|   |       |
|---|-------|
| Gambar 6.20 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Sragen ....           | 100   |
| Gambar 6.21 Contoh peta kepemilikan data Provinsi<br>Gorontalo..... | B-7   |
| Gambar 6.22 Contoh blok fungsi pada modul Prov Gorontalo<br>.....   | B-11  |
| Gambar 6.23 Contoh modul kemeperintahan.....                        | B-11  |
| Gambar 6.24 List aplikasi Provinsi Gorontalo .....                  | B-12  |
| Gambar 6.25 Contoh penjelasan aplikasi provinsi gorontalo .B-<br>13 |       |
| Gambar 6.26 Tabel penggunaan ISP di Gorontalo.....                  | B-15  |
| Gambar 6.27 Topologi jaringan VoiP Gorontalo .....                  | B-16  |
| Gambar 6.28 Topologi LAN Prov Gorontalo.....                        | B-16  |
| Gambar 6.29 Jaringan WAN Gorontalo.....                             | B-17  |
| Gambar 6.30 Ruang data Provinsi Gorontalo.....                      | B-18  |
| Gambar 6.31 Topologi Data Center Provinsi Gorontalo ....            | B-20  |
| Gambar 6.32 Contoh koneksi internet.....                            | B-22  |
| Gambar 6.33 Gambar Struktur Organisasi TIK Prov Gorontalo<br>.....  | B-23  |
| Gambar 6.34 Tabel Tupoksi Jabatan Provinsi Gorontalo...             | B-23  |
| Gambar 6.35 Peta pentahapan Provinsi Gorontalo.....                 | B-41  |
| Gambar 6.36 Tabel Pendanaan Karangasem .....                        | B-71  |
| Gambar 6.37 Penyusunan jadwal Kabupaten Karangasem                  | B-73  |
| Gambar 6.38 Daftar pengembangan Kabupaten Banjar ...                | B-103 |



|  |       |
|--|-------|
| Gambar 6.39 List contoh pendaan Kabupaten Banjar.....          | B-104 |
| Gambar 6.40 Struktur Organisasi Kabupaten Kerinci.....         | B-122 |
| Gambar 6.41 Penyusunan jadwal Kabupaten Kerinci.....           | B-139 |
| Gambar 6.42 Struktur Organisasi Bogor.....                     | B-154 |
| Gambar 6.43 Pendjawalan Pengembangan Bogor .....               | B-171 |
| Gambar 6.44 Tabel penjelasan <i>server</i> NTB .....           | B-184 |
| Gambar 6.45 Penggunaan OS dan RDMBS pada aplikasi.....         | B-186 |
| Gambar 6.46 Pengelola TIK Provinsi NTB .....                   | B-189 |
| Gambar 6.47 Penyusunan Jadwal Roadmap Provinsi NTB ...         | B-206 |
| Gambar 6.48 Jadwal impelementasi Kabupaten Maros ...           | B-237 |
| Gambar 6.49 Struktur pengelola Kabupaten Sragen .....          | B-251 |
| Gambar 6.50 Penjadwalan pengembangan TIK Kabupaten Sragen..... | B-268 |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Table 2.1 Contoh Bentuk Perangkat Pengujian Pada ICT PURA [17] .....            | 22  |
| Table 6.2 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi Riau 2016-2020 .....        | 87  |
| Table 6.3 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi Gorontalo 2009-2013.....    | 88  |
| Table 6.4 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Karang asem 2010-2014..... | 90  |
| Table 6.5 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Banjar 2014-2019.....      | 91  |
| Table 6.6 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Kerinci 2014-2019.....     | 93  |
| Table 6.7 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kota Bogor 2014-2018 .....           | 94  |
| Table 6.8 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi NTB 2015-2019 .....         | 96  |
| Table 6.9 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Maros 2016-2020.....       | 97  |
| Table 6.10 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Sragen 2016-2012.....     | 99  |
| Table 6.11 Rekap rata-rata hasil akhir perhitungan pada tiap dokumen .....      | 100 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta relevansi tugas akhir.

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan adanya *good governance*. Dengan melakukan implementasi *good governance* akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi lainnya, penggunaan TIK oleh institusi pemerintahan sudah dilakukan sejak beberapa dekade lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat [1]. Agar penerapan teknologi informasi dapat mendukung *good governance* di pemerintahan maka diperlukan suatu perencanaan strategis TIK yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai fungsinya dengan baik.

Selain itu untuk memastikan penggunaan TIK tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan sebuah tata kelola TIK nasional [1]. Hal ini diperlukan agar perencanaan strategi TIK pada pemerintahan bisa lebih harmonis yaitu dengan lebih terintegrasi dan tersinkronasi secara nasional dan menyeluruh, selain itu juga peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja/investasi TIK [1], karena hal ini dapat menghindari adanya redundansi terhadap inisiatif TIK dan juga dapat menghindari dari adanya tindak kecurangan terhadap belanja/investasi TIK yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak masyarakat atau publik, sehingga mereka tidak dapat merasakan langsung dampak dari pencapaian dari sebuah implementasi TIK yang ada. Hal lain yang perlu dicatat bahwa dengan adanya sebuah panduan tata kelola TIK yang berbasis nasional dapat dijadikan kontrol sosial bagi masyarakat terhadap perencanaan strategi TIK pemerintahannya karena

sifatnya yang transparan, dan juga dengan adanya perencanaan pengembangan TIK masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik [1]

*Master plan IT* adalah sebuah portofolio aplikasi sistem informasi berbasis teknologi informasi yang akan menjadi pedoman dan petunjuk sebuah organisasi, instansi atau perusahaan dalam melakukan perencanaan bisnis dan merealisasikan tujuan bisnis mereka. [4]

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya setiap elemen institusi pemerintahan dalam menyusun dokumen perencanaan pengembangan teknologi Informasi atau sering disebut *master plan IT* atau bisa juga disebut rencana induk TIK ataupun rencana pengembangan TIK perlu mengikuti panduan/pedoman yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya panduan nasional sudah disusun dengan batasan yang sesuai *best practice* yang ada serta dapat mengoptimalkan ketercapaian *value* dari penyelenggaraan TIK di lingkungan kerja-nya masing masing baik internal manajemen maupun pelayanan publik. [1]

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan yang menjadi fokus dan akan diselesaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi pada instansi pemerintah sesuai dengan panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional tahun 2007 terutama pada bagian proses perencanaan sistem?
2. Apakah rekomendasi yang sebaiknya diberikan untuk memperbaiki dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi agar sesuai dengan panduan tata kelola TIK nasional tahun 2007

### **1.3. Batasan Masalah**

Dari permasalahan yang disebutkan di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian yang dilakukan pada penelitian ini hanya pada proses tata kelola yaitu perencanaan sistem pada aspek siklus dan lingkup perencanaan yang terdapat di panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional tahun 2007. Dimana perangkat penguji yang digunakan yaitu pada 5 komponen perencanaan yaitu Arsitektur Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur Teknologi, Manajemen dan Organisasi, Pendekatan dan Roadmap Implementasi
2. Batasan instansi pemerintahan sesuai dengan apa yang ada pada “Panduan Tata Kelola TIK Nasional” yaitu:
  - A. Departemen atau LPND di tingkat pusat
  - B. Propinsi
  - C. Kabupaten/Kota
3. Dokumen pengembangan teknologi informasi instansi pemerintah diatas tahun 2007 merupakan hasil pencarian data melalui internet, berikut ini adalah dokumen yang berhasil diunduh:
  - A. Master Plan E-Government Pemerintah Banjar Periode 2015-2019
  - B. Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Gorontalo Periode 2009-2013
  - C. Perencanaan Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Bogor 2014-2018
  - D. Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kerinci 2014-2019

- E. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Periode 2016-2020
  - F. Master Plan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (E-Government) Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2014
  - G. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
  - H. Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2013
  - I. Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Sragen Periode 2016-2021
4. Penentuan tingkat kesesuaian pada dokumen menggunakan batas dengan nilai yang ditentukan oleh metode *e-learning readiness* Cengiz Hakan Aydin dan Deniz Tasci

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1. Mengetahui kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi terhadap panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional tahun 2007
- 2. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi pada instansi pemerintahan agar sesuai dengan panduan umum tata kelola TIK nasional.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:



**Bagi akademik :**

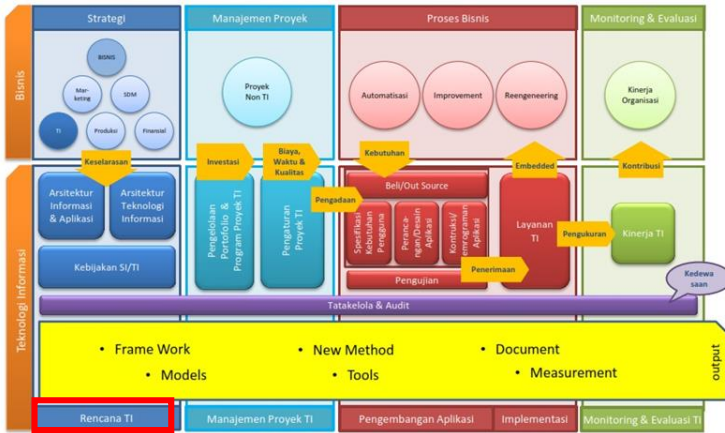
Mengetahui kesesuaian pada dokumen pengembangan teknologi informasi terhadap panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional, Selain itu dapat dilakukan penelitian/kajian lebih lanjut mengenai beberapa aspek yang tidak dilakukan pada tugas akhir ini

**Bagi instansi pemerintahan :**

Menjadi sarana evaluasi bagi pemerintahan dalam membuat dokumen pengembangan teknologi informasi agar sesuai dengan standar yang telah disusun. Sehingga terjadi harmonisasi dalam pembuatan dokumen tersebut.

**1.6. Relevansi Tugas Akhir**

Topik yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini adalah kajian dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi pada instansi pemerintahan terhadap panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional tahun 2007. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu analisis kepatuhan dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi pada pemerintahan terhadap panduan tata kelola TIK nasional. Keterkaitan penelitian ini dengan perkuliahan yang telah dipelajari oleh penulis yaitu mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dan termasuk pada bagian rencana TI dalam roadmap laboratorium MSI.



Gambar 1.1 Relevansi Usulan Tugas Akhir dengan Roadmap Laboratorium MSI

## 1.7. Target Luaran

Target luaran dari pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Perangkat yang digunakan untuk menganalisa tingkat kesesuaian pada pengerjaan tugas akhir ini
2. Dokumen pengerjaan tugas akhir berupa buku tugas akhir yang berisi perangkat dan hasil analisa kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan TIK

## 1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan pada laporan hasil penelitian tugas akhir ini, terdapat sistematika penulisan yang diterapkan, antara lain terdiri dari beberapa bab berikut dibawah ini yang masing-masing memberikan informasi yang berbeda.

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang, rumusan permasalahan, batasan permasalahan, tujuan, manfaat, relevansi tugas akhir, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai studi literatur atas dasar-dasar teori yang dipelajari dan berhubungan dengan penelitian tugas akhir ini sebagai pendukung penyelesaian permasalahan.

## **BAB III: METODOLOGI**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana metodologi yang digunakan dalam melakukan pengerjaan tugas akhir dan pembuatan dokumen laporan tugas akhir

## **BAB IV: PERANCANGAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai fase perancangan perangkat kesesuaian yang digunakan untuk menganalisis dokumen perencanaan pengembangan TIK instansi pemerintahan

## **BAB V: IMPLEMENTASI**

Pada bagian ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan pengerjaan tugas akhir, bagaimana tugas akhir dilakukan, hambatan dan rintangan dalam proses pengerjaan.

## **BAB VI: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian berisi mengenai penjelasan hasil analisis dari dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi dengan perangkat yang telah dibuat. Hasil menjelaskan mengenai nilai yang didapat untuk mengetahui tingkat kesesuaian. Selanjutnya terdapat rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.

## **BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini berisi kesimpulan akhir dari serangkaian proses pengerjaan tugas akhir kesesuaian perencanaan pengembangan teknologi informasi pada instansi pemerintah terhadap panduan

tata kelola TIK 2007 dan juga beberapa saran terhadap instansi pemerintah dan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan dasar teori yang akan dijadikan acuan atau landasan dalam pengerjaan tugas akhir ini

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, perlu adanya pedoman dan referensi dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan dasar teori dan masukan sebagai bahan dasar yang akan dipakai. Berikut adalah penjelasan mengenai deskripsi, metode, hasil, serta keterkaitan dari penelitian terdahulu dengan tugas akhir ini yang akan disajikan dalam bentuk tabel:

| <b>Tata Kelola Perencanaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi [5]</b> |   |
|--|---|
| Nama Penulis   | Bahrawi   |
| Tahun Penelitian   | 2015  |
| Deskripsi umum penelitian  | Penggunaan panduan umum tata kelola TIK nasional dalam rangka evaluasi tingkat kematangan terhadap penerapan tata kelola TIK pada Dinas Kominfo Kota Bitung                             |
| Hasil penelitian   | Dinas Kominfo Kota Bitung dari sisi tata kelola perencanaan sistem TIK<br><br>masih berada pada <i>level</i> rendah, yaitu <i>level</i> 1 dengan nilai tingkat kematangan sebesar 0.63. |

|  |   |
|--|---|
| Keterkaitan penelitian   | Pengunaan panduan umum tata kelola TIK nasional sebagai alat dalam kajian serta studi kasus yang sama yaitu pada instansi pemerintah, walaupun berbeda pada jenis kajian yang akan dilakukan  |
| <b>Audit IT Governance Kabupaten Sleman [6]</b>  |   |
| Nama penulis   | Cecillia Lusiani  |
| Tahun penelitian   | 2009  |
| Deskripsi umum penelitian  | Melihat garis besar tata kelola TIK Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dalam kerangka kerja audit <i>IT Governance</i> (COBIT) dimana tata kelola TIK Pemerintah Kabupaten Sleman telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) <i>E-Government</i> Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 |
| Hasil penelitian   | RIP Pemerintahan Kabupaten Sleman masih belum optimal setelah ditinjau melalui <i>framework</i> COBIT. Perencanaan yang dibuat masih sangat umum, belum jelas dan tidak lengkap   |
| Keterkaitan penelitian   | Penelitian ini memiliki topik yang sama yaitu melakukan kajian terhadap RIP pada instansi pemerintah walaupun perbedaan pada jenis kajian dan <i>tool</i> yang akan digunakan   |
| <b>Tinjauan Sebuah Masterplan IT (Studi Kasus Master Plan Pemerintah Daerah DKI Jakarta) [7]</b> |   |
| Nama penulis   | Armadiyah Amborowati  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tahun penelitian          | 2010   |
| Deskripsi umum penelitian | Membuat sebuah <i>master plan IT</i> yang baik   |
| Hasil penelitian          | <p><i>Master plan IT</i> yang baik berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman pendahuluan yang menceritakan kondisi sekarang.</li> <li>2. Halaman penjabaran yang menjabarkan tujuan dari master plan.</li> <li>3. Halaman tentang kebijakan yang harus dibuat untuk mendukung master plan.</li> <li>4. Halaman yang memuat strategi implemntasi dengan memperhitungkan analisis SWOT.</li> <li>5. Halaman <i>action</i> yang harus diambil.</li> <li>6. Halaman paparan hasil yang akan dicapai dari action-action tersebut.</li> <li>7. Rekomendasi yang diberikan dalam implementasi IT.</li> </ol> <p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa contoh <i>master plan IT</i>-nya bisa dijadikan bahan dalam menyusun dokumen yang baik</p> |
| Keterkaitan penelitian    | Bagaimana pembuatan <i>master plan IT</i> yang sesuai? terlebih lagi studi kasus yang diberikan sama dengan topik tugas  |

|   |   |
|---|---|
|   | akhir yaitu mengenai instansi pemerintah. Walaupun pada penelitian ini tidak menjelaskan menggunakan <i>framework</i> atau metode yang sudah diketahui, namun beberapa isinya ada beberapa yang memiliki kemiripan dengan panduan umum tata kelola TIK nasional yaitu pada Arsitektur infrastruktur teknologi. Sehingga pada tugas akhir akan dilakukan kajian terhadap dokumen <i>master plan IT</i> |
| <b>Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kantor Pemerintah Desa [8]</b> |   |
| Nama penulis  | Arifin Noor Asyikin, Rahimi Fitri, Agus Setiyo Budi Nugroho   |
| Tahun penelitian  | 2016  |
| Deskripsi umum penelitian   | Membuat sebuah perencanaan strategis TIK yang matang sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan <i>framework</i> COBIT 4.1  |
| Hasil penelitian  | <p>Dijelaskan bagaimana proses pembuatan dokumen <i>master plan IT</i>.</p> <p>Tahapan Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendefinisian rencana strategis TI dengan menggunakan kuesioner yang dirancang berdasarkan COBIT 4.1</li> <li>2. Pendefinisian arsitektur informasi, infrastruktur, personil, semua pendefinisian tersebut</li> </ol>                                       |



|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>dilakukan menggunakan kuesioner berdasarkan COBIT 4.1</p> <p>Penyusunan Masterplan IT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melihat visi – misi kantor Desa Bamban Selatan</li> <li>2. Analisis swot</li> <li>3. Rekomendasi pengembangan SI/TI</li> <li>4. Rancangan infrastruktur jaringan</li> </ol>  |
| Keterkaitan penelitian | <p>Menjelaskan bagaimana pembuatan dokumen <i>master plan IT</i> dimana pada penelitian ini menggunakan COBIT 4.1. Tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap dokumen <i>master plan IT</i> (terutama lebih detail dari cara pembuatannya) terhadap panduan umum tata kelola TIK nasional. Karena penyusunan panduan umum tata kelola TIK nasional juga berdasarkan COBIT walaupun pada penelitian ini studi kasus yang diambil berbeda yaitu pada desa tepatnya desa Bamban Selatan</p> |

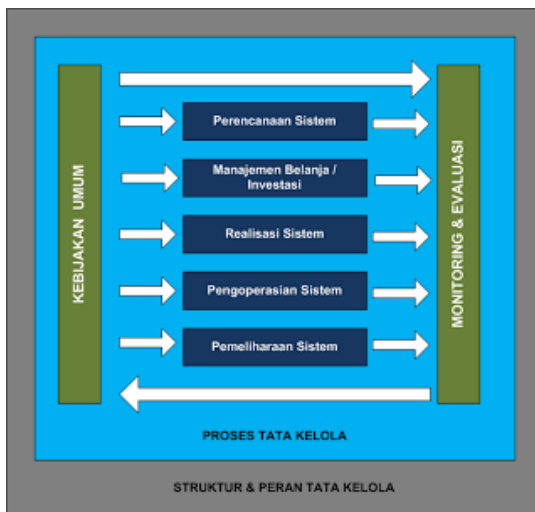
## 2.2. Dasar Teori

Bagian ini akan menjelaskan terori dan bahan penelitian lain yang menjadi dasar pengerjaan tugas akhir ini.

### 2.2.1 Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007” mengenai “Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi”. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan terselenggarakannya “*good governance*” agar bisa lebih transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan [2]. Selain itu untuk meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pada perencanaan TIK di setiap elemen pemerintahan Dalam panduan tata kelola TIK ini memiliki model yang fokus terhadap pengelolaan proses proses TIK melalui mekanisme pengarahannya dan monitoring dan evaluasi. [1].



Gambar 2.2 Model Tata Kelola TIK Nasional [1]

Model ini dibagi menjadi dua bagian utama yaitu **Struktur dan Peran Tata Kelola**, **Proses Tata Kelola**.

- a) **Struktur tata kelola** yaitu entitas apa saja yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK. [1]

- b) **Proses tata kelola** yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko. [1]

## I. Lingkup Proses Tata Kelola

- **Perencanaan Sistem** – Proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi inisiatif-inisiatif TIK, Apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut
- **Manajemen Belanja/Investasi** – Proses ini menangani pengelolaan investasi/belanja TIK
- **Realiasi Sistem** - Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK.
- **Pengoperasian Sistem** – Proses ini menangani operasi TIK yang memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan
- **Pemeliharaan Sistem** - Proses ini menangani pemeliharaan aset-aset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal

## II. Mekanisme Proses Tata Kelola

- **Kebijakan Umum** – Kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan – batasan atas proses TIK. Bagaimana sebuah proses TIK dilakukan untuk memenuhi kebijakan yang ditetapkan
- **Monitoring dan Evaluasi** - Monitoring dan evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanya umpan balik atas pengelolaan TIK, yaitu berupa

ketercapaian kinerja yang diharapkan. Untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses TIK digunakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan inilah yang akan dapat digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui apakah proses TIK telah dilakukan dengan baik.

## **2.2.2 Proses Perencanaan Sistem**

Merupakan salah satu ruang lingkup proses tata kelola dalam model tata kelola TIK nasional. Memiliki definisi yaitu proses yang ditujukan untuk menetapkan visi, arsitektur TIK dalam hubungannya dengan kebutuhan organisasi dan rencana realisasi atas implementasi visi dan arsitektur TIK tersebut. Rencana TIK yang telah disusun akan menjadi referensi bersama bagi seluruh satuan kerja dalam sebuah institusi atau referensi bersama beberapa institusi yang ingin mensinergiskan inisiatif TIK-nya [1]

### **2.2.2.1. Ruang Lingkup**

#### **A. Sinkronasi dan Integrasi**

- Sinkronisasi dan integrasi perencanaan sistem dilakukan sejak di level internal institusi maupun hubungan antar institusi.
- Komite TIK institusi memberikan persetujuan akhir atas rencana induk TIK lima tahunan institusi, yang kemudian akan disahkan secara legal dan formal oleh eksekutif institusi.
- Dewan TIK Nasional melakukan review dan memberikan masukan atas perencanaan TIK departemen atau lembaga di tingkat pusat.
- Dewan TIK Nasional memberikan persetujuan akhir atas rencana flagship nasional, yang kemudian akan disahkan secara legal dan formal oleh eksekutif pemerintahan.

## **B. Siklus dan Lingkup Perencanaan**

- Setiap institusi pemerintahan memiliki rencana induk TIK lima tahunan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan inisiatif TIK tahunan, dengan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Flagship TIK Nasional.
- Setiap institusi pemerintahan minimal harus memiliki perencanaan atas komponen berikut ini:
  - a. **Arsitektur Informasi**, yaitu model informasi organisasi yang mendefinisikan lingkup kebutuhan informasi yang dipetakan ke dalam proses bisnis organisasi terkait.
  - b. **Arsitektur Aplikasi**, yaitu model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lingkup aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level proses bisnis organisasi seperti: transaksional, operasional, pelaporan, analisis, monitoring dan perencanaan
  - c. **Arsitektur Infrastruktur Teknologi**, yaitu: topologi, konfigurasi, dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan.
  - d. **Organisasi dan Manajemen**, yaitu struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen TIK.
  - e. **Pendekatan dan Roadmap Implementasi**, yaitu pola pendekatan yang digunakan untuk memastikan implementasi seluruh arsitektur beserta organisasi dan manajemen, didukung oleh

roadmap implementasi yang mendeskripsikan tahapan-tahapan target implementasi dalam sebuah durasi waktu tertentu.

**C. Komite TIK institusi dapat melakukan review kekinian dan kesesuaian Rencana Induk TIK institusi secara reguler.**

### **2.2.3 Komponen Perencanaan Sistem**

Setiap institusi pemerintahan minimal harus memiliki perencanaan atas komponen berikut ini [1]:

#### **2.2.3.1 Perencanaan Arsitektur Informasi**

- a. Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan arsitektur informasi adalah tersedianya satu referensi model informasi organisasi, yang akan menjadi rujukan seluruh desain software aplikasi di tahap selanjutnya, dalam rangka mengurangi tingkat redundansi informasi.
- b. Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (*datamart, database, database table*, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dll).
- c. Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian *data dictionary*, dan *syntax rules*.
- d. Arsitektur informasi juga menetapkan klasifikasi level keamanan data untuk setiap klasifikasi kelas data melalui penetapan kriteria yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

#### **2.2.3.2 Perencanaan Arsitektur Aplikasi**

- a. Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan arsitektur aplikasi adalah terealisasinya dukungan atas proses bisnis dimana setiap aplikasi selalu akan

berkorelasi terhadap sebuah proses bisnis tertentu yang didukungnya.

- b. Arsitektur aplikasi memberikan peta tentang aplikasi apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik konteks organisasi dan manajemen.

Secara umum kategorisasi dapat dilakukan atas:

- **Pelayanan Publik** – merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada warga dan komunitas bisnis, baik layanan informasi, komunikasi maupun transaksi.
  - **Manajemen Internal** – merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk mengelola proses bisnis standar manajemen seperti keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, pengelolaan program kerja, monitoring kinerja, dan sejenisnya.
  - **Pendukung Manajemen** – merupakan aplikasi yang sifatnya mendukung operasional manajemen sehingga proses-proses bisnis standar manajemen dan pelayanan kepada publik dapat optimal, mencakup di antaranya fungsional informasi, komunikasi dan kolaborasi.
  - **Datawarehouse & Business Intelligence** – merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola laporan dan fasilitas analisis data multidimensional.
- c. Efisiensi arsitektur teknis aplikasi ditempuh melalui pendekatan “*One Stop Window*” untuk setiap tipe pelanggan institusi pemerintah, terutama publik dan bisnis. Melalui pendekatan ini, publik hanya perlu mengakses satu sistem (menggunakan beragam delivery channel) untuk mendapatkan layanan TIK. Pendekatan ini terutama diimplementasikan untuk implementasi *E-Government* di lembaga/LPND, propinsi dan kabupaten/kota.

### 2.2.3.3 Perencanaan Infrastruktur Teknologi

- a. Infrastruktur teknologi mencakup jaringan komunikasi, perangkat pemrosesan informasi (*server*, *workstation* dan peripheral pendukungnya), *software system* (sistem operasi, *database* RDBMS), dan media penyimpanan data.
- b. Perencanaan arsitektur infrastruktur teknologi diharapkan dapat mengutamakan mekanisme *shared-services*, fokus ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK. Mekanisme *shared-services* arsitektur teknis diimplementasikan atas aspek-aspek sumberdaya berikut ini:
  - Infrastruktur komunikasi: jaringan komputer/komunikasi, koneksi internet.
  - Infrastruktur penyimpanan data (*data center*) dan/atau DRC (*Disaster Recovery Center*)

### 2.2.3.4 Perencanaan Manajemen dan Organisasi

- a. Perencanaan organisasi mencakup identifikasi struktur organisasi pengelola yang akan melakukan operasional harian.
- b. Perencanaan manajemen mencakup pendefinisian prosedur teknis dengan prioritas pada domain:
  - Realisasi Sistem
  - Operasi Sistem
  - Pemeliharaan Sistem

### 2.2.3.5 Perencanaan Pendekatan dan Roadmap Implementasi

- a. Setiap perencanaan sistem menyertakan skenario *project governance* untuk setiap proyek inisiatif TIK yang direncanakan, untuk memastikan proyek-proyek



inisiatif TIK dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.

- b. Setiap inisiatif yang direncanakan selalu menyertakan proyeksi waktu, kapan *benefit* yang diharapkan dapat terealisasi (*benefit realization schedule*).
- c. Setiap perencanaan sistem mempunyai roadmap implementasi yang didasarkan pada analisis kesenjangan arsitektur (informasi, aplikasi dan infrastruktur teknologi) serta kesenjangan manajemen dan organisasi.
- d. Roadmap implementasi terdiri dari portofolio program implementasi (yang dapat terdiri dari beberapa portofolio proyek untuk setiap programnya), penetapan peringkat prioritas portofolio proyek, dan pemetaan dalam domain waktu sesuai dengan durasi waktu yang ditargetkan.
- e. Penetapan peringkat prioritas portofolio proyek inisiatif TIK dilakukan setidaknya berdasarkan faktor *level* anggaran yang dibutuhkan, kompleksitas sistem, dan besar usaha yang diperlukan.

## **2.2.4 Rencana Induk TIK**

Rencana Induk untuk TIK atau sering disebut (RITIK) adalah penyusunan strategi atau arahan pengembangan dari pemanfaatan TIK dalam organisasi. Tanpa adanya RITIK, pengembangan TIK cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi (atau bahkan terduplikasi) yang akhirnya membentuk pulau-pulau data, aplikasi dan infrastruktur akibat kurang terkoordinasinya pengembangan TIK antara satuan kerja. Dengan RITIK akan membuat visi dan kepemimpinan TIK menjadi lebih jelas. Prioritas pengembangan TIK pun menjadi lebih jelas dan tidak lagi dilihat secara *ad-hoc*. Sehingga pada akhirnya peran dan manfaat TIK dapat terasa bagi pembangunan di Indonesia yaitu untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja serta turut membantu menciptakan

tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat *E-Government* memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan teknis untuk Penyusunan Rencana Induk untuk TIK (RITIK) bagi Pemerintah Daerah. [3]

### 2.2.5 Perangkat Pengujian

Perangkat pengujian merupakan sebuah alat berupa daftar yang berisikan pertanyaan dan nilai untuk mengetahui tingkat kesesuaian dari dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi dari sebuah instansi pemerintahan. Perangkat yang digunakan menggunakan referensi model yang ada pada ICT PURA. Berikut ini adalah contoh tabel yang digunakan pada ICT PURA.

Table 2.1 Contoh Bentuk Perangkat Pengujian Pada ICT PURA [17]

| No.11                      | Apakah daerah memiliki dokumen cetak biru atau “blueprint” Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan sebagai panduan teknis? |
|----------------------------|---|
|                            | Responden: Pemda  |
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak tahu.   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, namun sudah terdapat inisiatif untuk segera menyusunnya.   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, namun tidak dimutakhirkan karena sudah dibuat cukup lama.  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun.   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan                   |

| No.11            | Apakah daerah memiliki dokumen cetak biru atau “blueprint” Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan sebagai panduan teknis?  |
|------------------|--|
|                  | baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan.   |
| □ 5              | Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan, serta dievaluasi/diaudit efektivitas keberadaannya. |
| Bukti Pendukung  |  |
| Catatan Tambahan |  |

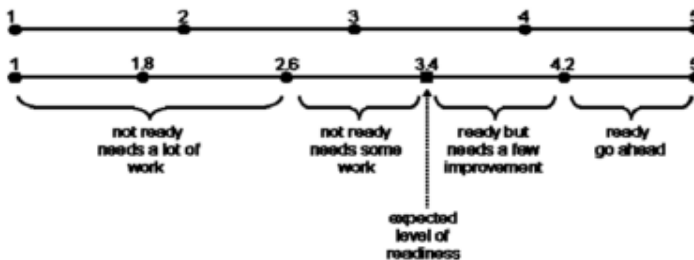
### 2.2.6 Perencanaan Strategis SI/TI

Perencanaan strategis SI/TI merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis teknologi informasi yang akan menjadi pedoman dan petunjuk sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan bisnis dan merealisasikan tujuan bisnis mereka. Perencanaan strategis SI/TI melihat pengaruh dari SI/TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai *tools*, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif [4].

### 2.2.7 Model penilaian Cengiz Hakan Aydin dan Deniz Tasci

*Readiness* dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi atau kelompok tertentu dalam mengadopsi, menggunakan maupun mengimplementasikan sesuatu []. Sehingga berdasarkan tersebut model ini penilaian ini bisa cocok untuk menentukan tingkat kesesuaian. Karena kesesuaian ini ditentukan berdasarkan tingkat implementasi pembuatan dokumen perencanaan pengembangan TIK berdasarkan panduan tata kelola TIK nasional 2007

Model ini digunakan untuk penilaian *e-learning readiness*. Model penilaian ini memiliki rentang nilai yang dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari paling kiri hingga paling kanan. Angka 1 mengindikasikan sebagai tingkat kesiapan terendah hingga angka 5 yang mengindikasikan sebagai tingkat kesiapan tertinggi. Model penilaian ini menyarankan skor rata-rata 3,4 untuk tingkat kesiapan penerapan e-learning yang diekspektasikan. Hal ini karena skala 5 poin terdiri 4 interval dan 5 kategori dengan rasio 4/5 yang senilai 0,8 [20].



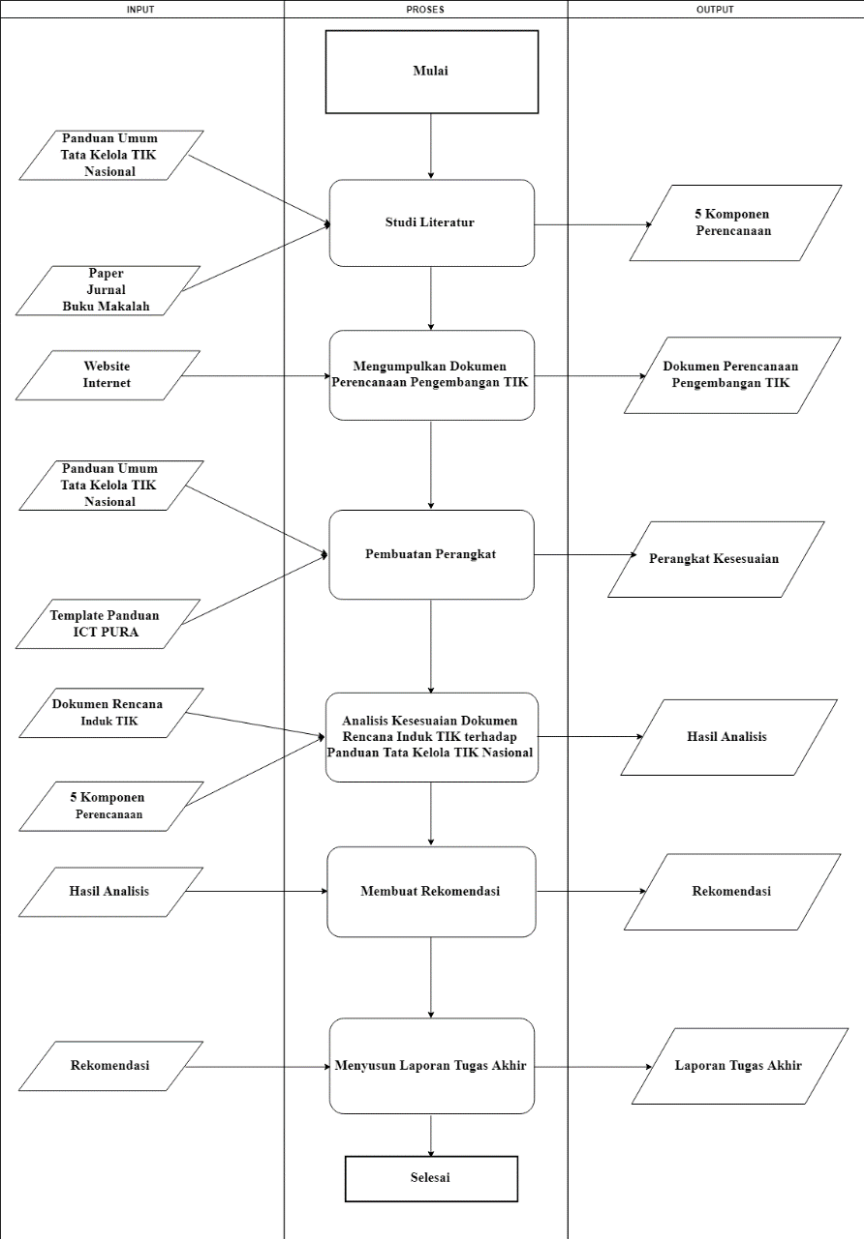
Gambar 2.3 Model penilaian Aydin dan Tasci

## **BAB III METODOLOGI**

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan penelitian dari awal hingga dokumen terbentuk

### **3.1. Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir**

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana gambaran alur dan metode dalam pengerjaan penelitian / tugas akhir. Berikut adalah gambar 3.4 merupakan metodologi penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 3.4 Metode Pengerjaan Tugas Akhir

### **3.2. Uraian Metodologi**

Berdasarkan metodologi pengerjaan tugas akhir pada gambar 3.4 berikut ini adalah penjelasan terhadap metodologi yang dilakukan:

#### **3.2.1 Studi Literatur**

Pada tahap ini dilakukan studi literatur untuk menentukan topik pengerjaan tugas akhir. Topik tugas akhir tersebut adalah “Kesesuaian Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi Pada Instansi Pemerintahan Terhadap Panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 2007”

Topik diambil berdasarkan analisis latar belakang permasalahan bahwa dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi sangat penting dalam menunjang *good governance* dan perlunya dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga menentukan batasan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Melakukan peninjauan pustaka demi mendukung latar belakang permasalahan. peninjauan pustaka dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya terkait dengan “Panduan Umum Tata Kelola Nasional 2007, Perencanaan Strategis TIK”. Selain itu juga mempelajari mengenai 5 komponen perencanaan pada Panduan Umum Tata Kelola Nasional 2007,

Setelah teridentifikasi dari 5 komponen perencanaan tersebut akan dijadikan bahan acuan dalam melakukan kajian terhadap dokumen perencanaan strategis TIK pada instansi pemerintahan. Kajian dilakukan dengan membandingkan 5 komponen item yang ada di panduan dengan yang ada di dokumen perencanaan strategis TIK. Adapun literatur yang diambil berasal dari jurnal ilmiah nasional, paper terkait penelitian, makalah penelitian, buku panduan dan juga sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengerjaan penelitian ini.

### **3.2.2 Mengumpulkan Dokumen Rencana Induk TIK**

Pada tahap ini dilakukan pencarian untuk mendapatkan dokumen rencana induk TIK tahun 2007 sebagai bahan untuk melakukan pengkajian pada pengerjaan tugas akhir sesuai dengan topik yang telah dipilih. dimana dokumen rencana induk TIK hanya pada instansi pemerintahan.

### **3.2.3 Membuat Perangkat Kesesuaian Berdasarkan Template ICT Pura**

Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat kesesuaian yang digunakan untuk menganalisis dokumen perencanaan pengembangan TIK. Perangkat ini dibuat dalam bentuk formulir / daftar yang didasari bentuk tabel pada “Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura” [17]. Perangkat ini berisi formulir/daftar mengenai apa saja kelengkapan yang telah disebutkan pada “Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional 2007”, Nantinya apabila dokumen memiliki kesesuaian terhadap perangkat yang telah dibuat berdasarkan panduan yang ada maka akan diberikan penilaian dengan nilai tertentu yang disusun, bergantung pada tingkat kesesuaian yang telah ditetapkan.

Dari proses tersebut maka akan didapatkan sebuah analisis, apakah dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi telah sesuai dengan dengan panduan yang ada.

### **3.2.4 Analisis Kesesuaian Dokumen Rencana Induk TIK terhadap Panduan Tata Kelola TIK Nasional**

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 5 komponen perencanaan yang ada pada dokumen rencana induk TIK apakah telah sesuai dengan “Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional”. Mengetahui apa saja isi dari sebuah komponen tersebut dan memandingkannya dengan dokumen-dokumen Perencanaan Strategis TIK pada institusi pemerintahan yang telah ditemukan melalui pengunduhan di Internet

Adapun 5 komponen perencanaan yang ada pada “Panduan Umum Tata Kelola Nasional”:



- a. **Arsitektur informasi**, yaitu model dari informasi organisasi yang merupakan kebutuhan organisasi berdasar proses bisnisnya.
- b. **Arsitektur aplikasi**, yaitu model dari aplikasi yang ada di sebuah organisasi yang menjelaskan lingkup aplikasi dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan organisasi.
- c. **Arsitektur infrastruktur**, yaitu topologi, konfigurasi, dan spesifikasi infrastruktur kebutuhan teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan ia sesuai dengan kebutuhan.
- d. **Organisasi dan manajemen**, yaitu struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen TIK.
- e. **Pendekatan dan roadmap implementasi**, yaitu pola pendekatan yang dipakai untuk memastikan implementasi seluruh arsitektur berserta organisasi dan manajemen dalam durasi waktu tertentu.

### 3.2.5 Membuat Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi berdasarkan dari perangkat yang telah dibuat, maka akan muncul beberapa temuan dan rekomendasi yang akan diberikan oleh penulis terkait dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi pada institusi pemerintahan. Rekomendasi diberikan berdasarkan dari, peraturan pemerintah dan panduan tata kelola TIK nasional.

### 3.2.6 Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penulisan Laporan Akhir adalah tahap paling akhir yang bertujuan untuk menghasilkan laporan mengenai proses pengerjaan tugas akhir, hasil mengenai pengerjaan tugas akhir dan juga kesimpulan terhadap pengerjaan tugas akhir. Pada proses ini juga dilakukan proses pengecekan dan validasi

terhadap analisis dokumen dan pemberian rekomendasi. Dengan adanya laporan akhir ini semoga bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian terkait dan juga dapat menambah wawasan mengenai perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada institusi pemerintahan

3.2.7 Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pada bagian ini akan disajikan jadwal yang akan digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2.7 berikut.

| No | Kegiatan                                 | Bulan 1 |   |   |   | Bulan 2 |   |   |   | Bulan 3 |   |   |   | Bulan 4 |   |   |   |
|----|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |  | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Studi literatur                          |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 2  | Mengumpulkan dokumen rencana induk TIK   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 3  | Membuat perangkat kesesuaian             |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 4  | Analisis terhadap 5 komponen perencanaan |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 5  | Membuat rekomendasi                      |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |
| 6  | Penyusunan laporan tugas akhir           |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |         |   |   |   |

Tabel 3.27 Tabel Timeline Pengerjaan Tugas Akhir

## **BAB IV PERANCANGAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan pembuatan perangkat kesesuaian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini.

### **4.1 Perancangan Perangkat Kesesuaian**

Perangkat kesesuaian disusun berdasarkan 5 komponen perencanaan yang ada “Panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2007”. Berikut ini adalah perancangan analisis kesesuaian ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah berikut :

#### **4.1.1 Arsitektur Informasi**

##### **A. Informasi Terstruktur**

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, terdiri atas 1 model informasi terstruktur.                                     |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, terdiri atas 2 model informasi terstruktur.                                     |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdiri atas 3 model informasi terstruktur.                                     |
| <input type="checkbox"/> 4 | Lengkap, tertuang dengan jelas mengenai semua informasi terstruktur yang dimaksudkan |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>           |
| Catatan                    |  |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur:<br>Pertukaran Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                            |
| <input type="checkbox"/> 2 | Telah membuat daftar informasi dan pengguna yang telah teridentifikasi berdasarkan tupoksi dan program kerja |
| <input type="checkbox"/> 3 | Telah menyusun pengelompokan informasi dan membuatnya menjadi matriks aliran informasi                       |
| <input type="checkbox"/> 4 | Menjelaskan lebih detail dengan menyusun diagram aliran informasi  |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

| No.1-B                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Datamart</i>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan                                      |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                        |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, minimal telah membuat daftar <i>datamart</i> yang dimiliki  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, daftar mart yang telah terdaftar dijelaskan dengan menggunakan diagram relasi antar <i>datamart</i> |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

| No.1-C                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Database</i>                                      |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan                         |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007           |
| <input type="checkbox"/> 3 | Telah melakukan identifikasi terhadap <i>database</i> yang dimiliki                         |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, <i>database</i> yang ada dijelaskan menggunakan diagram hubungan antar <i>database</i> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.1-D                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Database table</i>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Telah melakukan identifikasi terhadap tabel yang ada pada <i>database</i> yang dimiliki  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah tertuang jelas pada dokumen dan digambarkan dengan visualisasi yang baik (berupa gambar maupun jenis visualisasi lainnya) |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

**A. Informasi Tidak Terstruktur**

| No.2                              | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0        | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1        | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2        | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| <input type="checkbox"/> 3        | Ada, menjelaskan minimal 1 jenis model informasi tidak terstruktur   |
| <input type="checkbox"/> 4        | Ada, menjelaskan > 1 jenis model informasi tidak terstruktur   |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, <i>file</i> dokumen<br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur: (isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi) |
| Bukti pendukung                   |  |
| Catatan                           |  |



### B. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, terdiri atas 1-2 model informasi terstruktur.  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdiri atas 3-4 model informasi terstruktur.  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Lengkap, tertuang dengan jelas mengenai semua informasi terstruktur yang dimaksudkan                                    |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data |
| Catatan                    |   |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data                                    |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                    |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah mengidentifikasi kelas-kelas data yang ada                             |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, menjelaskan kelas-kelas data dengan bentuk table                             |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.3-B                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data                              |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                    |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah mengidentifikasi peta kepemilikan data                                 |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, menjelaskan peta kepemilikan data dengan menggunakan tabel/diagram           |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.3-C                     | Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                               |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, dijelaskan tidak lengkap   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, lengkap seperti nama database, tabel, <i>field</i> , tipe data, panjang data, penjelasan tiap <i>field</i> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.3-D                     | Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Syntax Rules</i>                                      |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                          |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007       |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, dijelaskan tida lengkap  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, lengkap seperti aspek peraturan penulisan, <i>syntax rule</i> , penjelasan lainnya |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.3-E                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data                    |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                    |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, dijelaskan tidak lengkap   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, lengkap terdapat informasi data, CRUD.                                       |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

Untuk perangkat pengujian pada komponen lainnya seperti arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur teknologi, manajemen dan organisasi, pendekatan roadmap implementasi dijelaskan pada bagian Lampiran – Perancangan,

## 4.2 Metode pengolahan dan penilaian data

Metode yang dilakukan untuk memberikan nilai adalah dengan mengimplementasikan metode penilaian pada *e-learning readiness* Aydin dan Tasci. Apabila pada Aydin dan Tasci rentang nilai 1,2,3,4,5 mulai dari kiri rendah hingga paling kanan tinggi. Akan tetapi pada tugas akhir ini akan menggunakan angka 0,1,2,3,4 Karena nantinya apabila tidak ada item pada perangkat akan diberi nilai 0. Karena sama menggunakan rentang nilai dengan interval 5. Maka dapat dikatakan bahwa nilai **2,4** mengindikasikan bahwa dokumen memiliki tingkat kesesuaian yang diharapkan.

Dalam melakukan perhitungan terhadap nilai nilai yang telah dianalisis tiap aspek dengan menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel*, untuk menghitung nilai rata-rata skor yang didapat untuk setiap dokumen yang telah diberikan nilai, yang mana sebelumnya hasil analisis nilai ditampilkan dengan menggunakan tabel pada bab selanjutnya. Dalam perhitungan tidak terdapat pembobotan terhadap 5 aspek yang dianalisis.

## 4.3 Pembuatan Rekomendasi

Setelah tahapan analisis selesai, maka rekomendasi akan diberikan pada setiap dokumen perencanaan pengembangan TIK di Instansi Pemerintahan. Hal ini bergantung dari tiap nilai yang didapatkan melalui perangkat berdasarkan tiap 5 komponen yaitu Arsitektur Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur Teknologi, Manajemen Organisasi dan Pendekatan Roadmap Implementasi. Yang akan diberikan rekomendasi adalah hasil analisis dengan nilai 0-3. Dimana rekomendasi berupa apa saja item yang perlu dilengkapi agar dokumen bisa sesuai dengan panduan tata kelola TIK nasional 2007. Penjelasan detail pada tiap rekomendasi yang diberikan pada dokumen perencanaan pengembangan TIK di instansi pemerintahan akan dijelaskan pada bab selanjutnya yaitu pada bab 6 Hasil dan Pembahasan.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI**

Bab ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan pengerjaan tugas akhir, bagaimana tugas akhir dilakukan, hambatan dan rintangan dalam proses pengerjaan.

#### **5.1. Pengumpulan Dokumen**

Pada pengerjaan tugas akhir ini dokumen perencanaan pengembangan TIK dikumpulkan dengan cara mencari melalui internet dengan memanfaatkan *search engine* dengan kata kunci “master plan IT, master plan TIK, rencana induk TIK, perencanaan pengembangan TIK” akan tetapi ada beberapa kendala yaitu tidak semua yang tersedia adalah dokumen dengan format yang sesuai.

Beberapa dokumen yang bisa diunduh ada yang berupa file presentasi mengenai perencanaan pengembangan TIK, ada juga hanya berupa ringkasan mengenai isi dokumen perencanaan pengembangan. Sehingga dengan melakukan pemilahan terhadap hasil pencarian berhasil terkumpul 9 dokumen yang menjadi obyek pengerjaan tugas akhir ini. Berikut ini adalah dokumen yang berhasil diunduh:

- 1) Master Plan *E-Government* Pemerintah Banjar Periode 2015-2019
- 2) Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi Gorontalo Periode 2009-2013
- 3) Perencanaan Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kota Bogor 2014-2018
- 4) Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kerinci 2014-2019
- 5) Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Periode 2016-2020

- 6) Master Plan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (*E-Government*) Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2014
- 7) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
- 8) Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2013
- 9) Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Sragen Periode 2016-2021

## **5.2. Pembuatan Perangkat Kesesuaian**

Dalam proses pengerjaan untuk membuat perangkat kesesuaian, mengalami kesulitan karena belum ada materi, perangkat terdahulu, ataupun *framework* yang berhubungan dengan cara menghitung kesesuaian perencanaan pengembangan TIK terhadap panduan tata kelola TIK nasional.

Maka dari itu setelah melakukan pencarian akhirnya dalam pembuatan perangkat mengacu pada buku profil dan panduan pelaksanaan ICT pura versi 1.60 – Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Walaupun metode perhitungan yang dipakai tidak menggunakan metode yang ICT pura gunakan karena keterbatasan pada penelitian ini bahwa tidak ada pembobotan dalam penilaian, ada beberapa aspek dalam ICT pura yang tidak relevan, selain itu juga belum ada metodologi perhitungan dalam menghitung analisa perangkat kesesuaian terutama untuk panduan tata kelola TIK nasional.

Dalam hal penyusunan perangkat kesesuaian yang mengacu pada ICT pura, Proses penyusunan mengalami beberapa kali pengulangan dalam pembuatan. Karena belum ada dasar acuan yang jelas, perangkat mengalami perubahan, terutama dalam mendetailkan aspek aspek yang akan diuji, selain itu tidak

mempertimbangkan jumlah pernyataan yang dipakai, sehingga perangkat masih perlu dikembangkan selanjutnya.

### **5.3. Analisa Kesesuaian**

Dalam menganalisa 9 dokumen mengalami banyak kendala terutama pada dokumen perencanaan pengembangan milik pemerintahan, karena konten dari dokumen yang mereka jelaskan sebagian besar adalah materi materi yang diambil pada panduan tata kelola TIK nasional, cetak biru (blueprint) sistem aplikasi *E-Government* yang dikeluarkan oleh departemen komunikasi dan informatika dan beberapa materi lainnya, sehingga banyak sekali pada dokumen yang mendapat nilai 0.

### **5.4. Perhitungan Tingkat Kesusaian**

Dalam melakukan perhitungan belum ada metode dasar mengenai perhitungan kesesuaian dan metode untuk memperhitungkan bobot dari tiap komponen yang ada, sehingga dalam penelitian ini perhitungan untuk mengetahui tingkat kesesuaian adalah dengan mengambil nilai rata-rata dari hasil analisa, setelah itu dilihat apakah nilai rata-rata telah memasuki batas kesesuaian atau belum. Batas kesesuaian ini diperoleh dengan acuan metode pada *e-learning readiness* yang dikembangkan oleh Cengiz Hakan Aydin dan Deniz Tasci. Dan telah dijelaskan detail pada bab sebelumnya di bab 4.2 metode pengolahan dan penilaian data.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang didapat analisis kesesuaian dan pembahasan secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian

### 6.1. Data Hasil Analisis

Pada bagian ini akan menjelaskan data hasil analisis kesesuaian dokumen pengembangan TIK instansi pemerintah dengan menggunakan perangkat pada 9 data dokumen yang berhasil ditemukan di Internet.

#### 6.1.1. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau 2016-2020

##### 6.1.1.1. Arsitektur Informasi

##### A. Informasi Terstruktur

| No.1                  | Adanya model informasi terstruktur   |
|-----------------------|--|
| □ 1                   | Ada, terdiri atas 1 model informasi terstruktur.   |
| Informasi terstruktur | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Bukti pendukung       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau 2016-2020 halaman 103-104 pada bab 5.2 Arsitektur Informasi</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan bukti pendukung melalui dokumen bahwa arsitektur model informasi yang mereka jelaskan hanya berupa gambar <i>datamart</i> dan</li> </ol>  |

| No.1 | Adanya model informasi terstruktur   |
|------|--|
|      | <p><i>datawarehouse</i> (dijelaskan pada gambar 6.5 dan 6.6)</p> <p>Penggambaran datamart juga masih belum sesuai karena seharusnya dijelaskan melalui per-datamart bukan melalui <i>datawarehouse</i> walaupun datamart adalah bagian dari-nya</p> <p>2. Masih banyak beberapa hal yang masih belum tertuang pada dokumen, terutama model informasi terstruktur lainnya seperti pertukaran data, <i>database</i>, <i>database table</i>. belum dijelaskan</p> |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak ada penjelasan mengenai model pertukaran data. Hal ini penting terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| No.1-B                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Datamart</i>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, minimal telah membuat daftar <i>datamart</i> yang dimiliki   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut dokumen master plan TIK Provinsi Riau 2016-2020 halaman 103-104 pada bab 5.2 Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijelaskan berupa gambar <i>datamart</i> dan <i>datawarehouse</i>. Dijelaskan pada gambar 6.5 dan gambar 6.6. Penggambaran <i>datamart</i> juga masih belum sesuai karena seharusnya dijelaskan melalui <i>per-datamart</i> bukan melalui <i>datawarehouse</i> walaupun <i>datamart</i> adalah bagian dari-nya</li> <li>2. Seharusnya ada model informasi <i>datamart</i> demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007</li> </ol> |





| No.1-D                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Database table</i>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai model informasi <i>database table</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

#### A. Informasi Tidak Terstruktur

| No.2                              | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0        | Tidak ada  |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br><br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur:<br>(isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)   |
| Bukti Pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol> |
| Catatan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen <i>master plan</i> TIK tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur.Hal ini</li> </ol>   |

| No.2 | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|------|--|
|      | <p>penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007, akan tetapi pada dokumen <i>master plan</i> provinsi Riau tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur</p> <p>2. UU No 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan informasi elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik, telegram, <i>teleks</i>, <i>telecopy</i> dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami</p> |

## B. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |

| No.3    | Matriks klasifikasi informasi  |
|---------|--|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan matriks klasifikasi informasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai kelas-kelas data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-B</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti Pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai peta kepemilikan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Data dictionary</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai <i>data dictionary</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti Pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai <i>syntax rules</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| <b>No.3-E</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti Pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai klasifikasi level keamanan data. Hal ini penting demi kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

### 6.1.1.2. Arsitektur Aplikasi

#### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | <p>Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi.</p>  |
| <p>Bukti pendukung</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen master plan TIK provinsi Riau 2016-2020 pada bab 3.6 Pemahaman Lingkungan Strategis 62-67 menjelaskan bahwa pemetaan aplikasi menggunakan kerangka fungsi pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Goverment Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| <p>Catatan</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan aplikasi tidak dijelaskan dengan kategori aplikasi berdasarkan konteks organisasi dan manajemen. hanya menjelaskan bahwa aplikasi yang ada ataupun yang akan dibangun akan mengitu pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan</li> <li>2. Selain itu dalam dokumen dijelaskan bahwa ada pemetaan aplikasi, namun</li> </ol>   |

| No.4 | Peta Aplikasi   |
|------|---|
|      | pada isi dokumen tidak penjelasan pemetaan dari tiap aplikasi |

| No.5             | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window   |
|------------------|--|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.  |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK  |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada website resmi pemerintah Provinsi sudah terdapat banyak aplikasi yang bisa diakses dengan menggunakan “<i>one stop window</i>”</li> <li>2. Dokumen pada halaman 150-156 tentang Analisis kesenjangan system informasi</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan          | <p>Berikut ini adalah contoh list aplikasi tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Online</li> <li>• Sistem Layanan Pengadaan (SIVAMONTOK)</li> <li>• SIMONEV</li> </ul>   |

| <b>No.5</b> | <b>Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window</b>  |
|-------------|--|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancang Kuning Bersinar</li> <li>• SMART APARATUR</li> <li>• LPPD Riau</li> </ul> |

### 6.1.1.3. Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| <b>No.6</b>                                | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</b>   |
|--|---|
| □ 3  | Ada, terdapat sekitar 3 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol> |
| Bukti Pendukung                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govenment (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol>                  |
| Catatan                                    | Sudah baik terdapat 3 cakupan yaitu jaringan komunikasi, Perangkat Pemrosesan dan Media Penyimpanan Data, namun alangkah  |

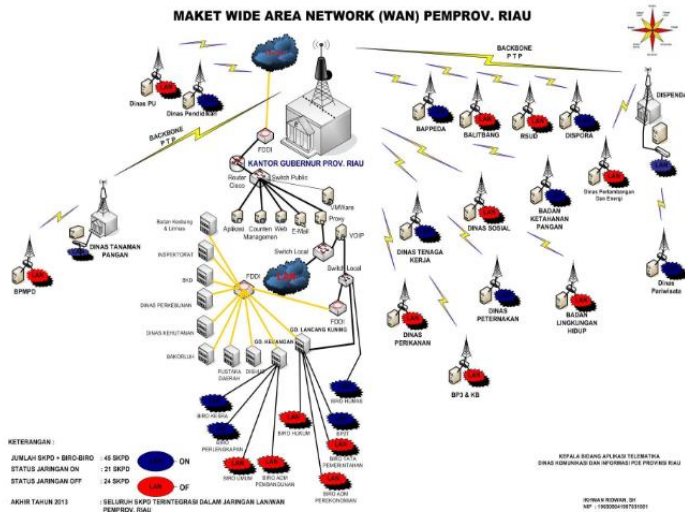


| <b>No.6</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi</b> |
|-------------|---|
|             | baiknya supaya bisa menjelaskan 4 jenis cakupan.                |

| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>  |
|---------------------|---|
| □ <b>4</b>          | Terdiri lebih dari 3 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci   |
| Jaringan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LAN</li> <li>2) WAN</li> <li>3) Internet</li> <li>4) VOIP dan lain lain.</li> </ol>   |
| Bukti pendukung     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen Master Plan TIK Provinsi Riau telah menjelaskan adanya jaringan komunikasi seperti LAN, WAN, Internet dan VOIP</li> <li>2. LAN dijelaskan pada bab 5.4.1.2 Arsitektur LAN DISKOMINFO pada halaman 111, dijelaskan juga topologi LAN area kantor Diskominfo</li> <li>3. WAN dijelaskan pada bab 5.4.1.1 Wide Area Network (WAN) pada halaman 108, terdapat penjelasan gambar topologi antar SKPD dan antar kabupaten/kota (Gambar 6.7)</li> </ol> |

| <b>No.6-A</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------|--|
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol>  |
| Catatan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan pada dokumen hanya mencakup pada tahap pengembangan kedepan, dijelaskan secara detail kondisi eksisting.</li> <li>2. Internet ada namun tidak dijelaskan pada dokumen secara detail, seperti penggunaan di area dinas, jumlah bandwidthnya ataupun menggunakan ISP dsbnya</li> <li>3. VOIP ada namun tidak dijelaskan pada dokumen secara detail</li> </ol> |

## MAKET WIDE AREA NETWORK (WAN) PEMPROV. RIAU



Gambar 6.7 Topologi LAN dan WAN Area Provinsi Riau

| No.6-B               | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan  |
|----------------------|---|
| □ 3                  | Ada, terdapat sekitar 2 perangkat pemrosesan  |
| Perangkat Pemrosesan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Server</li> <li>2) Workstation</li> <li>3) PC</li> </ol>  |
| Bukti pendukung      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server - pada master plan TIK provinsi Riau dijelaskan pada halaman 55 &amp; 116 pada bagian 1.1.1.2 Infrastruktur TIK bahwa mereka memiliki server</li> <li>2. PC - juga dijelaskan memiliki namun tidak dijelaskan detail.</li> </ol> |

| No.6-B  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur<br>Teknologi: Perangkat Pemrosesan   |
|---------|---|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk PC dan Server sebaiknya dijelaskan dengan detail mengenai unitnya, seperti spesifikasi, bagaimana kondisi infrastruktur tsb.</li> <li>2. Pengembangan Server dijelaskan pada halaman 116 bagaimana rencana mengenai server yang ada kedepannya</li> </ol>                 |

| No.6-C                     | Cakupan Arsitektur Infrastruktur<br>Teknologi: Software System   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <i>Software System</i>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) Application Development</li> <li>4) System Management</li> </ol> |

| <b>No.6-C</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan         | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai <i>Software System</i>. Hal ini penting demi memenuhi kesesuaian dan mengikuti panduan tata kelola TIK nasional tahun 2007.</p>   |

| <b>No.6-D</b>          | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi:      Perangkat      Media<br/>Penyimpanan Data</b>   |
|------------------------|---|
| □ 1                    | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Media Penyimpanan Data | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>  |
| Bukti pendukung        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen master plan TIK Provinsi Riau memiliki / melalui server kecil-kecil sebagai media penyimpanan data.</li> </ol> |

| No.6-D  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data   |
|---------|--|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DRC dan Data Center dijelaskan pengembangannya pada halaman 113</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah satu media yaitu yang dimiliki adalah <a href="https://drive.riau.go.id/">https://drive.riau.go.id/</a>, selain itu dibantu dengan bantuan pihak ketiga (gdrive, email, aplikasi chat.dll)</li> <li>2. Untuk DRC dan data center masuk dalam tahap perencanaan, dijelaskan pada Bab 5 Target Arsitektur TIK, untuk detailnya pada bagian 5.4.1.3 <i>Data Center &amp; Disaster Recovery Center</i></li> <li>3. Penjelasan untuk tiap perangkat tidak begitu detail.</li> </ol> |

## B. Shared Services

| No.7                       | Shared Services  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>   |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> </ul> |

| No.7            | Shared Services   |
|-----------------|---|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul>  |
| Bukti Pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen master plan TIK provinsi riau telah tertuang bahwa ada implemetasi internet service dan email service</li> <li>2. Email service digunakan pada beberapa SKPD dijelaskan pada halaman 55 bagian 1.1.1.1 Sistem Informasi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Keputusan menteri pendayaan aparatur negara Nomor 13/Kep/M. Pan/1/2003</li> <li>5. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013</li> </ol> |
| Catatan         | <p>Untuk penggunaan mail instansi belum terlaksana dengan baik, hal ini telah diatur pada: Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013 yang berisi agar dalam melakukan urusan kedinasan dengan memanfaatkan media surat elektronik, menggunakan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing</p>  |

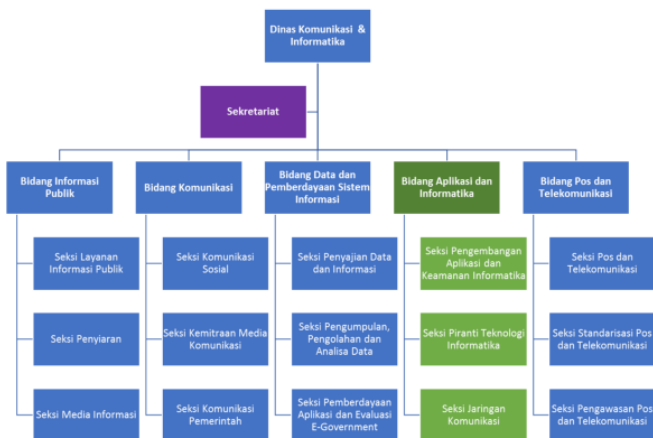
| No.7 | Shared Services  |
|------|--|
|      | pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing). go.id. |

#### 6.1.I.4. Manajemen dan Organisasi

##### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8                       | Struktur organisasi pengelola   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi pengelola dijelaskan pada halaman 132-143</li> <li>2. Untuk gambaran tiap struktur organisasi dan penjelasan tugas pokok dan fungsi pada bagian 5.5.6.1 Fungsi Pokok Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatik</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | <p>Berikut ini adalah contoh struktur organisasi yang ada dijelaskan pada gambar gambar 6.8. struktur organisasi pengelola TIK menurut mereka belum terbentuk namun menggunakan struktur organisasi dinaskominfo.</p> <p>Untuk contoh tugas pokok fungsi dijelaskan pada halaman 136.</p>   |





Gambar 6.8 Struktur Organisasi Diskominfo Prov Riau

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |

| No.9            | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai prosedur identifikasi dan pemilihan alternatif sistem. Hal itu penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> </ol> |

| No.10           | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC  |
|-----------------|--|
|                 | 3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program ( <i>coding</i> )<br>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan<br>5. Pelaksanaan penjaminan mutu ( <i>Quality Assurance</i> )<br>6. Uji coba ( <i>testing</i> ): <i>unit testing</i> , <i>system testing</i> , <i>integration testing</i> ,<br>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)<br>8. Instalasi dan akreditasi |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokume <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak ada penjelasan mengenai prosedur mengenai realisasi software meggunakan metode SDLC. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007   |

| <b>No.11</b>                      | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen perencanaan pengembangan TIK provinsi Riau , dijelaskan bahwa akan ada pelatihan atau training mengenai beberapa bagian mengenai pekerjaan TI seperti <i>administrator . Operator , IT security.</i> |

| <b>No.12</b>                      | <b>Analisis Kebutuhan Kapasitas</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Tidak Ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada halaman 173 bagian roadmap tata kelola</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                           | Pada halaman 173 bagian roadmap tata kelola dijelaskan bahwa mereka akan mengadakan manajemen kapasitas.  |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Prosedur Pengelolaan Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |

## D. Pengoperasian Sistem

### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Aspek Kritisal             | <p>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</p> <p>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) system TIK.</p> <p>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritisal sesuai dengan kebutuhan.</p> |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007.  |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                | Tidak ada   |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                   | Pada dokumen master plan TIK provinsi Riau tidak ada penjelasan mengenai prosedur aspek pengamanan dan keberlangsungan sistem. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007   |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK tidak ada penjelasan mengenai prosedur mekanisme sisi pengamanan aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007.</p>   |



| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi:<br>Mekasisme Pengamanan  |
|--|---|
| □ 2                                    | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktur teknologi   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hardening</i></li> <li>• <i>Firewall</i></li> <li>• <i>IDS/IPS</i></li> <li>• <i>Network Monitoring Tool</i></li> <li>• <i>Log processor &amp; analysis</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada halaman 158 bagian 6.2 Analisis kesenjangan infrastruktur &amp; keamanan TIK</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                                | Untuk mekanisme pengamanan dari sisi <i>firewall</i> , <i>IPS</i> ada perencanaan untuk melakukan hal tersebut . dijelaskan tabel 14 dalam dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau analisis kesenjangan infrastruktur dan keamanan TIK provinsi Riau (halaman 158)   |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1                  | Tidak ada, akan tetapi ada tahap perencanaan pembuatan  |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada buku perencanaan pengembangan TIK pada provinsi Riau di bagian roadmap tata kelola TIK halaman 173.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>              |
| Catatan                                     | Pada halaman 175 Menjelaskan mereka akan merencanakan mengenai implementasi IT <i>Operation</i> dan <i>Maintenance</i> ( <i>Backup, Restore, Monitoring</i> )   |

#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi ada tahap perencanaan pembuatan  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada buku perencanaan pengembangan TIK pada provinsi Riau di bagian roadmap tata kelola TIK halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Dokumen menjelaskan bahwa mereka akan merencanakan mengenai implementasi <i>IT Operation</i> dan <i>Maintenance (Backup, Restore, Monitoring)</i>   |

#### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi system   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ol> |

| <b>No.20</b>    | <b>Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga</b>  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Seharusnya ada prosedur kebijakan terhadap pengelolaan pihak ketiga demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

## **E. Pemeliharaan Sistem**

### **1. Pemeliharaan Software Aplikasi**

| <b>No.21</b>               | <b>Pemeliharaan Software Aplikasi</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Seharusnya ada prosedur pemeliharaan sistem terutama pemeliharaan software aplikasi demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

## 2. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                            | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0       | Tidak ada   |
| Patching infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server |
| Bukti pendukung                  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                          | Tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan infrastruktur teknologi   |

## 3. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai prosedur pemeliharaan data terutama prosedur teknis pemeliharaan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

#### 4. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak menjelaskan mengenai prosedur mengenai daur siklus hidup infrastruktur teknologi dan proses likuidasi sumberdaya .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

### 6.1.1.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

#### A. Paket Pengembangan TIK

| No.25                                 | Paket Pengembangan TIK   |                           |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----|----------|---|------------------------|--|---|----------|--------------------------|---|----------|---------------------------|---|----------|----------------------|
| <div><input type="checkbox"/> 4</div> | Setiap pengembangan TIK yang ada dijadikan satu kelompok dan diberi kode penjelasan  |                           |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| Bukti pendukung                       | <div><div>1. Pada bagian 7.3 Roadmap Impelementasi halaman 169 menjelaskan pengelompokan pengembangan TIK</div><div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div><div>3. Kebijakan dan Strategi Nasioan Pengembangan E-Goverment (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div></div>   |                           |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| Catatan                               | <div>Berikut ini contoh yang ada pada dokumen master plan mengenai paket pengembangan (Gambar 6.9) menggambarkan paket pengembamgan aplikasi</div> <div><table><tr><th>No</th><th>ID</th><th>Aplikasi</th></tr><tr><td>A</td><td colspan="2">MANAJEMEN PEMERINTAHAN</td></tr><tr><td>1</td><td>MPEM-001</td><td>SI Manajemen Kewilayahan</td></tr><tr><td>2</td><td>MPEM-002</td><td>SI Perencanaan &amp; Anggaran</td></tr><tr><td>3</td><td>MPEM-003</td><td>SI Pendapatan Daerah</td></tr></table></div> <div>Gambar 6.9 Tabel paket pengembangan TIK<br/>Prov Riau</div> | No                        | ID | Aplikasi | A | MANAJEMEN PEMERINTAHAN |  | 1 | MPEM-001 | SI Manajemen Kewilayahan | 2 | MPEM-002 | SI Perencanaan & Anggaran | 3 | MPEM-003 | SI Pendapatan Daerah |
| No                                    | ID   | Aplikasi                  |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| A                                     | MANAJEMEN PEMERINTAHAN   |                           |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| 1                                     | MPEM-001   | SI Manajemen Kewilayahan  |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| 2                                     | MPEM-002   | SI Perencanaan & Anggaran |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |
| 3                                     | MPEM-003   | SI Pendapatan Daerah      |    |          |   |                        |  |   |          |                          |   |          |                           |   |          |                      |

## B. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                                 | Pendanaan Pengembangan TIK   |                                    |         |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------|---|------------------------|--|--|---|----------|--------------------------|---------|---|----------|------------------------------------|--|
| <div><input type="checkbox"/> 4</div> | Setiap pendanaan dikategorikan berdasarkan total biaya yang dihabiskan   |                                    |         |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |
| Bukti pendukung                       | <div><div>1.</div><div>Pada halaman 190 dokumen bagian 7.3 Roadmap Implementasi</div></div> <div><div>2.</div><div>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div></div>  |                                    |         |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |
| Catatan                               | <div>Berikut ini adalah contoh dari pendanaan pengembangan TIK (Gambar 6.10)</div> <table><tr><th>A</th><th colspan="2">MANAJEMEN PEMERINTAHAN</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>MPEM-001</td><td>SI Manajemen Kewilayahan</td><td>900,000</td></tr><tr><td>2</td><td>MPEM-002</td><td>SI Perencanaan Kegiatan &amp; Anggaran</td><td></td></tr></table> <div>Gambar 6.10 Contoh pendanaan TIK yang ada di Prov Riau</div> |                                    |         | A | MANAJEMEN PEMERINTAHAN |  |  | 1 | MPEM-001 | SI Manajemen Kewilayahan | 900,000 | 2 | MPEM-002 | SI Perencanaan Kegiatan & Anggaran |  |
| A                                     | MANAJEMEN PEMERINTAHAN   |                                    |         |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |
| 1                                     | MPEM-001   | SI Manajemen Kewilayahan           | 900,000 |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |
| 2                                     | MPEM-002   | SI Perencanaan Kegiatan & Anggaran |         |   |                        |  |  |   |          |                          |         |   |          |                                    |  |

## C. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Manfaat pengembangan TIK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Pendapatan</li> <li>2) Pengurangan biaya</li> <li>3) Efisiensi proses kerja</li> <li>4) Peningkatan Pelayanan</li> <li>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi</li> <li>6) Peningkatan Kapabilitas TI</li> </ol> |



| No.27           | Benefit Realization Ratio  |
|-----------------|--|
|                 | 7) Pengurangan Resiko  |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak ada penjelasan mengenai manfaat pengembangan TIK demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

#### D. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi Riau tidak ada penjelasan pada dokumen master plan mengenai tingkat urgensi pengembangan TIK demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

### E. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen master plan pada halaman 169 bagian 7.3 Roadmap Implementasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Telah menjelaskan dan melakukan penyusunan jadwal pengerjaan tiap pengembangan (Gambar 6.11)   |

| No       | ID                            | Aplikasi                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>A</b> | <b>MANAJEMEN PEMERINTAHAN</b> |                           |      |      |      |      |      |
| <b>1</b> | MPEM-001                      | SI Manajemen Kewilayahan  | v    |      |      |      |      |
| <b>2</b> | MPEM-002                      | SI Perencanaan & Anggaran | v    |      |      |      |      |
| <b>3</b> | MPEM-003                      | SI Pendapatan Daerah      |      | v    |      |      |      |

Gambar 6.11 penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan Prov Riau

Untuk data hasil analisis dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi lainnya terdapat pada bagian B Lampiran-Data Hasil Analisis

## 6.2. Perhitungan Tingkat Kesesuaian

Pada bagian ini menjelaskan mengenai perthitungan nilai pada analisis. berikut ini adalah hasil rekap nilai dari tiap tiap dokumen yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.

### 6.2.1. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau 2016-2020

Berikut ini adalah hasil rekapkan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

Table 6.2 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi Riau 2016-2020

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 1       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 0       | 28 | 3       |
| 1-B | 3       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 1       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 1       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 0       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 0       |    |         |
| 2-D | 0       | 16 | 2       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 1       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 1       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 3       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 4       | 22 | 0       |    |         |
| 5-C | 3       | 23 | 0       |    |         |
| 5-D | 0       | 24 | 4       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 4       |    |         |
| 6   | 2       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil Analisis statistika sebagai berikut:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Varian          | 2.21428571 |
| Standar Deviasi | 1.48804762 |
| Standar Error   | 0.22961073 |
| Nilai           | 1.07142857 |
| Nilai - Std     | -0.416619  |

Gambar 6.12 Hasil akhir perhitungan Provinsi Riau

Sehingga pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau 2016-2020 mendapatkan nilai **1.07**

### **6.2.2.Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Gorontalo 2009-2013**

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

Table 6.3 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi Gorontalo 2009-2013

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 1       | 8  | 0       | 28 | 3       |
| 1-B | 1       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 1       | 10 | 4       |    |         |
| 1-D | 2       | 11 | 0       |    |         |
| 2   | 2       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 2       | 14 | 4       |    |         |
| 2-C | 4       | 15 | 2       |    |         |
| 2-D | 2       | 16 | 1       |    |         |

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 2-E | 2       | 17 | 0       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 15  | 3       | 21 | 0       |    |         |
| 16  | 4       | 22 | 2       |    |         |
| 17  | 4       | 23 | 0       |    |         |
| 18  | 0       | 24 | 3       |    |         |
| 19  | 3       | 25 | 0       |    |         |
| 20  | 3       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil Analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 2.397213 |
| Standar Deviasi | 1.548293 |
| Standar Error   | 0.238907 |
| Nilai           | 1.571429 |
| Nilai - Std     | 0.023135 |

Gambar 6.13 Hasil akhir perhitungan Provinsi Gorontalo

Sehingga pada dokumen Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Gorontalo 2009-2013 mendapatkan nilai **1.57**

### 6.2.3. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karangasem 2010-2014

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya

Table 6.4 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Karang asem  
2010-2014

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 2       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 0       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 2       | 10 | 0       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 0       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 0       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 0       |    |         |
| 2-D | 0       | 16 | 1       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 0       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 0       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 3       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 4       | 22 | 0       |    |         |
| 5-C | 4       | 23 | 0       |    |         |
| 5-D | 3       | 24 | 3       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 4       |    |         |
| 6   | 2       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil Analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 2.116725 |
| Standar Deviasi | 1.454897 |
| Standar Error   | 0.224495 |
| Nilai           | 0.928571 |
| Nilai - Std     | -0.52633 |

Gambar 6.14 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Karangasem

Sehingga pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karangasem 2010-2014 mendapatkan nilai **0.93**

#### **6.2.4.Master Plan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar 2014-2019**

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya

Table 6.5 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Banjar 2014-2019

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 1       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 0       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 0       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 0       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 4       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 2       |    |         |

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 2-D | 0       | 16 | 1       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 0       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 2       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 4       | 36 | 0       |    |         |
| 5-C | 0       | 37 | 0       |    |         |
| 5-D | 0       | 38 | 3       |    |         |
| 5-E | 1       | 39 | 3       |    |         |
| 6   | 2       | 40 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 1.800813 |
| Standar Deviasi | 1.341944 |
| Standar Error   | 0.207066 |
| Nilai           | 0.833333 |
| Nilai - Std     | -0.50861 |

Gambar 6.15 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Banjar

Sehingga pada dokumen Master Plan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar 2014-2019 mendapat nilai **0.83**



### 6.2.5. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci 2014-2019

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya

Table 6.6 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Kerinci 2014-2019

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 0       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 2       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 0       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 1       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 4       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 1       |    |         |
| 2-D | 0       | 16 | 1       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 0       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 1       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 2       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 2       | 22 | 2       |    |         |
| 5-C | 1       | 23 | 0       |    |         |
| 5-D | 0       | 24 | 3       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 0       |    |         |
| 6   | 2       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 1.6777   |
| Standar Deviasi | 1.295261 |
| Standar Error   | 0.199863 |
| Nilai           | 0.928571 |
| Nilai - Std     | -0.36669 |

Gambar 6.16 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Kerinci

Sehingga pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci 2014-2019 mendapat nilai **0.93**

### 6.2.6.Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bogor 2014-2018

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya

Table 6.7 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kota Bogor 2014-2018

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 4       |
| 1-A | 0       | 8  | 4       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 1       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 2       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 1       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 3       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 0       |    |         |
| 2-D | 0       | 16 | 2       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 2       |    |         |

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 2-F | 0       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 0       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 4       | 22 | 0       |    |         |
| 5-C | 3       | 23 | 0       |    |         |
| 5-D | 3       | 24 | 5       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 0       |    |         |
| 6   | 2       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 2.588269 |
| Standar Deviasi | 1.295261 |
| Standar Error   | 1.138095 |
| Nilai           | 1.261905 |
| Nilai - Std     | -0.03336 |

Gambar 6.17 Hasil akhir perhitungan Kota Bogor

Sehingga pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bogor 2014-2018 mendapat nilai **1.26**

### 6.2.7. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019

Berikut ini adalah hasil rekapitan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

Table 6.8 Hasil nilai perangkat kesesuaian Provinsi NTB 2015-2019

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 1       | 8  | 1       | 28 | 3       |
| 1-B | 2       | 9  | 2       |    |         |
| 1-C | 2       | 10 | 2       |    |         |
| 1-D | 2       | 11 | 2       |    |         |
| 2   | 2       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 1       | 13 | 1       |    |         |
| 2-B | 2       | 14 | 1       |    |         |
| 2-C | 2       | 15 | 1       |    |         |
| 2-D | 2       | 16 | 2       |    |         |
| 2-E | 2       | 17 | 2       |    |         |
| 2-F | 2       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 1       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 1       |    |         |
| 5-A | 4       | 21 | 1       |    |         |
| 5-B | 3       | 22 | 1       |    |         |
| 5-C | 3       | 23 | 2       |    |         |
| 5-D | 1       | 24 | 3       |    |         |
| 5-E | 2       | 25 | 0       |    |         |
| 6   | 3       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 1.148084 |
| Standar Deviasi | 1.071487 |
| Standar Error   | 0.165334 |
| Nilai           | 1.785714 |
| Nilai - Std     | 0.714228 |

Gambar 6.18 Hasil akhir perhitungan Provinsi NTB

Sehingga pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 mendapat nilai **1.79**

### **6.2.8. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros 2016-2020**

Berikut ini adalah hasil rekapitan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

Table 6.9 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Maros 2016-2020

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 2       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 0       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 1       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 0       |    |         |
| 2   | 0       | 12 | 0       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 0       |    |         |
| 2-B | 0       | 14 | 1       |    |         |
| 2-C | 0       | 15 | 0       |    |         |
| 2-D | 0       | 16 | 1       |    |         |
| 2-E | 0       | 17 | 0       |    |         |
| 2-F | 0       | 18 | 2       |    |         |

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 3   | 0       | 19 | 0       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 0       |    |         |
| 5-A | 1       | 21 | 0       |    |         |
| 5-B | 2       | 22 | 0       |    |         |
| 5-C | 5       | 23 | 0       |    |         |
| 5-D | 1       | 24 | 3       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 0       |    |         |
| 6   | 2       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 1.733449 |
| Standar Deviasi | 1.316605 |
| Standar Error   | 0.203157 |
| Nilai           | 0.785714 |
| Nilai - Std     | -0.53089 |

Gambar 6.19 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Maros

Sehingga pada dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros 2016-2020 mendapat nilai **0.79**

### 6.2.9. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen 2016-2021

Berikut ini adalah hasil rekapan berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya.

Table 6.10 Hasil nilai perangkat kesesuaian Kabupaten Sragen  
2016-2012

| No  | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|-----|---------|----|---------|----|---------|
| 1   | 0       | 7  | 4       | 27 | 0       |
| 1-A | 0       | 8  | 1       | 28 | 3       |
| 1-B | 0       | 9  | 2       |    |         |
| 1-C | 0       | 10 | 2       |    |         |
| 1-D | 0       | 11 | 1       |    |         |
| 2   | 2       | 12 | 1       |    |         |
| 2-A | 0       | 13 | 1       |    |         |
| 2-B | 2       | 14 | 1       |    |         |
| 2-C | 2       | 15 | 1       |    |         |
| 2-D | 2       | 16 | 1       |    |         |
| 2-E | 2       | 17 | 2       |    |         |
| 2-F | 2       | 18 | 2       |    |         |
| 3   | 3       | 19 | 1       |    |         |
| 4   | 4       | 20 | 1       |    |         |
| 5-A | 1       | 21 | 1       |    |         |
| 5-B | 2       | 22 | 1       |    |         |
| 5-C | 2       | 23 | 1       |    |         |
| 5-D | 1       | 24 | 3       |    |         |
| 5-E | 1       | 25 | 0       |    |         |
| 6   | 0       | 26 | 0       |    |         |

Berdasarkan dari hasil nilai tabel diatas dapat diambil analisis statistika sebagai berikut:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Varian          | 1.154472 |
| Standar Deviasi | 1.074463 |
| Standar Error   | 0.165793 |
| Nilai           | 1.333333 |
| Nilai - Std     | 0.25887  |

Gambar 6.20 Hasil akhir perhitungan Kabupaten Sragen

Sehingga pada dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen 2016-2021 mendapat nilai **1.33**

### 6.3. Hasil Akhir Perhitungan

Pada bab sebelumnya telah dilakukan perhitungan untuk dokumen yang ada. berikut ini adalah rekap hasil akhir dari masing-masing dokumen.

Table 6.11 Rekap rata-rata hasil akhir perhitungan pada tiap dokumen

| No | Dokumen                                    | Nilai |
|----|--|-------|
| 1  | Master Plan Provinsi Riau 2016-2020        | 1.07  |
| 2  | Rencana Induk Provinsi Gorontalo 2009-2013 | 1.57  |
| 3  | Master Plan Kabupaten Karangasem 2010-2014 | 0.93  |
| 4  | Master Plan Kabupaten Banjar 2014-2019     | 0.83  |
| 5  | Master Plan Kabupaten Kerinci 2014-2019    | 0.93  |



| No | Dokumen  | Nilai       |
|----|--|-------------|
| 6  | Master Plan Kota Bogor 2014-2018                   | 1.26        |
| 7  | Master Plan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 | <b>1.79</b> |
| 8  | Rencana Induk Kabupaten Maros 2016-2020            | <b>0.79</b> |
| 9  | Rencana Induk Kabupaten Sragen 2016-2021           | 1.33        |

Terlihat pada tabel bahwa nilai tertinggi yaitu **1,79** pada dokumen Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 dan paling rendah adalah **0.79** yaitu Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros 2016-2020.

#### 6.4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya maka akan dijelaskan rekomendasi yang diberikan berdasarkan 5 komponen perencanaan terkait yang ada pada “Panduan Tata Kelola TIK Nasional tahun 2007”:

##### 1) Arsitektur Informasi

Pada bagian ini banyak dokumen master plan / dokumen rencana induk yang tidak menjelaskan dengan baik, apabila ada yang menjelaskan itu hanya mengambil materi dari panduan tata kelola TIK ataupun cetak biru (blueprint) sistem aplikasi *E-Government*. Berikut ini contoh bentuk penulisan dalam menjelaskan bagian arsitektur informasi dari tiap komponen-komponen yang ada.

- a) Model informasi terstruktur: Pertukaran Data
- b) Model informasi terstruktur: *Datamart*
- c) Model informasi terstruktur: *Database*

- d) Model informasi terstruktur: *Database table*
- e) Model informasi tidak terstruktur
- f) Matriks klasifikasi informasi: klasifikasi kelas data
- g) Matriks klasifikasi informasi: peta kepemilikan data
- h) Matriks klasifikasi informasi: data dictionary
- i) Matriks klasifikasi informasi: *syntax rules*
- j) Matriks klasifikasi informasi: klasifikasi level keamanan data

## 2) Arsitektur aplikasi

Pada bagian arsitektur aplikasi belum banyak penjelasan mengenai aplikasi eksisting maupun perencanaan terhadap aplikasi kedepan, apabila ada yang menjelaskan itupun hanya menjelaskan dengan melakukan pemetaan terhadap aktifitas pemerintahan. Berikut adalah rekomendasi terhadap arsitektur aplikasi

- a) Peta aplikasi

## 3) Arsitektur infrastruktur teknologi

Pada bagian ini kebanyakan dari dokumen hanya menjelaskan dengan teori penjelasan yang ada panduan tata kelola TIK dan cetak biru (*blueprint*) sistem aplikasi *E-Government*. Beberapa ada yang menjelaskan kondisi eksisting mereka akan tetapi tidak begitu detail. Berikut ini adalah rekomendasi terhadap arsitektur infrastruktur teknologi

- a) Cakupan infrastruktur teknologi: Jaringan Komunikasi (LAN, WAN, Jaringan Internet/Intranet)
- b) Cakupan infrastruktur teknologi: Perangkat Pemrosesan (*PC, Server, Workstation*)

- c) Cakupan infrastruktur teknologi: *software system* (Sistem Operasi, Database RDMBS, *Application Development, System Management*)
- d) Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data
- e) *Shared Service* (*Internet Service* (Koneksi Internet), *Email Service, File Service, Printing Service*)

4) Manajemen organisasi

Pada bagian ini seharusnya menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional, masih banyak dokumen yang belum menjelaskan mengenai prosedur yang ada. sebagian hanya menjelaskan materi mengenai manajemen organisasi yang ada pada panduan tata kelola TIK dan cetak biru (blueprint) sistem aplikasi *E-Government*. Berikut ini adalah rekomendasi dari bagian manajemen organisasi.

- a) Struktur Organisasi Pengelola
- b) Realiasi Sistem
- c) Pengoperasian Sistem
- d) Pemeliharaan Sistem

5) Pendekatan roadmap implementasi

Pada bagian ini seharusnya menjelaskan mengenai metode pengaturan pendaan dari tiap pengembangan TIK yang ada. Masih banyak pada dokumen yang belum membuat penjelasan mengenai detail biaya, rasio manfaat, dan profil investasi. Berikut ini adalah rekomendasi mengenai bagian pendekatan dan roadmap implementasi yang harus ada pada dokumen perencanaan pengembangan TIK.

- a) Paket pengembangan TIK
- b) Pendanaan pengembangan TIK

- c) *Benefit realization ratio*
- d) Pentahapan pengembangan

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menjelaskan terhadap hasil yang telah didapatkan berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pada tugas akhir ini, dan diikuti pemberian saran untuk perbaikan penelitian kedepannya

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kesesuaian dokumen perencanaan pengembang TIK pada instansi pemerintah terhadap panduan tata kelola TIK tahun 2007, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada dokumen Master Plan Provinsi Riau 2016-2020 belum sesuai karena mendapat nilai 1.07
- 2) Pada dokumen Rencana Induk Provinsi Gorontalo 2009-2013 belum sesuai karena mendapat nilai 1,57
- 3) Pada dokumen Master Plan Kabupaten Karangasem 2010-2014 belum sesuai karena mendapat nilai 0.93
- 4) Pada dokumen Master Plan Kabupaten Banjar 2014-2019 belum sesuai karena mendapat nilai 0.83
- 5) Pada dokumen Master Plan Kabupaten Kerinci 2014-2019 belum sesuai karena mendapat nilai 0.93
- 6) Pada dokumen Master Plan Kota Bogor 2014-2018 belum sesuai karena mendapat nilai 1.26
- 7) Pada dokumen Master Plan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 belum sesuai karena mendapat nilai 1.79
- 8) Pada dokumen Rencana Induk Kabupaten Maros 2016-2020 belum sesuai karena mendapat nilai 0.79

- 9) Rencana Induk Kabupaten Sragen 2016-2021 belum sesuai karena mendapat nilai 1.33
- 10) Rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki dokumen perencanaan pengembangan teknologi informasi agar bisa dikatakan sesuai dengan panduan tata kelola TIK nasional tahun 2007 telah dijelaskan pada bab VI hasil dan pembahasan pada bab 6.4 Rekomendasi.

## 7.2. Saran

Berdasarkan pengerjaan tugas akhir ini dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

### Bagi institusi pemerintah

1. Pemerintah sebaiknya dalam membuat dokumen *master plan*, perencanaan pengembangan maupun rencana induk TIK tidak hanya memarkan teori teori yang ada akan tetapi untuk bisa lebih menjelaskan kondisi eksisting dan perencanaan pengembangan. Hal ini agar mendukung terbentuknya *good governance* dan transparansi informasi terhadap publik
2. Kementrian Komunikasi dan Informasi bisa melakukan pembaharuan terhadap panduan tata kelola TIK agar bisa sesuai dengan beberapa kerangka kerja, peraturan pemerintah ataupun hal yang bisa berkaitan dengan dokumen *master plan*. karena versi 1 yang dipakai hingga saat ini dibentuk pada tahun 2007
3. Selain itu diperlukan *template* dalam pembuatan dokumen (apabila ingin membuat panduan versi selanjutnya) agar setiap dokumen pada pemerintah agar bisa sama atau paling tidak memiliki struktur, konten dan isi yang mirip. Karena pada proses pengerjaan setiap dokumen memiliki struktur yang berbeda, sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari panduan tata kelola TIK nasional

yaitu untuk menjadikan dokumen perencanaan bisa lebih harmonis, terintegrasi, dan sinkronasi yang kuat.

**Bagi penelitian selanjutnya**

1. Saran bagi penelitian selanjutnya apabila ingin melakukan pengerjaan tugas akhir serupa yaitu dengan cara membuat perangkat yang lebih detail disertai dengan pemberian bobot disetiap aspek pada 5 komponen perencanaan, dan menggunakan metode yang lain yang lebih detail sesuai dengan adanya perhitungan pembobotan untuk menentukan tingkat nilai kesesuaian.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk membuat perancangan panduan tata kelola TIK Nasional dengan menggunakan *framework*, peraturan yang terbaru.

*(Halalam ini sengaja dikosongkan)*



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemkominfo. Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.2007
- [2] Kemkominfo. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.2007
- [3] Kemkominfo. Rencana Induk TIK, 2013 [Online], Available:  
[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1321/Rencana+Induk+TIK/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1321/Rencana+Induk+TIK/0/berita_satker), (Accessed 29 November 2017).
- [4] Ward, John. and Joe Peppard. “Strategic Planning for Information System” 3nd ed, England: John Wiley & Sons,2002
- [5] Bahrawi, “Tata Kelola Perencanaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” *Jurnal Penelitian Komunikasi*, vol. 18, no. 1, 2015.
- [6] C. Lusiani, “Audit IT Governance Kabupaten Sleman,” *Jurnal Informatika Mulawarman (JIM)*, vol. 4, no. 2, pp. 38–48, 2009.
- [7] A. Amborowati, "Tinjauan Sebuah IT Master Plan (Studi kasus Master Plan Pemerintahan Daerah DKI Jakarta)," ed: Yogyakarta: STMIK AMIKOM., 2010.
- [8] A. N. Asyikin, R. Fitri, and A. S. B. Nugroho, “Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa.” 2016.
- [9] Master Plan *E-Government* Pemerintah Banjar Periode 2015-2019

- [10] Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi Gorontalo Periode 2009-2013
- [11] Perencanaan Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kota Bogor 2014-2018
- [12] Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kerinci 2014-2019
- [13] Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Periode 2016-2020
- [14] Master Plan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (*E-Government*) Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2014
- [15] Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020
- [16] Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2013
- [17] Kemkominfo. Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No: 248/PER/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tentang Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura
- [18] Kristanto, Titus & Sulistyowati, Sulistyowati & Lestari, Lefi Andri. Analisis Tingkat Kematangan *E-Government* Menggunakan Framework COBIT 5 (STUDI KASUS: Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya). 2016
- [19] Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Sragen Periode 2016-2021
- [20] Cengiz Hakan Aydin and Deniz Tasci, "Measuring Readiness for e-learning: Reflections from an Emerging Country," in *Educational Technology & Society*, Eskisehir, 2005, pp. 244-257.

[21] Widiastuti, Sri dan Indra Budi, “Analisis Pengukuran Tingkat Kesiapan Knowledge Management: Studi Kasus Pusat Pengolahan Data dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal”,2016.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## A LAMPIRAN – PERANCANGAN

Perancangan perangkat kesesuaian yang dibuat oleh penulis dengan melihat contoh pada ICT Pura, akan tetapi angka pada penilaian dan aspek penilaian berbeda dengan ICT Pura.

### I. Arsitektur Aplikasi

#### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan.                                     |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan 4 kategori konteks organisasi dan manajemen.                     |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.5                       | Efisiensi Menggunakan Window<br>Arsitektur Pendekatan One Stop Aplikasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, terdapat sekitar 1-2 aplikasi yang sudah diimplementasikan.  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, terdapat sekitar 3-4 aplikasi yang sudah diimplementasikan.  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdapat sekitar 5-6 aplikasi yang sudah diimplementasikan.  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows           | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

## II. Arsitektur Infrastruktur Teknologi

### C. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0                 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1                 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| <input type="checkbox"/> 2                 | Ada, terdapat sekitar 1-2 cakupan arsitektur infrastruktur   |
| <input type="checkbox"/> 3                 | Ada, terdapat sekitar 3 cakupan arsitektur infrastruktur   |
| <input type="checkbox"/> 4                 | Sudah lengkap, semua cakupan dijelaskan secara rinci   |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | 1) Jaringan Komunikasi<br>2) Perangkat Pemrosesan ( <i>Server</i> , <i>Workstation</i> , <i>Peripheral</i> lainnya)<br>3) <i>Software System</i> (Sistem Operasi, Database RDMBS)<br>4) Media Penyimpanan Data |
| Catatan                                    |  |

| <b>No.6-A</b>              | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>            |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, terdapat sekitar 1-2 jaringan komunikasi                                     |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdapat sekitar 3 jaringan komunikasi                                       |
| <input type="checkbox"/> 4 | Terdiri lebih dari 3 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci           |
| Jaringan Komunikasi        | 1) LAN<br>2) WAN<br>3) Internet<br>4) VOIP<br>dan lain lain.                      |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |



| <b>No.6-B</b>              | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>           |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, terdapat sekitar 1 perangkat pemrosesan                                      |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdapat sekitar 2 perangkat pemrosesan                                      |
| <input type="checkbox"/> 4 | Terdiri lebih dari 2 perangkat pemrosesan, telah dijelaskan secara rinci          |
| Perangkat Pemrosesan       | 1) Server<br>2) <i>Workstation</i><br>3) PC                                       |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

| No.6-C                     | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Software System  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, namun hanya mencakup 1 cakupan  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, namun hanya mencakup 2 cakupan  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, sudah lengkap terdapat semua cakupan dan dijelaskan secara rinci dan jelas,   |
| Software System            | 1) <i>Sistem Operasi</i><br>2) <i>Database RDMBS</i><br>3) <i>Application Development</i><br>4) <i>System Management</i> |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

| <b>No.6-D</b>              | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data</b> |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, namun hanya mencakup 1 cakupan   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, namun hanya mencakup 2 cakupan   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, sudah lengkap terdapat semua cakupan dan dijelaskan secara rinci dan jelas,    |
| Media Penyimpanan Data     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>      |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

**B. Shared Services**

| No.7                       | <i>Shared Services</i>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, sudah diimplementasikan 2-4 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, sudah lengkap terdapat semua layanan <i>shared services</i> dijelaskan dengan menggunakan tabel dan semacamnya  |
| Layanan Shared Services    | <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)<br><i>Email Service</i><br><i>File Service</i><br><i>Printing Service</i> |
| Bukti Pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

### III. Manajemen dan Organisasi

#### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8                       | Struktur organisasi pengelola   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                    |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, struktur organisasi pengelola TIK tergambar dengan baik                      |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut            |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, telah melakukan 1 aktivitas studi kelayakan  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah melakukan 2 aktivitas studi kelayakan  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah melakukan semua aktivitas studi kelayakan yang ada   |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan <i>benefit</i> (manfaat) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis resiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi ada tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada proses realisasi software aplikasi menggunakan metode SDLC dengan berjalan sesuai prosedur dengan memenuhi 1-3 kebutuhan   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada proses realisasi software aplikasi menggunakan metode SDLC dengan berjalan sesuai prosedur dengan memenuhi 4-5 kebutuhan   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada proses realisasi software aplikasi menggunakan metode SDLC dengan berjalan sesuai prosedur dengan memenuhi 6-8 kebutuhan   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> </ol> |

| No.10           | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|-----------------|---|
|                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing, system testing, integration testing,</i></li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |
| Bukti pendukung |   |
| Catatan         |   |



| No.11                      | Training & Transfer Pengetahuan Aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan                          |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, terdapat materi transfer pengetahuan dan training                            |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, terdapat sistem informasi transfer pengetahuan dan training                  |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

**III. Realiasi Infrastruktur Teknologi**

| <b>No.12</b>               | <b>Analisis Kebutuhan Kapasitas</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak Ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan                          |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Melakukan pertimbangan kapasitas infrastruktur teknologi                          |
| <input type="checkbox"/> 4 | Adanya prosedur untuk melakukan Analisis Kebutuhan Kapasitas                      |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

#### IV. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, prosedur minimal memperharitkan satu aspek tahapan  |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, prosedur minimal memperharitkan dua aspek tahapan   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, prosedur lengkap terdiri dari kesemua aspek tahapan dan dijelaskan secara detail setiap aspek   |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

## A. Pengoperasian Sistem

### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, SLA minimal harus memiliki 1 aspek kritikal yang harus terpenuhi   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, SLA minimal harus memiliki 2-3 aspek kritikal yang harus terpenuhi   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Setelah aspek kritikal SLA terpenuhi, harus ada prosedur mengenai update katalog TIK  |
| Aspek kritikal             | <p>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</p> <p>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</p> <p>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</p> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1                | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2                | Ada, paling tidak terdapat mencakup 1-2 aspek keamanan dan keberlangsungan sistem   |
| <input type="checkbox"/> 3                | Ada, paling tidak mencakup 3 aspek keamanan dan keberlangsungan sistem  |
| <input type="checkbox"/> 4                | Ada, mencakup keseluruhan aspek keamanan dan keberlangsungan sistem   |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           |   |
| Catatan                                   |   |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, paling tidak terdapat minimal 1 mekanisme sisi aplikasi   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah dilaksanakan 2 mekanisme sisi aplikasi  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dan telah melaksanakan semua mekanisme yang ada   |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul> |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

| <b>No.17</b>                           | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekanisme Pengamanan</b>  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0             | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1             | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktur teknologi   |
| <input type="checkbox"/> 2             | Ada, telah dilaksanakan 3-5 mekanisme sisi infrastruktur teknologi  |
| <input type="checkbox"/> 3             | Ada, prosedur proses <i>assesstment</i> keamanan sistem   |
| <input type="checkbox"/> 4             | Ada, penyusunan sistem dan pembuatan <i>IT contingency plan</i>   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardening</li> <li>• Firewall</li> <li>• IDS/IPS</li> <li>• Network Monitoring Tool</li> <li>• Log processor &amp; analysis</li> </ul> |
| Bukti pendukung                        |   |
| Catatan                                |   |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1                  | Tidak ada, akan tetapi ada tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2                  | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 3                  | Ada prosedur backup dan restore, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi  |
| <input type="checkbox"/> 4                  | Ada, dokumentasi setiap pengoperasian software aplikasi   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             |   |
| Catatan                                     |   |



#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi ada tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, prosedur <i>backup</i> data dari setiap software aplikasi, terutama software aplikasi kritikal |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada pengujian terhadap mekanisme <i>backup</i> dan <i>restore</i> data.                             |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, minimal terdapat prosedur yang memperhatikan jaminan atas kerahasiaan dan penyalahgunaan data organisasi   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Adanya prosedur untuk menjamin keberlangsungan layanan dalam ketentuan operasi sistem   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Adanya prosedur pelaporan oleh pihak ketiga terhadap tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem  |
| Ketentuan operasi system   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ul> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

## D. Pemeliharaan Sistem

### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                       |
| <input type="checkbox"/> 2 | Manajemen TIK memiliki prosedur mekanisme terhadap <i>patching</i> software aplikasi |
| <input type="checkbox"/> 3 | Adanya prosedur <i>regression test</i> terhadap update aplikasi yang telah dilakukan |
| <input type="checkbox"/> 4 | Adanya prosedur terhadap pembaharuan dokumentasi pada modul yang telah diupgrade     |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0              | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1              | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2              | Manajemen TIK memiliki prosedur mekanisme terhadap <i>patching</i> infrastruktur teknologi  |
| <input type="checkbox"/> 3              | Terdapat penilain pertumbuhan kapasitas terhadap estimasi pertumbuhan   |
| <input type="checkbox"/> 4              | Manajemen TIK menyusun pengelolaan kapasitas jangka menengah dan pendek   |
| <i>Patching</i> infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server |
| Bukti pendukung                         |   |
| Catatan                                 |   |

**III. Pemeliharaan Data**

| <b>No.23</b>               | <b>Prosedur Teknis Pemeliharaan Data</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan                     |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, prosedur pemeliharaan data untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, prosedur pengelolaan terhadap hak akses pengguna                                   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, prosedur pengelolaan terhadap DRC / Data Center                                    |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, prosedur mengenai implementasi terhadap fase siklus hidup yang ada   |
| <input type="checkbox"/> 4 | Adanya prosedur untuk likuidasi sumberdaya infrastruktur melalui pertemuan Komite TIK   |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul> |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

#### IV. Pendekatan Roadmap Implementasi

##### A. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan                 |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada                                  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Setiap pengembangan TIK yang ada dijadikan satu kelompok dan diberi kode penjelasan |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

**B. Pendaanaan Pengembangan TIK**

| <b>No.26</b>               | <b>Pendanaan Pengembangan TIK</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan               |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list pendanaan berdasarkan paket pengembangan yang ada                    |
| <input type="checkbox"/> 4 | Setiap pendanaan dikategorikan berdasarkan total biaya yang dihabiskan            |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |



**C. Benefit Realization Ratio**

| <b>No.27</b>               | <b>Benefit Realization Ratio</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah melakukan pembuatan kategory manfaat dari tiap paket pengembangan, dimana ada sekitar 7 jenis manfaat dari pengembangan TIK  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah melakukan pengukuran berdasarkan pada kategori manfaat paket pengembangan TIK.   |
| Manfaat pengembangan TIK   | 1) Peningkatan Pendapatan<br>2) Pengurangan biaya<br>3) Efisiensi proses kerja<br>4) Peningkatan Pelayanan<br>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi<br>6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

**D. Urgensitas Pengembangan TIK**

| <b>No.28</b>               | <b>Urgensitas Pengembangan TIK</b>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan                            |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007              |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah melakukan pembuatan tingkat urgensitas dari tiap daftar paket pengembangan TIK      |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah melakukan pengukuran tingkat urgensitas terhadap tiap daftar paket pengembangan TIK |
| Bukti pendukung            |  |
| Catatan                    |  |

**E. Pentahapan Pengembangan**

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, telah melakukan penggabungan indikasi biaya, manfaat dan urgensitas, dijelaskan dalam bentuk tabel ataupun diagram |
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan  |
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, pembuatan profil investasi berdasarkan jadwal pelaksanaan pengerjaan   |
| Bukti pendukung            |   |
| Catatan                    |   |

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## B LAMPIRAN - DATA HASIL ANALISIS

Merupakan hasil dari analisis mengenai kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan TIK dengan panduan tata kelola TIK nasional 2007

### 1. Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Gorontalo 2009-2013

#### 1.1. Arsitektur Informasi

##### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173 menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (data mart, database, database tabel, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dsb). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai <i>Datamart</i> yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo |

| <b>No.1-A</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/>Pertukaran Data</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                           | Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur ( <i>datamart</i> , <i>database</i> , <i>database</i> tabel, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dsb). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai pertukaran data yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo |

| <b>No.1-B</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Datamart</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> </ol> |

| <b>No.1-B</b> | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Datamart</i></b>  |
|---------------|---|
|               | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan       | Pada halaman menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (data mart, database, database tabel, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dsb). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai <i>Datamart</i> yang ada pada pemerintah provinsi gorontalo |

| <b>No.1-C</b>              | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung            | 1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (data mart, database, database tabel, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dsb). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai <i>Database</i> yang ada pada pemerintah provinsi gorontalo |

| No.1-D                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Database table</i>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | <p>Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (<i>datamart</i>, <i>database</i>, <i>database tabel</i>, pertukaran data) dan informasi tidak terstruktur (gambar, video, file dokumen, dsb). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai <i>database table</i> yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo</p> |

## B. Informasi Tidak Terstruktur

| No.2                              | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2        | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Model informasi tidak terstruktur | <p>Gambar, video, file dokumen</p> <p>Penjelasan model informasi tidak terstruktur: (isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)</p> |



| No.2            | Adanya model informasi tidak terstruktur  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>           |
| Catatan         | <p>Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Arsitektur informasi mencakup informasi terstruktur (<i>datamart, database, database tabel, pertukaran data</i>) dan informasi tidak terstruktur (<i>gambar, video, file dokumen, dsb</i>). akan tetapi tidak menjelaskan mengenai informasi tidak terstruktur yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo</p> |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary, syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> </ol> |

| No.3    | Matriks klasifikasi informasi   |
|---------|---|
|         | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan | Pada halaman 173 menjelaskan “Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian data <i>dictionary</i> dan <i>syntax rules</i> )” akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai klasifikasi informasi |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                                      |
| Catatan                    | Dokumen halaman 173 menjelaskan menjelaskan bahwa “Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian data <i>dictionary</i> dan <i>syntax rules</i> )” akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data |

| No.3-B          | Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data  |  |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |
|-----------------|---|--|-------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------|---|--|--|
| <div>□ 4</div>  | Ada, menjelaskan peta kepemilikan data dengan menggunakan tabel/diagram   |  |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |
| Bukti pendukung | <div><div>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</div><div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div></div>   |  |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |
| Catatan         | <p>Pada halaman 173 dokumen menjelaskan bahwa “Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian <i>data dictionary</i> dan <i>syntax rules</i>)” Dan kepemilikan data dijelaskan pada sub bab 3.4.2 Kepemilikan Data di Tiap SKPD halaman 175 dan dengan penjelasan dengan pembuatan tabel 3.15 Kepemilikan Data di Tiap SKPD Berikut ini adalah contoh cuplikan tabel 3.15 (Gambar 6.21) yang ada pada dokumen perencanaan Provinsi Gorontalo 2009-2013.</p> <table><tr><th>NO</th><th>NAMA SATUAN KERJA</th><th>Data dan Kepemilikan</th></tr><tr><td>1</td><td>BADAN INVESTASI DAERAH (BID)</td><td>- Data Investasi</td></tr><tr><td>2</td><td>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH (BKPAD)</td><td>- Pengadaan PNS<br/>- Absensi dan penggajian<br/>- Penilaian Kerja PNS<br/>- Pendidikan dan latihan</td></tr></table> <p>Gambar 6.21 Contoh peta kepemilikan data Provinsi Gorontalo</p> | NO   | NAMA SATUAN KERJA | Data dan Kepemilikan | 1 | BADAN INVESTASI DAERAH (BID) | - Data Investasi | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH (BKPAD) | - Pengadaan PNS<br>- Absensi dan penggajian<br>- Penilaian Kerja PNS<br>- Pendidikan dan latihan |
| NO              | NAMA SATUAN KERJA   | Data dan Kepemilikan   |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |
| 1               | BADAN INVESTASI DAERAH (BID)  | - Data Investasi   |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |
| 2               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH (BKPAD)  | - Pengadaan PNS<br>- Absensi dan penggajian<br>- Penilaian Kerja PNS<br>- Pendidikan dan latihan |                   |                      |   |                              |                  |   |  |  |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                                    |
| Catatan                           | Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian data dictionary dan syntax rules)” Akan tetapi tidak ditemukan penjelasan bagaimana penggambaran data dictionary yang ada |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian 3.4.1 Arsitektur Informasi pada Dokumen Perencanaan Pengembangan Provinsi Gorontalo 2009-2013 halaman 173</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                           | Pada halaman 173 menjelaskan bahwa “Penetapan arsitektur informasi mencakup penetapan klasifikasi ke dalam kelas-kelas data, pemetaan kepemilikan data, dan pendefinisian <i>data dictionary</i> dan <i>syntax rules</i> )” Akan tetapi tidak ditemukan penjelasan bagaimana penggambaran <i>syntax rule</i> yang ada |

| <b>No.3-E</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai klasifikasi <i>level</i> keamanan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

## 1.2.Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta aplikasi dijelaskan pada dokumen perencanaan provinsi Gorontalo 2009-2013 pada halaman 102 dengan sub-bab 3.3.2.2 Peta Solusi Aplikasi <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| Catatan                    | <p>3.3.2.2 Peta Solusi Aplikasi <i>E-Government</i> menjelaskan</p> <p>Selain itu pada sub-bab tersebut pada halaman 103 juga menjelaskan bahwa aplikasi akan dikelompokkan menjadi 3.</p> <p>Selanjutnya pada halaman 104 pada bagian 3.3.2.4 Properti Blok Fungsi dan Modul menjelaskan mengenai kerangka fungsi pemerintahan.</p>  |

**No.4****Peta Aplikasi**

Berikut adalah contoh blok fungsi dan modul pada dokumen provinsi Gorontalo

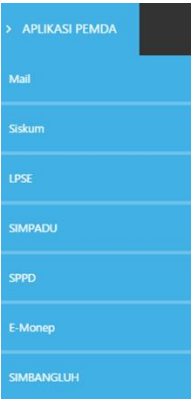
|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Blok Fungsi</b>     | <b>7. DINAS DAN LEMBAGA</b>  |
| <b>Sub-Blok Fungsi</b> | <b>7.1. KEPERMERINTAHAN</b>  |
| <b>Modul</b>           | 7.1.1.1. Pengelolaan Barang Daerah<br>7.1.1.2. Katalog Barang Daerah<br>7.1.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>7.1.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah |

**Gambar 6.22 Contoh blok fungsi pada modul Prov Gorontalo**

**3.3.3.1.1 MODUL SISTEM KEPENDUDUKAN**

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| <b>Modul</b>           | KEPENDUDUKAN  |  |  |
| <b>Blok Fungsi</b>     | PELAYANAN   |  |  |
| <b>Sub Blok Fungsi</b> | .....   |  |  |
| <b>Klasifikasi</b>     | Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office<br>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi<br><input type="checkbox"/> Transaksi Data<br><input type="checkbox"/> Administrasi<br>Fungsi Aplikasi <input checked="" type="checkbox"/> Generik<br>Obyek Layanan <input type="checkbox"/> G2G | <input checked="" type="checkbox"/> Back Office<br><input checked="" type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan<br><input type="checkbox"/> Pembayaran<br><input type="checkbox"/> Basis Data <input type="checkbox"/> Lainnya<br><input type="checkbox"/> Spesifik<br><input type="checkbox"/> G2B <input checked="" type="checkbox"/> G2C |  |
| <b>Fungsi</b>          | - Pelaporan Rekapitulasi data kependudukan  |  |  |

**Gambar 6.23 Contoh modul pemerintahan**

| No.5                       | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, sudah lengkap terdiri lebih dari 4 aplikasi.   |
| One Stop Windows           | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada website provinsi Gorontalo <a href="https://gorontaloprov.go.id/">https://gorontaloprov.go.id/</a> terdapat banyak aplikasi.</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li></ol>  |
| Catatan                    | <p>Salah satu contoh aplikasi pada <a href="https://gorontaloprov.go.id/">https://gorontaloprov.go.id/</a> adalah</p> <div data-bbox="506 804 696 1204"></div> <p>Gambar 6.24 List aplikasi Provinsi Gorontalo</p> <p>Kita ambil contoh pada aplikasi Mail.</p> <p>Pada dokumen perencanaan provinsi Gorontalo juga menjelaskan aplikasi tersebut namun dalam penjelasan tiap modul pemerintahan.</p> |



**No.5****Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window**

Berikut penjelasan mengenai padaa bagian 3.3.3.2.1 Modul Surat Elektronik halaman 113

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Modul       | SURAT ELEKTRONIK   |  |  |
| Blok        | ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT  |  |  |
| Fungsi      |  |  |  |
| Sub Blok    |  |  |  |
| Fungsi      |  |  |  |
| Klasifikasi | Jenis Layanan <input checked="" type="checkbox"/> Front Office <input type="checkbox"/> Back Office<br>Layanan Utama <input type="checkbox"/> Publikasi Informasi <input type="checkbox"/> Pendaftaran & Perijinan<br><input type="checkbox"/> Transaksi Data <input type="checkbox"/> Pembayaran<br><input checked="" type="checkbox"/> Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Basis Data <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya<br>Fungsi Aplikasi <input type="checkbox"/> Generik <input checked="" type="checkbox"/> Spesifik<br>Obyek Layanan <input checked="" type="checkbox"/> G2G <input type="checkbox"/> G2B <input type="checkbox"/> G2C |  |  |

|            |  |
|------------|--|
| Fungsi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.</li> <li>- Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.</li> <li>- Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lainlain.</li> </ul> |
| Narasi     | Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa memakan waktu lama dan sehari-hari. Dengan sistem elektronik , maka proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan   |
| Organisasi | - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Provinsi Gorontalo  |
| Integrasi  | --   |
| Info       | - Nama alias: e-Mail, SIM Surat  |
| Tambahan   | - Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan provinsi, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.  |

Gambar 6.25 Contoh penjelasan aplikasi provinsi gorontalo

Hanya mengambil satu contoh saja karena pada dasarnya dokumen dibuat pada tahun 2009-2013 sehingga pada masa sekarang banyak aplikasi yang sudah diupdate ataupun berubah nama dan fungsionalitas

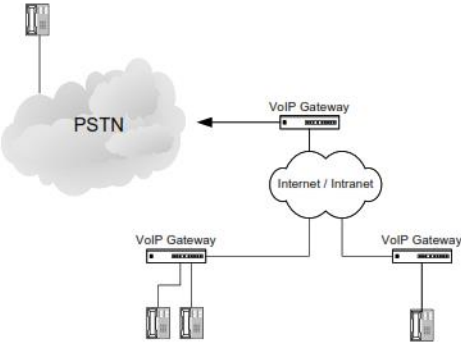
### 1.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 3                 | Ada, terdapat sekitar 3 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | 1) Jaringan Komunikasi<br>2) Perangkat Pemrosesan ( <i>Server, Workstation</i> , Peripheral lainnya)<br>3) <i>Software System</i> (Sistem Operasi, Database RDMBS)<br>4) Media Penyimpanan Data |
| Catatan                                    | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)              |

| No.6-A                     | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi         |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Terdiri lebih dari 2 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci |
| Jaringan Komunikasi        | 1) LAN<br>2) WAN<br>3) Internet   |

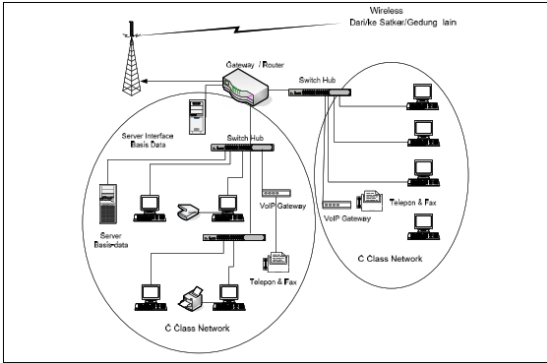
| No.6-A          | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi  |                               |   |                 |     |    |                              |                               |   |
|-----------------|--|-------------------------------|---|-----------------|-----|----|------------------------------|-------------------------------|---|
|                 | 4) VOIP dan lain lain.   |                               |   |                 |     |    |                              |                               |   |
| Bukti pendukung | <div>1. Dokumen bab 2.2.1.3 Infrastruktur Jaringan</div> <div>2. Dokumen bab 3.2 cetak biru infrastruktur jaringan</div> <div>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</div> <div>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div>  |                               |   |                 |     |    |                              |                               |   |
| Catatan         | <div>Jaringan Komunikasi</div> <div>-Jaringan Internet</div> <div>Contoh dari penggunaan jaringan internet di provinsi Gorontalo</div> <div><table><tr><th>No.</th><th>NAMA SKPD</th><th>Titik Koordinat</th><th>ISP</th></tr><tr><td>1.</td><td>BADAN INVESTASI DAERAH (BID)</td><td>0°33'4.82"N<br/>123° 3'39.83"E</td><td>Olami.net,<br/>4 client (titik) sambungan internet</td></tr></table></div> <div>Gambar 6.26 Tabel penggunaan ISP di Gorontalo</div> <div>-Jaringan VoiP</div> <div>Contoh penggambaran topologi jaringan VoiP</div> | No.                           | NAMA SKPD   | Titik Koordinat | ISP | 1. | BADAN INVESTASI DAERAH (BID) | 0°33'4.82"N<br>123° 3'39.83"E | Olami.net,<br>4 client (titik) sambungan internet |
| No.             | NAMA SKPD  | Titik Koordinat               | ISP   |                 |     |    |                              |                               |   |
| 1.              | BADAN INVESTASI DAERAH (BID)   | 0°33'4.82"N<br>123° 3'39.83"E | Olami.net,<br>4 client (titik) sambungan internet |                 |     |    |                              |                               |   |



Gambar 6.27 Topologi jaringan VoiP  
Gorontalo

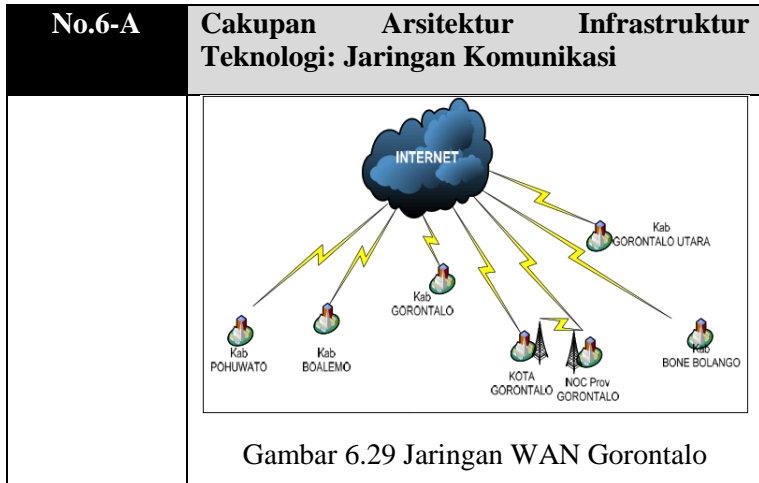
-Jaringan LAN

Contoh gambar struktur jaringan LAN





Gambar 6.28 Topologi LAN Prov Gorontalo

- Jaringan WAN



| No.6-B               | Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br>Teknologi: Perangkat Pemrosesan   |
|----------------------|---|
| □ 4                  | Terdiri lebih dari 2 perangkat pemrosesan, telah dijelaskan secara rinci  |
| Perangkat Pemrosesan | 1) Server<br>2) Workstation<br>3) PC  |
| Bukti pendukung      | 1. Dokumen bab 2.2.1.3 Infrastruktur Jaringan<br>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p><b>No.6-B</b></p> | <p><b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b></p>   |
|                      | <p>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</p>   |
| <p>Catatan</p>       | <p>Pada dokumen tidak dijelaskan mengenai apakah gorontalo memiliki pc dan workstation .karena tidak ada keterangan spesifik mengenai hal tersebut akan tetapi terdapat foto mengenai ruang data yang berisi server dan PC</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Ruang Data (NOC - Network Operation Center)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi di Kantor Gubernur (Ruang Data)</li> <li>• Tidak tertata sebagaimana umumnya.</li> <li>• Terdapat lima buah Server :             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Server Router Proxy</li> <li>– Server Web I</li> <li>– Server Web II</li> <li>– Server Email</li> <li>– Server VoIP</li> </ul> </li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <hr/> <p style="text-align: center;">Gambar 2.12 Ruang Server (Data)</p> |
|                      | <p>Gambar 6.30 Ruang data Provinsi Gorontalo</p>   |

| No.6-C          | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Software System  |
|-----------------|--|
| □ 0             | Tidak ada  |
| Software System | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) <i>Application Development</i></li> <li>4) <i>System Management</i></li> </ol>   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>      |
| Catatan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri menjelaskan bahwa adanya penggunaan sistem basis data</li> <li>2. Seharusnya dokumen memiliki penjelasan mengenai sistem basis data demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007.</li> </ol> |

| No.6-D                 | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data  |
|------------------------|---|
| □ 3                    | Ada, namun hanya mencakup 2 cakupan   |
| Media Penyimpanan Data | <ul style="list-style-type: none"><li>• DRC</li><li>• Data Center</li></ul>   |
| Bukti pendukung        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen pada bab 3.2.2.2 mengenai NOC dan Data Center halaman 80</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li></ol> |
| Catatan                | <p>Pada dokumen menjelaskan mengenai topologi Data Center di provinsi Gorontalo</p> <div data-bbox="333 837 848 1262"></div> <p>Gambar 6.31 Topologi Data Center Provinsi Gorontalo</p>                       |



| No.6-D | Cakupan <b>Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data</b> |
|--------|---|
|        | Mengenai DRC, Gorontalo sedang dalam masa perencanaan pembangunan hal tersebut      |

## B. Shared Services

| No.7                       | Shared Services  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, sudah diimplementasikan 2-4 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul>   |
| Bukti Pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen <i>master plan</i> Gorontalo halaman 21</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan menteri pendayaan aparatur negara Nomor 13/Kep/M. Pan/1/2003</li> <li>4. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013</li> </ol> |
| Catatan                    | Halaman 21 menjelaskan mengenai koneksi internet yang ada pada SKPD di Gorontalo   |

No.7

Shared Services

| No. | NAMA SKPD                    | TIK Koordinat                 | ISP   | IP ADDRESS                                | KETERANGAN                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| 1.  | BADAN INVESTASI DAERAH (BID) | 0°33'4.82"N<br>123° 3'39.83"E | Olaia.net,<br>4 client (tik) sambungan internet | Wireless Badan Keuangan,<br>192.168.17.69 | 1 client = 64 kbps<br>1:10 |

Gambar 6.32 Contoh koneksi internet

Untuk layanan *email service* dijelaskan melalui adanya *server email* pada NOC dan data center

1.4. Manajemen dan Organisasi

A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8                     |   | Struktur organisasi pengelola  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 4 | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut   |  |
| Bukti pendukung          |   | <div>1. Pada dokumen halaman 14 bab 2.2.1.2 kelembagaan dan organisasi TIK</div> <div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div> <div>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div> |  |
| Catatan                  |   | Struktur Organisasi TIK  |  |

No.8

Struktur organisasi pengelola

```

graph TD
    ITManager[IT Manager] --> Security[SECURITY & QA  
Security Admin,  
QA Manager]
    ITManager --> Application[APPLICATION  
Application Support  
Manager]
    ITManager --> TechSupport[TECH. SUPPORT  
Tech. Supp. Mgr]
    ITManager --> Data[DATA  
Data Manager,  
Database Admin]
    ITManager --> Operation[OPERATION  
Operation Mgr]
    Application --> SystemAnalyst1[System Analyst  
Programmer]
    TechSupport --> NetworkAdmin[Network Admin  
System Admin]
    Data --> SystemAnalyst2[System Analyst  
System Programmer]
    Operation --> Librarian[Librarian  
Operator/User]
  
```

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengelola TIK

## Gambar 6.33 Gambar Struktur Organisasi TIK Prov Gorontalo

Berikut salah satu contoh penjelasan.

| Database Administrator   |
|--|
| <b>Uraian :</b> Database Administrator bertanggung jawab terhadap perawatan sistem basis data dan integritasnya  |
| <b>Tugas Pokok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rancangan basis data dan data definition</li> <li>• Ikut mengamankan basis data</li> <li>• Melakukan perawatan data</li> <li>• Memonitor pengguna basis data, statistic kinerja, dan melakukan performance tuning</li> <li>• Ikut dalam penentuan dan prosedur back up and recovery dan implementasinya</li> <li>• Membantu programmers terutama data dan strukturnya</li> </ul>               |
| <b>Produk Pokok</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rancang basis data</li> <li>• Dokumen prosedur backup dan recovery</li> </ul>   |
| <b>Kompetensi Teknis TIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dasar TIK (<i>basic IT literacy skills</i>)</li> <li>• Pemahaman terhadap Prinsip dasar sistem informasi</li> <li>• Kemampuan dasar teknis perangkat keras, jaringan dan sekuriti TIK</li> <li>• Kemampuan membuat rancangan basis data dan data definition</li> <li>• Kemampuan manajemen data</li> <li>• Kemampuan dan pemahaman terhadap <i>back up and recovery</i></li> </ul> |

## Gambar 6.34 Tabel Tupoksi Jabatan Provinsi Gorontalo

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (<i>benefit</i>) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen rancangan induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai Prosedur identifikasi dan pemilihan alternatif sistem demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007                   |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal <i>software</i> aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam <i>software</i> aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> </ol> |

| <b>No.10</b>    | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>  |
|-----------------|---|
|                 | 8. Instalasi dan akreditasi   |
| Bukti pendukung | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai Prosedur realisasi <i>software</i> aplikasi: prosedur metode SDLC demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.11</b>               | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, terdapat sistem informasi transfer pengetahuan dan training   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 136 bagian 3.3.3.6.4</li> <li>2. Dokumen halaman 94 bagian 3.2.4</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | <p>Sisi non-5 komponen perencanaan</p> <p>Pada halaman 136 pada bagian 3.3.3.6.4 Modul Sistem Pendidikan dan Latihan menjelaskan</p>   |

| No.11 | Training & Transfer Pengetahuan Aplikasi   |
|-------|--|
|       | <p>adanya aplikasi bernama SIMDIKLAT yang memiliki fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai. Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>▪ Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT.</li> <li>▪ Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan online berbasis Komputer</li> </ul> <p>Sisi 5 komponen perencanaan</p> <p>Pada dokumen halaman 94 terdapat bagian 3.2.4 yaitu Pedoman Implementasi. Hal ini merupakan salah satu training/transfer pengetahuan yang tertuang pada dokumen. Pedoman Implementasi pada dokumen ini menjelaskan bagaimana infrastruktur jaringan yang ada pada provinsi Gorontalo</p> |

| No.12                      | Analisis Kebutuhan Kapasitas  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai analisis kebutuhan kapasitas. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |



| No.13   | Proedur Pengelolaan Data  |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen rancangan induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan data demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### D. Pengoperasian Sistem

##### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek kritikal             | a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.<br><br>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.<br><br>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan. |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen rancangan induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan  |

| No.14 | Manajemen Tingkat Layanan                               |
|-------|---|
|       | tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 4                | Ada, mencakup keseluruhan aspek keamanan dan keberlangsungan sistem   |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijelaskan pada halaman 86 pada bab 3.2.3.1 Aspek keamanan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                                   | <p>Dijelaskan mengenai aspek keamanan pada dokumen yaitu</p> <p>dimana aspek keamanan terdiri dari</p> <p>A. <i>Privacy / Confidentiality</i></p>   |

| No.15 | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|-------|---|
|       | <p><i>B. Integrity</i></p> <p><i>C. Authentication</i></p> <p><i>D. Availability</i></p> <p><i>E. Non-repudiation</i></p> <p><i>F. Access control</i></p> <p>Dimana sudah sama dengan yang di maksudkan oleh panduan umum tata kelola TIK</p> |

| No.16                   | Sisi pengamanan aplikasi   |
|-------------------------|--|
| □ 2                     | Ada, paling tidak terdapat minimal 1 mekanisme sisi aplikasi   |
| Mekanisme sisi aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul> |
| Bukti pendukung         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 92</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |

| No.16   | Sisi pengamanan aplikasi  |
|---------|---|
| Catatan | Mekanisme yang digunakan dengan implemetasi otentikasi dan otorisasi misal dijelaskan pada halaman 92 bahwa setiap mengakses aplikasi menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> . |

| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi:<br>Mekasisme Pengamanan   |
|--|--|
| □ 1                                    | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktr teknologi   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hardening</i></li> <li>• <i>Firewall</i></li> <li>• <i>IDS/IPS</i></li> <li>• <i>Network Monitoring Tool</i></li> <li>• <i>Log processor &amp; analysis</i></li> </ul> |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijelaskan pada halaman 89 dan 91</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                                  |
| Catatan                                | Bahwa pengamanan masalah infrastruktur menggunakan IDS selain itu menjelaskan bahwa adanya penggunaan <i>firewall</i> sebagai salah satu sisi pengamanan   |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | Tidak ada   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual pengguna, Operasi, Dukungan teknis dan administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi <i>training</i> untuk <i>software</i> aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                     | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai Prosedur manajemen software aplikasi demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007                                    |

### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| Bukti pendukung            | 1. Pada halaman 91 dan 96 bagian bahwa ada prosedur backup data maupun database   |

| No.19   | Manajemen Data  |
|---------|---|
|         | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan | Pada dokumen ada penjelasan bahwa data harus dibackup akan tetapi untuk penjelasan mengenai bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan tidak ada. |

## V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi system   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ul>                   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai prosedur kebijakan pengelolaan pihak ketiga demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## E. Pemeliharaan Sistem

### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan software aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0              | Tidak ada   |
| <i>Patching</i> infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server |
| Bukti pendukung                         | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                 | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan                      |

| No.22 | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|-------|---|
|       | infrastruktur teknologi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### III. Pemeliharaan Data

| No.23           | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, prosedur pemeliharaan data untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijelaskan pada bagian 3.2.3.1 pada bagian aspek keamanan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Seharusnya ada prosedur pemeliharaan data demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |



#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>          |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Seharusnya ada prosedur terhadap siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 1.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

#### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada  |
| Bukti pendukung            | 1. Pada hal 200 pada tabel 4.1 Tahap pengembangan <i>E-Government</i> telah membuat list pengembangan |

| No.25   | Paket Pengembangan TIK   |
|---------|--|
|         | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br><br>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003) |
| Catatan | Pada dokumen pengembangan tik dikelompokkan menjadi beberapa paket yaitu kebijakan & dana, SDM, Infrastruktur jaringan, aplikasi, data & informasi.                                    |

## 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br><br>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)  |
| Catatan                    | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3. Benefit Realization Ratio

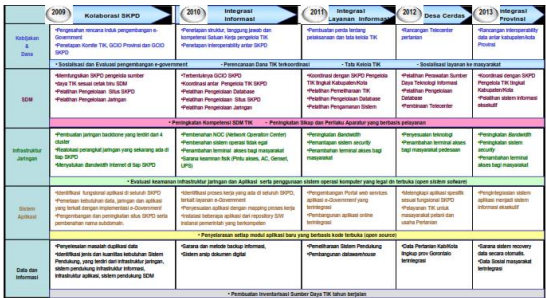
| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | 1) Peningkatan Pendapatan<br>2) Pengurangan biaya<br>3) Efisiensi proses kerja<br>4) Peningkatan Pelayanan<br>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi<br>6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko   |
| Bukti pendukung            | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)  |
| Catatan                    | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realizatioan ratio</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

**4. Urgensitas Pengembangan TIK**

| <b>No.28</b>                      | <b>Urgensitas Pengembangan TIK</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen rencana induk pengembangan provinsi Gorontalo tidak ada penjelasan mengenai urgensi pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

**5. Pentahapan Pengembangan**

| <b>No.29</b>                      | <b>Pentahapan Pengembangan</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>3</b> | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan |
| Bukti pendukung                   | 1. Dokumen bab 4 halaman 196   |

| No.29   | Pentahapan Pengembangan  |
|---------|--|
|         | <p>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</p> <p>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</p>  |
| Catatan | <p>Pada dokumen telah menjelaskan mengenai penyusunan jadwal yang akan mereka kembangkan pada beberapa tahun. dijelaskan pada gambar tahapan pengembangan <i>E-Government</i> provinsi gorontalo 2009-2013</p>  <p><b>2009 Kebijakan &amp; Data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja pengembangan <i>E-Government</i></li> <li>Penyusunan Komite TK, GCD Provinsi dan GCD DPRD</li> <li><b>Kelembagaan dan Sistem pemerintahan <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat DPRD sebagai sumber daya TK untuk unit TK, EDM</li> <li>Penyusunan Organisasi Baku DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2010 Integrasi Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan standar pengembangan dan kepatuhan (standar kerja proyek TK, Penyusunan dan integrasi antar DPRD)</li> <li><b>Penyusunan Data TK <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat GCD DPRD</li> <li>Koordinasi antar Provinsi TK DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2011 Integrasi Layanan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan sistem layanan pelayanan dan unit kerja TK</li> <li><b>Tanpa Jarak TK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan DPRD Provinsi</li> <li>TK tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Penyusunan Organisasi TK</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2012 Data Center</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Timorasi jaringan</li> <li><b>Analisis Sistem <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan DPRD Provinsi TK tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2013 Integrasi Persebaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja pengembangan dan kepatuhan (standar kerja proyek TK, Penyusunan dan integrasi antar DPRD)</li> <li><b>Kelembagaan dan Sistem pemerintahan <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat DPRD sebagai sumber daya TK untuk unit TK, EDM</li> <li>Penyusunan Organisasi Baku DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Kelembagaan dan Sistem pemerintahan <i>e-government</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat DPRD sebagai sumber daya TK untuk unit TK, EDM</li> <li>Penyusunan Organisasi Baku DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> <p><b>Integrasi Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan standar pengembangan dan kepatuhan (standar kerja proyek TK, Penyusunan dan integrasi antar DPRD)</li> <li><b>Penyusunan Data TK <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat GCD DPRD</li> <li>Koordinasi antar Provinsi TK DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Integrasi Layanan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan sistem layanan pelayanan dan unit kerja TK</li> <li><b>Tanpa Jarak TK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan DPRD Provinsi</li> <li>TK tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Penyusunan Organisasi TK</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Data Center</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Timorasi jaringan</li> <li><b>Analisis Sistem <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan DPRD Provinsi TK tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Penyusunan Organisasi TK</li> <li>Penyusunan Organisasi Database</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Integrasi Persebaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja pengembangan dan kepatuhan (standar kerja proyek TK, Penyusunan dan integrasi antar DPRD)</li> <li><b>Kelembagaan dan Sistem pemerintahan <i>e-government</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat DPRD sebagai sumber daya TK untuk unit TK, EDM</li> <li>Penyusunan Organisasi Baku DPRD</li> <li>Penyusunan Organisasi Jaringan</li> </ul> </li> </ul> |

Gambar 6.35 Peta pentahapan Provinsi Gorontalo

## 2. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Karangasem 2010-2014

### 2.1. Arsitektur Informasi

#### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur. Hal ini pending demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-A</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur pertukaran data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-B</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur: <i>Datamart</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur <i>datamart</i> demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-C</b>              | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur <i>database</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>              | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur <i>database table</i> demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



## B. Informasi Tidak Terstruktur

| No.2                              | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0        | Tidak ada  |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur:<br>(isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai                                  |

| No.3 | Matriks klasifikasi informasi  |
|------|--|
|      | matrik klasifikasi informasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Kelas-kelas data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi kelas kelas data.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-B</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi peta kepemilikan data .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi <i>data dictionary</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-C                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi <i>syntax rules</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-D                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: klasifikasi level keamanan data. Hal ini penting demi terciptanyakelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 2.2. Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| No.4            | Peta Aplikasi   |
|-----------------|---|
| □ 3             | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 29 pada bagian peta solusi aplikasi <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| Catatan         | Menjelaskan bahwa pemetaan aplikasi pada kabupaten karang asem menggunakan aktivitas pemerintahan dengan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi  |

| <b>No.5</b>      | <b>Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window</b>   |
|------------------|---|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK   |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari dokumen ada beberapa aplikasi yang disebutkan pada halaman 42.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan          | <p>Contoh beberapa aplikasi tersebut adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKDA</li> <li>• SIMPEG</li> <li>• SI Potensi Daerah</li> <li>• NUPTK</li> <li>• PADATI</li> </ul>                         |

## 2.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi  |
|--|---|
| □ 3  | Ada, terdapat sekitar 3 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol>   |
| Bukti Pendukung                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.6-A</b>                     | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>4</b> | Terdiri lebih dari 2 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci  |
| Jaringan Komunikasi               | 1) LAN<br>2) WAN<br>3) Internet<br>4) VOIP dan lain lain.  |
| Bukti pendukung                   | 1. Dokumen halaman 70, 86, 99<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Catatan                           | Untuk penjelasan mengenai kondisi eksisting tidak dijelaskan akan tetapi untuk mengenai perencanaan pengembangan kedepan dijelaskan pada halaman 70, 86, 99  |

| <b>No.6-B</b>                     | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>4</b> | Terdiri lebih dari 2 perangkat pemrosesan, telah dijelaskan secara rinci |



| <b>No.6-B</b>        | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>  |
|----------------------|--|
| Perangkat Pemrosesan | 1) Server<br>2) Workstation<br>3) PC   |
| Bukti pendukung      | 1. Dokumen halaman 70, 86, 99<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Catatan              | Untuk penjelasan mengenai kondisi eksisting tidak dijelaskan akan tetapi untuk mengenai perencanaan pengembangan kedepan dijelaskan pada halaman 70, 86, 99  |

| <b>No.6-C</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b> |
|-----------------|--|
| □ 3             | Ada, namun hanya mencakup 2 cakupan  |
| Software Sistem | 1) Sistem Operasi<br>2) Database RDMBS<br>3) Application Development             |

| <b>No.6-C</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>   |
|-----------------|--|
|                 | 4) System Management   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 14, 15, 85</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan         | <p>Halaman 15 pada dokumen menjelaskan mengenai sistem operasi yang telah digunakan. sedangkan halaman 85 mengenai standar sistem operasi yang harus digunakan</p> <p>Halaman 14 menjelaskan mengenai aplikasi database yang digunakan</p>   |

| <b>No.6-D</b>          | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data</b> |
|------------------------|---|
| □ 1                    | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                                    |
| Media Penyimpanan Data | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>                    |

| No.6-D          | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data   |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | 1. Dokumen halaman 49  |
| Catatan         | Kabupaten belum terdapat data center akan tetapi pada halaman 49 dijelaskan mengenai perencanaan pengembangan mengenai data center mereka. |

## B. Shared Services

| No.7                       | Shared Services   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul>  |
| Bukti Pendukung            | 1. Dokumen halaman 49, 87, 99   |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen pada bagian 2.4.2 tentang konektivitas menjelaskan mengenai koneksi internet yang ada dan yang akan mereka kembangkan</p> <p>Pada halaman 49 menjelaskan bahwa telah memiliki layanan <i>email service</i> milik diskominfo</p> |

| No.7 | Shared Services   |
|------|---|
|      | <p>Untuk masalah <i>printing service</i> tidak dijelaskan akan tetapi untuk masalah hardware nya dijelaskan.</p> <p>Untuk <i>file server</i> akan dilaksanakan rencana pengembangan</p> |

## 2.4. Manajemen dan Organisasi

### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8            | Struktur organisasi pengelola   |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 11.</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan         | Menjelaskan bahwa struktur organisasi pengelola sama dengan struktur organisasi diskominfo akan tetapi dijelaskan dengan detail mengenai struktur dan juga tupoksi mereka       |

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur identifikasi dan pemilihan alternatif sistem. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC                        |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Kebutuhan pada             | 1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain |

| No.10           | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|-----------------|---|
| metode SDLC     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai realisasi software aplikasi: prosedur metode SDLC. Hal ini penting demi terciptanya  |

| <b>No.10</b> | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>  |
|--------------|---|
|              | kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.11</b>                      | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur training dan transfer pengetahuan aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.12                      | Analisis Kebutuhan Kapasitas   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur analisis kebutuhan kapasitas. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |



| No.13   | Proedur Pengelolaan Data   |
|---------|--|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur realisasi pengelolaan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### D. Pengoperasian Sistem

##### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek kritikal             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan  |

| No.14 | Manajemen Tingkat Layanan   |
|-------|---|
|       | kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                | Tidak ada   |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                   | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur mekanisme aspek pengamanan dan keberlangsungan Sistem. Hal ini penting  |

| No.15 | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem  |
|-------|--|
|       | demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur sistem pengamanan aplikasi. Hal ini   |

| No.16 | Sisi pengamanan aplikasi   |
|-------|--|
|       | penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi:<br>Mekasisme Pengamanan  |
|--|---|
| □ 1                                    | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktur teknologi   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hardening</i></li> <li>• <i>Firewall</i></li> <li>• <i>IDS/IPS</i></li> <li>• <i>Network Monitoring Tool</i></li> <li>• <i>Log processor &amp; analysis</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 73 &amp; 90</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.17</b> | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekasisme Pengamanan</b>   |
|--------------|--|
| Catatan      | Pada dokumen menjelaskan bahwa telah menerapkan firewall, dan beberapa server baru akan juga diterapkan keamanan firewall. |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| <b>No.18</b>                                | <b>Manajemen Software Aplikasi</b>  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | Tidak ada   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                     | Seharusnya ada prosedur manajemen software aplikasi demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |

#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Seharusnya ada prosedur manajemen data demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi sistem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan pihak ketiga. Hal ini   |

| No.20 | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga  |
|-------|--|
|       | penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## E. Pemeliharaan Sistem

### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan software aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0              | Tidak ada   |
| <i>Patching</i> infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation |

| No.22           | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi   |
|-----------------|--|
|                 | c. Database server   |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan infrastruktur teknologi .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan data.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai prosedur siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 2.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 94 bab Peta Tahapan Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah menjelaskan daftar mengenai pengembangan yang akan dilaksanakan.  |

### 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Setiap pendanaan dikategorikan berdasarkan total biaya yang dihabiskan  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman LXI</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.26   | Pendanaan Pengembangan TIK  |             |             |             |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|------------|-------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
|         | 3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)   |             |             |             |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
| Catatan | <p>Pada dokumen menjelaskan mengenai rincian biaya dan mengkategorikan biaya berdasarkan 3 level.</p> <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas</th><th>M</th><th>H</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>Pembuatan Standarisasi Definisi Data</td><td>150,000,000</td><td>200,000,000</td><td>120,000,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Implementasi Standarisasi Definisi Data</td><td>90,000,000</td><td>125,000,000</td><td>75,000,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan Datawarehouse</td><td>250,000,000</td><td>350,000,000</td><td>175,000,000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengembangan dan implementasi proses analisis data</td><td>200,000,000</td><td>300,000,000</td><td>125,000,000</td></tr></table> | No          | Aktivitas   | M           | H | L | 1 | Pembuatan Standarisasi Definisi Data | 150,000,000 | 200,000,000 | 120,000,000 | 2 | Implementasi Standarisasi Definisi Data | 90,000,000 | 125,000,000 | 75,000,000 | 3 | Pembuatan Datawarehouse | 250,000,000 | 350,000,000 | 175,000,000 | 4 | Pengembangan dan implementasi proses analisis data | 200,000,000 | 300,000,000 | 125,000,000 |
| No      | Aktivitas   | M           | H           | L           |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
| 1       | Pembuatan Standarisasi Definisi Data  | 150,000,000 | 200,000,000 | 120,000,000 |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
| 2       | Implementasi Standarisasi Definisi Data   | 90,000,000  | 125,000,000 | 75,000,000  |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
| 3       | Pembuatan Datawarehouse   | 250,000,000 | 350,000,000 | 175,000,000 |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
| 4       | Pengembangan dan implementasi proses analisis data  | 200,000,000 | 300,000,000 | 125,000,000 |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |
|         | Gambar 6.36 Tabel Pendanaan Karangasem  |             |             |             |   |   |   |                                      |             |             |             |   |   |            |             |            |   |                         |             |             |             |   |  |             |             |             |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Pendapatan</li> <li>2) Pengurangan biaya</li> <li>3) Efisiensi proses kerja</li> <li>4) Peningkatan Pelayanan</li> <li>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi</li> <li>6) Peningkatan Kapabilitas TI</li> <li>7) Pengurangan Resiko</li> </ol> |

| No.27           | Benefit Realization Ratio  |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Karangasem tidak ada penjelasan mengenai urgensi pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29  | Pentahapan Pengembangan   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
|--|---|------|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|--|---|----------|--|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <div><input type="checkbox"/> 3</div>              | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan  |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| Bukti pendukung                                    | <div><div>1. Dokumen halaman 94-101</div><div>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div></div>   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| Catatan  | <div>Pada dokumen telah jelas melakukan penyusunan jadwal terhadap pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun</div> <div><table><tr><th>No</th><th>Aplikasi</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th></tr><tr><td colspan="7">I. Kelompok Aplikasi Layanan yang berorientasi G2G</td></tr><tr><td>1</td><td>Portal Kabupaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SI Pengelolaan Dokumen &amp; Surat Elektronik</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>e-mail</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>e-Agenda</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>SIM Pelaporan Kepemerintahan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>SIM Pendapatan Daerah</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>e-Planning/SIMRENBANGDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> | No   | Aplikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | I. Kelompok Aplikasi Layanan yang berorientasi G2G |  |  |  |  |  |  | 1 | Portal Kabupaten |  |  |  |  |  | 2 | SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik |  |  |  |  |  | 3 | e-mail |  |  |  |  |  | 4 | e-Agenda |  |  |  |  |  | 5 | SIM Pelaporan Kepemerintahan |  |  |  |  |  | 6 | SIM Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  | 7 | e-Planning/SIMRENBANGDA |  |  |  |  |  |
| No   | Aplikasi  | 2010 | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| I. Kelompok Aplikasi Layanan yang berorientasi G2G |   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 1  | Portal Kabupaten  |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 2  | SI Pengelolaan Dokumen & Surat Elektronik   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 3  | e-mail  |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 4  | e-Agenda  |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 5  | SIM Pelaporan Kepemerintahan  |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 6  | SIM Pendapatan Daerah   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
| 7  | e-Planning/SIMRENBANGDA   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |
|  | <div>Gambar 6.37 Penyusunan jadwal Kabupaten Karangasem</div>   |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |   |                  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |  |   |          |  |  |  |  |  |   |                              |  |  |  |  |  |   |                       |  |  |  |  |  |   |                         |  |  |  |  |  |

### 3. Master Plan E-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar 2014-2019

#### 3.1. Arsitektur Informasi

##### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar model informasi terstruktur. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: pertukaran data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan |

| No.1-A | Adanya model informasi terstruktur:<br>Pertukaran Data                            |
|--------|---|
|        | kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-B                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Datamart</i>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>datamart</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-C</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur: <i>Database</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur: <i>Database table</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



## B. Informasi Tidak Terstruktur

| No.2                              | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0        | Tidak ada  |
| Model informasi tidak terstruktur | <p>Gambar, video, file dokumen</p> <p>Penjelasan model informasi tidak terstruktur:</p> <p>(isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)</p>  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. UU 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik – Pasal 1</li> </ol>  |
| Catatan                           | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjealsan mengenai model informasi tidak terstruktur.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007</p> |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi. Hal ini demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: kelas-kelas data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-B</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | <b>Tidak ada</b>  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjealsan mengenai matrik klasifikasi informasi: peta kepemilikan data.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | <b>Tidak ada</b>  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjeasnan megnenai matrik klasifikasi informasi: <i>data dictionary</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-D                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: <i>syntax rules</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-E                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan matrik klasifikasi informasi: level keamanan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3.2. Arsitektur Aplikasi

#### A. Peta Aplikasi

| No.4            | Peta Aplikasi   |
|-----------------|---|
| □ 3             | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 94</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (BluePrint)) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar telah menjelaskan mengenai fungsi dan modul aplikasi pemerintahan yang akan menjadi peta aplikasi di kabupaten banjar  |

| <b>No.5</b>      | <b>Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window</b>  |
|------------------|--|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.  |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK  |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Website pemerintah banjar dan dokumen halaman 32 tentang list aplikasi</li> </ol>                                 |
| Catatan          | <p>Berikut ini adalah contoh beberapa aplikasi yang telah menggunakan one stop windows</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPSE</li> <li>• SISDA</li> <li>• E-Monev</li> <li>• E – Planning</li> <li>• E-Usulan</li> <li>• Mapatda</li> </ul> |

### 3.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi  |
|--|---|
| □ 2  | Ada, terdapat sekitar 1-2 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol>   |
| Catatan                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------------|--|
| □ 4                 | Terdiri lebih dari 2 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci  |
| Jaringan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LAN</li> <li>2) WAN</li> <li>3) Internet</li> <li>4) VOIP dan lain lain.</li> </ol>  |
| Bukti pendukung     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 80, 82 ,147</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol>        |
| Catatan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen menjelaskan bahwa beberapa SKPD sudah banyak yang telah terdapat jaringan LAN dibuktikan dengan tabel yang berisi daftar SKPD beserta jaringan yang telah diimplementasikan, akan tetapi hal tersebut masih kurang lengkap karena seharusnya terdapat gambar topologi dari tiap SKPD sebagai pendukung</li> </ol> |



| <b>No.6-A</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------|--|
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pada dokumen tidak ada jaringan WAN akan tetapi terdapat penjelasan mengenai jaringan MAN yang ada. Penjelasan mengenai jaringan MAN tidak begitu detail.</li> <li>3. Pada dokumen jaringan internet hanya dijelaskan bahwa tiap SKPD ada yang telah memasang jaringan dan belum, tidak detail dengan bagaimana spesifikasi jaringan yang mereka gunakan.</li> </ol> |

| <b>No.6-B</b>                     | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak Ada   |
| Perangkat Pemrosesan              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Server</li> <li>2) Workstation</li> <li>3) PC</li> </ol>  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran</li> </ol> |

| <b>No.6-B</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |
|---------------|---|
|               | Elektronis    Lingkup    Intranet    di<br>Lingkungan Instansi Pemerintah   |
| Catatan       | Untuk sekelas pemerintahan tidak mungkin untuk tidak memiliki server ataupun PC. akan tetapi pada intinya pada dokumen tidak penjelasan mengenai Server dan PC sehingga dianggap tidak ada. |

| <b>No.6-C</b>              | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Software System            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) Application Development</li> <li>4) System Management</li> </ol>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.6-C</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>  |
|---------------|---|
| Catatan       | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai <i>software system</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

| <b>No.6-D</b>              | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Media Penyimpanan Data     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen halaman 156</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar terdapat penjelasan mengenai akan dilakukan perencanaan pembangunan data center. dijelaskan detail pada halaman 156 bagian C. Pembangunan Pusat Manajemen Data Pemerintah |

## B. Shared Services

| No.7                    | Shared Services  |
|-------------------------|--|
| □ 2                     | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>   |
| Layanan Shared Services | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul> |
| Bukti Pendukung         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 82.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                              |
| Catatan                 | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar hanya ada penjelasan mengenai <i>internet service</i> yang mereka gunakan/implementasikan ke dalam pemerintahan.                            |

## 3.4. Manajemen dan Organisasi

### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8            | Struktur organisasi pengelola   |
|-----------------|---|
| □ 1             | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.8    | Struktur organisasi pengelola  |
|---------|--|
|         | 2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)  |
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak menjelaskan mengenai struktur organisasi pengelola beserta keterangan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur identifikasi dan pemilihan alternatif sistem demi terciptanya kelengkapan dan  |

| No.9 | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem                             |
|------|---|
|      | kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> </ol> |

| <b>No.10</b>    | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>   |
|-----------------|--|
|                 | 6. Uji coba ( <i>testing</i> ): <i>unit testing, system testing, integration testing</i> ,<br>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)<br>8. Instalasi dan akreditasi  |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai realisasi software aplikasi: prosedur metode SDLC .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.11</b>               | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak Ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar bahwa ada beberapa aplikasi yang disertai user manual dan training. akan tetapi pada bagian ini lebih fokus terhadap adakah prosedur dan sistem informasi mengenai hal tersebut. |

| No.12                      | Analisis Kebutuhan Kapasitas  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai analisis kebutuhan kapasitas. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |



| No.13   | Proedur Pengelolaan Data   |
|---------|--|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### D. Pengoperasian Sistem

##### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek kritikal             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian   |

| No.14 | Manajemen Tingkat Layanan  |
|-------|--|
|       | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 4                | Ada, mencakup keseluruhan aspek keamanan dan keberlangsungan sistem   |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 55 bagian B. Peningkatan Keamanan Jaringan Intra Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                                   | Pada dokumen sudah sangat baik menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk dapat   |

| No.15 | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem |
|-------|---|
|       | melindungi aspek keamanan yang dimaksud               |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, paling tidak terdapat minimal 1 mekanisme sisi aplikasi  |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 155</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.16</b> | <b>Sisi pengamanan aplikasi</b>   |
|--------------|---|
| Catatan      | Pada dokumen menjelaskan bahwa mereka telah melakukan implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi |

| <b>No.17</b>                           | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekanisme Pengamanan</b>   |
|--|--|
| □ 1                                    | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktur teknologi  |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardening</li> <li>• Firewall</li> <li>• IDS/IPS</li> <li>• Network Monitoring Tool</li> <li>• Log processor &amp; analysis</li> </ul>  |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 87</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.17</b> | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekasisme Pengamanan</b>  |
|--------------|---|
| Catatan      | Pada dokumen dijelaskan bahwa sisi pengamanan masih dengan menggunakan <i>firewall</i> dan <i>antivirus</i> |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| <b>No.18</b>                                | <b>Manajemen Software Aplikasi</b>  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | <b>Tidak ada</b>  |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                     | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai dokumen menjelaskan mengenai prosedur manajemen software aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kesesuaian terhadap panduan tata kelola nasional 2007                          |

**IV. Manajemen Data**

| <b>No.19</b>               | <b>Manajemen Data</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 5</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                    | Pada dokumen dijelaskan bahwa kebutuhan TIK kabupaten banjar adalah dapat melakukan backup data dan recovery jika mengalami kegagalan. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai prosedur yang harus dilakukan |

**V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga**

| <b>No.20</b>               | <b>Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi sistem   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ol> |

| <b>No.20</b>    | <b>Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga</b>   |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan pihak ketiga. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### **D. Pemeliharaan Sistem**

##### **I. Pemeliharaan Software Aplikasi**

| <b>No.21</b>               | <b>Pemeliharaan Software Aplikasi</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan software aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                            | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0       | Tidak ada  |
| Patching infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server  |
| Bukti pendukung                  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                          | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan infrastruktur teknologi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur teknis pemeliharaan data. Hal ini penting demi |



|  |   |
|--|---|
|  | terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |
|--|---|

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai prosedur siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

#### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 175 bab 6.3 implementasi pengembangan <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah menjelaskan paket pengembangan dengan melakukan daftar apa saja yang perlu dikembangkan. Misal  |

| No.25 | Paket Pengembangan TIK  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
|-------|---|----|----------|----|---------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|---|----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|------------------------------|-----|--|-----|---|-----|--|-----|---|-----|---|
|       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kegiatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Optimalisasi Modul Kependudukan</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Optimalisasi Modul Publikasi Informasi Umum Dan Pemerintahan</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Optimalisasi Modul Pengelolaan Dan Monitoring Proyek</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Optimalisasi Modul Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Optimalisasi Modul Pengelolaan Pendapatan Daerah</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Pengembangan Modul sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Pengembangan Modul Sistem Absensi dan Penggajian</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Pengembangan Modul Sistem Penilaian Kinerja PNS</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Pengembangan Modul Tata ruang dan Lingkungan Hidup</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Pengembangan Modul Industri Kecil dan Menengah (IKM)</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Lokal</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan <i>End user</i></td></tr> <tr><td>13.</td><td>Pembentukan Unit Organisasi Bidang TIK</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Koordinasi dengan Semua SKPD</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Penyusunan Aturan Untuk Menjamin Integrasi</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Kepegawaian Daerah (BKD)</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Pengelolaan, keuangan aset Daerah (BPKAD)</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)</td></tr> </tbody> </table> <p>Gambar 6.38 Daftar pengembangan Kabupaten Banjar</p> <p>Akan tetapi tidak ada daftar mengenai pengembangan dengan menggunakan nama aplikasi. Sehingga terlihat tidak begitu detail mengenai paket pengembangan TIK yang ada.</p> | No | Kegiatan | 1. | Optimalisasi Modul Kependudukan | 2. | Optimalisasi Modul Publikasi Informasi Umum Dan Pemerintahan | 3. | Optimalisasi Modul Pengelolaan Dan Monitoring Proyek | 4. | Optimalisasi Modul Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan | 5. | Optimalisasi Modul Pengelolaan Pendapatan Daerah | 6. | Pengembangan Modul sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan | 7. | Pengembangan Modul Sistem Absensi dan Penggajian | 8. | Pengembangan Modul Sistem Penilaian Kinerja PNS | 9. | Pengembangan Modul Tata ruang dan Lingkungan Hidup | 10. | Pengembangan Modul Industri Kecil dan Menengah (IKM) | 11. | Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Lokal | 12. | Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan <i>End user</i> | 13. | Pembentukan Unit Organisasi Bidang TIK | 14. | Koordinasi dengan Semua SKPD | 15. | Penyusunan Aturan Untuk Menjamin Integrasi | 16. | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | 17. | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Pengelolaan, keuangan aset Daerah (BPKAD) | 18. | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 19. | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) |
| No    | Kegiatan  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 1.    | Optimalisasi Modul Kependudukan   |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 2.    | Optimalisasi Modul Publikasi Informasi Umum Dan Pemerintahan  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 3.    | Optimalisasi Modul Pengelolaan Dan Monitoring Proyek  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 4.    | Optimalisasi Modul Sistem Evaluasi Dan Informasi Hasil Pembangunan  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 5.    | Optimalisasi Modul Pengelolaan Pendapatan Daerah  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 6.    | Pengembangan Modul sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 7.    | Pengembangan Modul Sistem Absensi dan Penggajian  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 8.    | Pengembangan Modul Sistem Penilaian Kinerja PNS   |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 9.    | Pengembangan Modul Tata ruang dan Lingkungan Hidup  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 10.   | Pengembangan Modul Industri Kecil dan Menengah (IKM)  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 11.   | Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Lokal  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 12.   | Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan <i>End user</i>  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 13.   | Pembentukan Unit Organisasi Bidang TIK  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 14.   | Koordinasi dengan Semua SKPD  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 15.   | Penyusunan Aturan Untuk Menjamin Integrasi  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 16.   | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Kepegawaian Daerah (BKD)   |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 17.   | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Pengelolaan, keuangan aset Daerah (BPKAD)  |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 18.   | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)   |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |
| 19.   | Penambahan formasi Pranata tingkat pelaksana Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)   |    |          |    |                                 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |   |    |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |                              |     |  |     |   |     |  |     |   |     |   |

2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26   | Pendanaan Pengembangan TIK   |                 |             |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
|---|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------|---|-----------|-----------|---------------|----|---------|-----------|--------------------|---|-----------|-----------|----------|---|---------|---------|---------------|--|--|------------|-------------|--|--|----|--------------------|--|--|-------------|
| <div><div><div></div></div><div>3</div></div> | Membuat list pendanaan berdasarkan paket pengembangan yang ada   |                 |             |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Bukti pendukung                               | <div><div><div>1. Dokumen halaman 186 bagian 6.4 Perkiraan Dana Implementasi</div><div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div><div>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div></div></div>   |                 |             |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Catatan                                       | <div><div><div>Pada dokumen telah dijelaskan bagaimana pendanaan diperkirakan berdasarkan produk dan kebutuhan jasa dalam melakukan pengembangan</div><div><table><tr><th>Peralatan</th><th>Jumlah</th><th>Harga Unit (Rp)</th><th>Total Biaya</th></tr><tr><td>Router</td><td>1</td><td>6.000.000</td><td>6.000.000</td></tr><tr><td>Switch 10/100</td><td>15</td><td>500.000</td><td>7.500.000</td></tr><tr><td>Switch 10/100/1000</td><td>5</td><td>1.200.000</td><td>6.000.000</td></tr><tr><td>Repeater</td><td>5</td><td>100.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td colspan="3">Total PerSKPD</td><td>20.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah SKPD</td><td>34</td></tr><tr><td colspan="3">Total Seluruh SKPD</td><td>680.000.000</td></tr></table></div></div></div> <div>Gambar 6.39 List contoh pendanaan Kabupaten Banjar</div> | Peralatan       | Jumlah      | Harga Unit (Rp) | Total Biaya | Router | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Switch 10/100 | 15 | 500.000 | 7.500.000 | Switch 10/100/1000 | 5 | 1.200.000 | 6.000.000 | Repeater | 5 | 100.000 | 500.000 | Total PerSKPD |  |  | 20.000.000 | Jumlah SKPD |  |  | 34 | Total Seluruh SKPD |  |  | 680.000.000 |
| Peralatan                                     | Jumlah   | Harga Unit (Rp) | Total Biaya |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Router  | 1  | 6.000.000       | 6.000.000   |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Switch 10/100                                 | 15   | 500.000         | 7.500.000   |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Switch 10/100/1000                            | 5  | 1.200.000       | 6.000.000   |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Repeater                                      | 5  | 100.000         | 500.000     |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Total PerSKPD                                 |  |                 | 20.000.000  |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Jumlah SKPD                                   |  |                 | 34          |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |
| Total Seluruh SKPD                            |  |                 | 680.000.000 |                 |             |        |   |           |           |               |    |         |           |                    |   |           |           |          |   |         |         |               |  |  |            |             |  |  |    |                    |  |  |             |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | 1) Peningkatan Pendapatan<br>2) Pengurangan biaya<br>3) Efisiensi proses kerja<br>4) Peningkatan Pelayanan<br>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi<br>6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko                                   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Banjar tidak ada penjelasan mengenai urgensitas pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 175 bab 6.3 implementasi pengembangan <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |

| No.29   | Pentahapan Pengembangan   |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen telah dijelaskan bagaimana pengerjaan pengembangan di tiap tahunnya. |

#### 4. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci 2014-2019

##### 4.1. Arsitektur Informasi

##### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur:<br>Pertukaran Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: pertukaran data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



| <b>No.1-B</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Datamart</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>data mart</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-C</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Informasi Tidak Terstruktur

| <b>No.2</b>                       | <b>Adanya model informasi tidak terstruktur</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-B</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: peta kepemilikan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: peta <i>data dictionary</i> Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: <i>syntax rules</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-E</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: level keamanan data.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 4.2. Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 108 bagian 3.5.2.2 <i>E-Government</i> solution map</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (BluePrint)) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah dijelaskan mengenai pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan dengan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi.  |

| No.5             | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window  |
|------------------|---|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK   |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website kerincikab.go.id</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan          | <p>Berdasarkan website ada contoh beberapa aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SiMaya</li> <li>• UPIK</li> <li>• Emonev Desa</li> <li>• Layanan Egov</li> <li>• SIMPEG</li> <li>• SMS Center</li> </ul> |

### 4.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 2                 | Ada, terdapat sekitar 1-2 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol>   |
| Catatan                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |



| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------------|--|
| □ 2                 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Jaringan Komunikasi | 1) LAN<br>2) WAN<br>3) Internet<br>4) VOIP dan lain lain.  |
| Bukti pendukung     | 1. Dokumen halaman 19, 22, 29, 83<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Catatan             | Pada dokumen hanya menjekaskan mengenai pendfinisian tiap jaringan komunikasi tetapi tidak menjelaskan kondisi eksisting   |

| <b>No.6-B</b>        | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>  |
|----------------------|--|
| □ <b>1</b>           | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Perangkat Pemrosesan | 1) Server<br>2) Workstation<br>3) PC   |
| Bukti pendukung      | 1. Dokumen halaman 33, 86<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Catatan              | Tidak ada penjelasan detail mengenai spesifikasi apa yang dimiliki, jumlah yang dimiliki dan status infrastruktur saat ini dan bagaimana rencana pengembangan kedepan  |

| <b>No.6-C</b>                     | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Software System</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | <b>Tidak ada</b>  |
| Soft-ware System                  | 1) Sistem Operasi<br>2) Database RDMBS<br>3) Application Development<br>4) System Management  |
| Bukti pendukung                   | 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br><br>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah                           |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai cakupan arsitektur infrastruktur teknologi: <i>software system</i> data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.6-D                     | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Media Penyimpanan Data     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 91 bagian 6. Pengembangan Data center dan Data recovery center</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen dijelaskan mengenai tahap perencanaan pengembangan dari data center dan DRC.  |

### C. Shared Services

| No.7                       | Shared Services  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>   |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul> |

| <b>No.7</b>     | <b>Shared Services</b>  |
|-----------------|---|
| Bukti Pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 14 dan 19</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Pada dokumen menjelaskan bahwa telah menerapkan internet service, untuk email service sudah tersedia namun belum terimplementasi dengan baik                              |

#### 4.4. Manajemen dan Organisasi

##### A. Struktur Organisasi Pengelola

| <b>No.8</b>                       | <b>Struktur organisasi pengelola</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>4</b> | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 51 bagian 3.31 model struktur organisasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                           | Berikut ini adalah struktur organisasi pengelola yang ada   |

| No.8 | Struktur organisasi pengelola  |
|------|--|
|      | <div><pre>graph TD; A[Sekretariat Daerah] --&gt; B[Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer]; A --&gt; C[Bagian Pengelolaan Data Elektronik]; C --&gt; D[Sub. Bag. Pengembangan Teknologi Informasi]; D --&gt; E[Koordinator Application]; D --&gt; F[Koordinator Technical Support]; D --&gt; G[Koordinator Operation]; D --&gt; H[Koordinator Data]; E --&gt; I[Programmer]; F --&gt; J[Network &amp; system Admin]; G --&gt; K[Operator End User]; H --&gt; L[Database Admin];</pre></div> <p>Gambar 6.40 Struktur Organisasi Kabupaten Kerinci</p> |

**B. Realisasi Sistem**

**III. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem**

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li><li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li><li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li></ul> |

| No.9            | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur identifikasi dan pemilihan alternatif sistem. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### IV. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>)).</li> </ol> |

| No.10           | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|-----------------|---|
|                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur metode SDLC. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |



| <b>No.11</b>                      | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai <i>training</i> dan <i>transfer</i> pengetahuan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.12</b>                      | <b>Analisis Kebutuhan Kapasitas</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai analisis kebutuhan kapasitas. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |

## D. Pengoperasian Sistem

### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Aspek kritikal             | a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.<br><br>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.<br><br>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan. |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 149 bagian roadmap <i>E-Government</i><br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen menjelaskan bahwa akan ada pembuatan prosedur kebijakan operasional pengelolaan layanan TIK pada tahun 2017   |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15  | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 4                       | <p>Ada, mencakup keseluruhan aspek keamanan dan keberlangsungan sistem</p>  |
| <p>aspek keamanan dan keberlangsungan system</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| <p>Bukti pendukung</p>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 92 bagian 3.4.3.1 Aspek Keamanan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| <p>Catatan</p>                                   | <p>Pada dokumen telah dijelaskan prosedur dan mekanisme aspek pengamanan yang harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan sistem yang dimaksudkan</p>  |

| No.16                   | Sisi pengamanan aplikasi   |
|-------------------------|--|
| □ 1                     | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Mekanisme sisi aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>   |
| Bukti pendukung         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 47</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                 | Pada dokumen dituliskan mekanisme dasar pengamanan aplikasi, akan tetapi belum ada prosedur dari hal tersebut  |

| <b>No.17</b>                         | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi:<br/>Mekasisme Pengamanan</b>   |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1           | Ada, paling tidak terdapat minimal 1-3 mekanisme sisi infrastruktr teknologi   |
| Meka-<br>nisme<br>Infra-<br>struktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardening</li> <li>• Firewall</li> <li>• IDS/IPS</li> <li>• Network Monitoring Tool</li> <li>• Log processor &amp; analysis</li> </ul>  |
| Bukti<br>pendu-<br>kung              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 47, 84</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                              | <p>Pada halaman 47 menjelaskan bahwa dalam mereka hanya menjelaskan secara teori dengan mengambil dari panduan tata kelola TIK.</p> <p>Untuk implementasi hanya ada firewall yang dijelaskan pada halaman 84</p>   |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | Tidak ada   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                     | Seharusnya ada prosedur manajemen software aplikasi beserta penjelasannya demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |

### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 45</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.19   | Manajemen Data  |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen menjelaskan mengenai adanya <i>backup</i> dan <i>restore</i> akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana prosedur mengenai pengelolaan manajemen data seperti <i>backup</i> dan <i>restore data</i> |

## V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Keten-tuan operasi system  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ul> |
| Bukti pendu-kung           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 48</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ul>  |
| Catatan                    | Pada dokumen menjeaskan adanya kebijakan pengelelolaan pihak ketiga. akan tetapi itu hanya penjelasan teori yang ada pada panduan. untuk kebijakan/prosedur dari mereka sendiri belum ada   |



## E. Pemeliharaan Sistem

### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan software aplikasi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                      | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan infrastruktur teknologi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | <p>Ada, prosedur pemeliharaan data untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan ketersediaan data</p>  |
| <p>Bukti pendukung</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 95</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br/>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br/>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| <p>Catatan</p>             | <p>Salah satu upaya pemeliharaan data untuk menjaga data menurut prosedur yaitu apabila ada orang yang akan mengakses database Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci (ataumasuk ke ruangan server / <i>Network Operations Center</i>) harus menunjukkan identitasnya dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak mengakses basis data atau sistem tersebut. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan tanda pengenalan, password, <i>digital signature</i>, dan <i>biometrics</i></p> |

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai prosedur terhadap siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

##### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 149 bagian roadmap penerapan <i>E-Government</i> kabupaten kerinci</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen menjelaskan list daftar pengembangan dan mengelompokkan kedalam beberapa komponen seperti kebijakan, sumber daya, infrastruktur jaringan dan sistem informasi  |

## 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol>                                      |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007</p> |

## 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Pendapatan</li> <li>2) Pengurangan biaya</li> <li>3) Efisiensi proses kerja</li> <li>4) Peningkatan Pelayanan</li> <li>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi</li> </ol> |

| No.27           | Benefit Realization Ratio  |
|-----------------|--|
|                 | 6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko   |
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Kerinci tidak ada penjelasan mengenai urgensi pengembangan TIK beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                                 | Pentahapan Pengembangan   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------|------|------|------|------|---|---------------------|--|--|--|--|---|
| <div><input type="checkbox"/> 3</div> | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |
| Bukti pendukung                       | <div><div>1. Dokumen halaman 149 bagian roadmap penerapan <i>E-Government</i> kabupaten kerinci</div><div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div><div>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div></div>   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |
| Catatan                               | <div>Pada dokumen telah melakukan penyusunan pengembangan terhadap pengembangan yang telah mereka tentukan</div> <table><tr><th>No.</th><th>Komponen</th><th colspan="5">TAHUN</th></tr><tr><th></th><th></th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr><tr><td>1</td><td>Sumber Daya Manusia</td><td><ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi program "Melek IT" di kalangan pimpinan dan pembantu kebijakan</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang PC hardware</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan staff unit penyelenggara TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan pengelolaan Website subdomain SKPD</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Performance Tuning Jaringan</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Pengelolaan Web Service</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Virtualisasi</li><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Tata Kelola TIK</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Business Intelligence ( Analisa &amp; Report )</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang ISO 27001</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi Sistem Terpadu Pemda Kerinci</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Datawarehouse</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Data Center</li><li>• Pelatihan Sertifikasi bidang TIK untuk staff Unit Penyelenggara TIK</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi untuk PEGI dan ICT Pura</li><li>• Sosialisai Pemda Digital Program</li><li>• Pelatihan penggunaan aplikasi mobile untuk semua staff pemda</li></ul></td></tr></table> | No.  | Komponen   | TAHUN  |  |   |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 | Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi program "Melek IT" di kalangan pimpinan dan pembantu kebijakan</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang PC hardware</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan staff unit penyelenggara TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan pengelolaan Website subdomain SKPD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Performance Tuning Jaringan</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Pengelolaan Web Service</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Virtualisasi</li><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Tata Kelola TIK</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Business Intelligence ( Analisa &amp; Report )</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang ISO 27001</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi Sistem Terpadu Pemda Kerinci</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Datawarehouse</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Data Center</li><li>• Pelatihan Sertifikasi bidang TIK untuk staff Unit Penyelenggara TIK</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi untuk PEGI dan ICT Pura</li><li>• Sosialisai Pemda Digital Program</li><li>• Pelatihan penggunaan aplikasi mobile untuk semua staff pemda</li></ul> |
| No.                                   | Komponen  | TAHUN  |  |  |  |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |
|                                       |   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |
| 1                                     | Sumber Daya Manusia   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi program "Melek IT" di kalangan pimpinan dan pembantu kebijakan</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang PC hardware</li><li>• Pelatihan Operator TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan staff unit penyelenggara TIK di bidang Jaringan</li><li>• Pelatihan pengelolaan Website subdomain SKPD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Performance Tuning Jaringan</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Pengelolaan Web Service</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Virtualisasi</li><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan penggunaan Aplikasi di setiap SKPD</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Tata Kelola TIK</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Business Intelligence ( Analisa &amp; Report )</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang ISO 27001</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi Sistem Terpadu Pemda Kerinci</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Datawarehouse</li><li>• Pelatihan Staff Unit Penyelenggara TIK di bidang Data Center</li><li>• Pelatihan Sertifikasi bidang TIK untuk staff Unit Penyelenggara TIK</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi untuk PEGI dan ICT Pura</li><li>• Sosialisai Pemda Digital Program</li><li>• Pelatihan penggunaan aplikasi mobile untuk semua staff pemda</li></ul> |  |  |  |  |      |      |      |      |      |   |                     |  |  |  |  |   |

Gambar 6.41 Penyusunan jadwal Kabupaten Kerinci

## 6. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bogor 2014-2018

### 6.1. Arsitektur Informasi

#### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: pertukaran data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



| <b>No.1-B</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Datamart</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>datamart</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-C</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>              | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Informasi Terstruktur

| <b>No.2</b>                       | <b>Adanya model informasi tidak terstruktur</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0        | Tidak ada  |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br><br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur: (isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur. Hal ini penting beserta penjelasannya demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan |

| No.2 | Adanya model informasi tidak terstruktur                |
|------|---|
|      | tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: beserta penjelasannya .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: kelas kelas data beserta penjelasannya.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian |

| No.3-A | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data                         |
|--------|--|
|        | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-B                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: peta kepemilikan data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-C                     | Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i>                          |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |

| <b>No.3-C</b> | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>   |
|---------------|--|
| Catatan       | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: <i>data dictionary</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Syntax Rules</i></b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: <i>syntax rules</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-E                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi: level keamanan data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 6.2. Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen halaman 79 bagian 7.1 cetak biru aplikasi <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>4. Cetak Biru (BluePrint)) Sistem</li> </ol> |

| No.4    | Peta Aplikasi   |
|---------|---|
|         | 5. Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo   |
| Catatan | Pada dokumen dijelaskan bahwa mereka telah melakukan pemetaan aplikasi dengan menggunakan aktivitas pemerintahan dan disertai fungsi dan modul aplikasi |

| No.5             | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window  |
|------------------|---|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK   |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Rencana Pengembangan TIK kota bogor bagian 3.3.3 Aplikasi halaman 31-33</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                             |
| Catatan          | <p>Pada dokumen menjelaskan beberapa aplikasi, berikut ini beberapa aplikasi yang memiliki pendekatan one stop window</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIM Surat Terintegrasi</li> <li>2. Sistem Aplikasi AMD</li> <li>3. Jamkesmas</li> </ol> |

| No.5 | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window |
|------|--|
|      | 4. SIMPATIK<br>5. SIPJU<br>6. E-procuremenet                         |

### 6.3. Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 3                 | Ada, terdapat sekitar 3 cakupan arsitektur infrastruktur  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | 1) Jaringan Komunikasi<br>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)<br>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)<br>4) Media Penyimpanan Data |
| Catatan                                    | 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah    |



| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>  |
|---------------------|---|
| □ <b>4</b>          | Terdiri lebih dari 3 jaringan komunikasi, telah dijelaskan secara rinci   |
| Jaringan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LAN</li> <li>2) WAN</li> <li>3) Internet</li> <li>4) VOIP dan lain lain.</li> </ol>   |
| Bukti pendukung     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 35 bagian infrastruktur</li> <li>2. Dokumen halaman 80 Analisis SWOT</li> <li>3. Dokumen halaman 91</li> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatakan bahwa LAN WAN dan internet merupakan sarana prasana pendukung TIK akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana kondisi LAN dan WAN yang ada disana. jaringan LAN dan WAN akan dikembangkan</li> </ol>  |

| <b>No.6-A</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>  |
|---------------|---|
|               | <p>lebih lanjut dan dijelaskan pada cetak biru sarana prasarana TIK</p> <p>2. Jaringan internet hanya dijelaskan bahwa tiap dinas memiliki akses jaringan internet, akan tetapi tidak ada penjelasan detail</p> |

| <b>No.6-B</b>        | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |
|----------------------|---|
| □ 3                  | Ada, terdapat sekitar 2 perangkat pemrosesan  |
| Perangkat Pemrosesan | <p>1) Server</p> <p>2) Workstation</p> <p>3) PC</p>   |
| Bukti pendukung      | <p>1. Dokumen halaman 36, 91</p> <p>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</p> <p>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</p> |
| Catatan              | Dijelaskan pada dokumen bahwa SKPD telah memiliki server maupun pc akan tetapi tidak  |

| <b>No.6-B</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |
|---------------|---|
|               | <p>ada penjelasan detail mengenai spesifikasi maupun inventarisasi server, pc.</p> <p>Selain itu pada dokumen menjelaskan tentang pengembangan TIK yaitu berupa pengadaan barang.</p> |

| <b>No.6-C</b>                     | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>3</b> | Ada, namun hanya mencakup 2 cakupan   |
| Software System                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) Application Development</li> <li>4) System Management</li> </ol>  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 67.73</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |

| <b>No.6-C</b> | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi:   Software System</b>  |
|---------------|---|
| Catatan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai kebijakan penggunaan operating system berbasis opensource</li> <li>2. Penjelasan mengenai RDMBS yang digunakan pada aplikasi eksisting</li> </ol> |

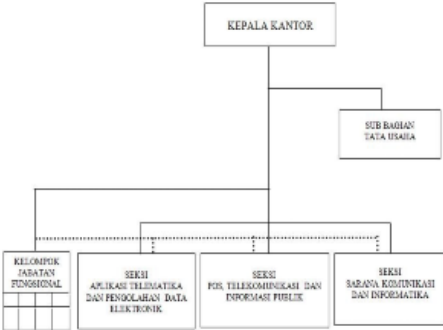
| <b>No.6-D</b>              | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi:   Perangkat      Media<br/>Penyimpanan Data</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Media Penyimpanan Data     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 91 bagian cetak biru sarana prasarana TIK</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | DRC, data center belum terimplemetenasi namun masuk dalam dokumen terdapat penjelasan mengenai rencana pengembangan pembangunan infrastruktur TIK   |

### D. Shared Services

| No.7                       | Shared Services   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul>  |
| Bukti Pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 35</li> <li>2. Dokumen halaman 52</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen halaman 35 telah menjelaskan bahwa telah mengimplementasikan <i>internet service</i></p> <p>Sedangkan pada halaman 52 telah mengatakan menggunakan email, namun tidak dijelaskan apakah <i>email</i> menggunakan pihak ketiga ataupun <i>email</i> milik pemerintah sendiri</p> |

6.4. Manajemen dan Organisasi

A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8                       | Struktur organisasi pengelola   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut  |
| Bukti pendukung            | <div>1. Dokumen halaman 27</div> <div>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</div> <div>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</div>  |
| Catatan                    | <div>Pada dokumen dijelaskan bahwa struktur organisasi pengelola TIK dipegang oleh diskominfo, sehingga mereka menjelaskan struktur organisasi diskominfo, selain itu juga menjelaskan tupoksi dari tiap struktur yang ada.</div> <div><pre>graph TD;     A[KEPALA KANTOR] --- B[SUB BAGIAN TATA USAHA];     A --- C[KELOMPOK TATANAN PERKOTAAN];     A --- D[SEKSI APLIKASI TELEMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK];     A --- E[SEKSI FOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK];     A --- F[SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA];</pre></div> <div>Gambar 6.42 Struktur Organisasi Bogor</div> |

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                       | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah melakukan semua aktivitas studi kelayakan yang ada   |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (<i>benefit</i>) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis resiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 45</li> <li>2. Tiap Bagian Komponen</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan mengenai analisis resiko terkait dengan kebijakan, kelembagaan, aplikasi dan infrastruktur TIK saat ini</li> <li>2. Setiap bagian komponen dari kebijakan hingga infrastruktur, selalu dijelaskan mengenai manfaat yang ada saat ini dan manfaat terhadap pengembangan</li> </ol> |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |



| <b>No.10</b> | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>  |
|--------------|---|
| Catatan      | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai prosedur metode SDLC beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.11</b>                      | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 70</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                     |
| Catatan                           | <p>Dijelaskan bahwa akan ada pelatihan mengenai TIK yang akan diadakan mendatang</p> <p>Akan tetapi untuk masalah prosedur dan sistem informasinya tidak ada dan belum dijelaskan.</p> |

| <b>No.12</b>               | <b>Analisis Kebutuhan Kapasitas</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 106</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen dijelaskan bahwa pemerintah kota bogor telah menerapkan tiap SKPD untuk melakukan analisis kebutuhan pada sumber TIK mereka                            |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| <b>No.13</b>               | <b>Proedur Pengelolaan Data</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |

| No.13           | Proedur Pengelolaan Data  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Seharusnya ada prosedur pengelolaan data beserta penjelasannya demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## A. Pengoperasian Sistem

### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek kritikal             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan  |

| No.14 | Manajemen Tingkat Layanan   |
|-------|---|
|       | Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007. |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3                | Ada, paling tidak mencakup 3 aspek keamanan dan keberlangsungan sistem  |
| aspek keamanan dan keberlangsungan system | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 93</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                                   | Pada dokumen menjelaskan mekanisme yang dilakukan telah memenuhi 3 aspek yaitu <i>Confidentiality</i> , <i>Integrity</i> dan <i>Availability</i>  |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai penjelasan mengenai prosedur pengamanan pada sisi aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007.</p>                                       |

| <b>No.17</b>                           | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi:<br/>Mekasisme Pengamanan</b>   |
|--|--|
| □ 2                                    | Ada, telah dilaksanakan 3-5 mekanisme sisi infrastruktur teknologi   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardening</li> <li>• Firewall</li> <li>• IDS/IPS</li> <li>• Network Monitoring Tool</li> <li>• Log processor &amp; analysis</li> </ul>  |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 92</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                                | Pada halamana 92 bagian cetak biru sarana prasarana TIK bahwa mereka telah akan dan akan mengembangkan terhadap mekanisme pengamanan. yaitu dari segi firewall, IPS dan network monitoring tool  |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| □ 2   | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 87</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                                     | Pada dokumen mengatakan bahwa ada kegiatan <i>backup</i> maupun <i>recovery</i> data, akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana prosedur terhadap hal tersebut, selain itu tidak ada prosedur dokumentasi terhadap <i>software</i> apabila terjadi <i>update</i> .   |

#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 87</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen mengatakan bahwa ada kegiatan <i>backup</i> maupun <i>recovery</i> data, akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana prosedur terhadap hal tersebut    |

#### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi system   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |



| No.20   | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai manajemen layanan pihak ketiga beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Pemeliharaan Sistem

### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai pemeliharaan software aplikasi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0              | Tidak ada   |
| <i>Patching infrastruktur teknologi</i> | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server   |
| Bukti pendukung                         | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                 | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai pemeliharaan infrastruktur teknologi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |

| No.23   | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|---------|--|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai prosedur teknis pemeliharaan data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai prosedur siklus hidup dan likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 6.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 75 bab 6 program dan kegiatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah menjelaskan bagaimana pemerintah melakukak list terhadap pengembangan dengan melakukan pengelompokan beberapa dimensi   |

### 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |

| No.26   | Pendanaan Pengembangan TIK   |
|---------|--|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK beserta penjelasannya Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Pendapatan</li> <li>2) Pengurangan biaya</li> <li>3) Efisiensi proses kerja</li> <li>4) Peningkatan Pelayanan</li> <li>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi</li> <li>6) Peningkatan Kapabilitas TI</li> <li>7) Pengurangan Resiko</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kota Bogor tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> beserta penjelasannya.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian   |

| No.27 | Benefit Realization Ratio  |
|-------|--|
|       | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, telah melakukan pengukuran tingkat urgensitas terhadap tiap daftar paket pengembangan TIK  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 68 bab 6 bagian 6.1 penetapan skala prioritas</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah melakukan pengurutan pengembangan sehingga terbentuk skala prioritas   |

#### 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 75 bab 6 bagian 6.2 tahapan implementasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.29   | Pentahapan Pengembangan  |      |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
|---------|--|------|---------|------|------|------|------|------|---|-------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
|         | 3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)  |      |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| Catatan | <p>Telah melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan pengembangan</p> <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr><tr><td>A</td><td>Dimensi Kebijakan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi</td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK</td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK</td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja pemkot</td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD</td><td>v</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Gambar 6.43 Pendjawalan Pengembangan Bogor</p> | No   | Program | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | A | Dimensi Kebijakan |  |  |  |  |  | 1 | Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi | v |  |  |  |  | 2 | Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK | v |  |  |  |  | 3 | Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK | v |  |  |  |  | 4 | Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja pemkot | v |  |  |  |  | 5 | Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD | v |  |  |  |  |
| No      | Program  | 2014 | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| A       | Dimensi Kebijakan  |      |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 1       | Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi   | v    |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 2       | Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK  | v    |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 3       | Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK   | v    |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 4       | Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja pemkot  | v    |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 5       | Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD  | v    |         |      |      |      |      |      |   |                   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |

## 7. Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019

### 7.1. Arsitektur Informasi

#### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi NTB tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> beserta penjelasannya demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur:<br>Pertukaran Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 193 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen menyatakan bahwa arsitektur informasi terstruktur terdiri atas Pertukaran data, <i>datamart</i> , <i>database</i> , <i>database table</i> .  |



| <b>No.1-A</b> | <b>Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data</b>  |
|---------------|---|
|               | Akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana tentang arsitektur informasi pertukaran data tersebut. |

| <b>No.1-B</b>              | <b>Adanya model informasi terstruktur: <i>Datamart</i></b>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 193 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa arsitektur informasi terstruktur terdiri atas Pertukaran Data, <i>datamart</i>, <i>database</i>, <i>database table</i>.</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana tentang arsitektur informasi: <i>datamart</i> tersebut.</p> |

| <b>No.1-C</b>   | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>   |
|-----------------|--|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 193 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan         | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa arsitektur informasi terstruktur terdiri atas Pertukaran Data, <i>datamart</i>, <i>database</i>, <i>database table</i>.</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana tentang arsitektur informasi: <i>database</i> tersebut.</p> |

| <b>No.1-D</b>   | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>  |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 193 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa arsitektur informasi terstruktur terdiri atas pertukaran data, <i>datamart</i>, <i>database</i>, <i>database table</i>.</p>  |

| <b>No.1-D</b> | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>                        |
|---------------|---|
|               | Akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana tentang arsitektur informasi: database tersebut. |

## **B. Informasi Tidak Terstruktur**

| <b>No.2</b>                       | <b>Adanya model informasi tidak terstruktur</b>   |
|-----------------------------------|---|
| □ 2                               | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br><br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur:<br>(isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 193 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. UU 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik – Pasal 1</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                           | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa arsitektur informasi tidak terstruktur terdiri atas gambar, video, file dokumen, dsj</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai model informasi tidak terstruktur yang ada dimiliki</p>  |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi NTB tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Klasifikasi Informasi: Kelas-kelas data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 194 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada</p> |

| <b>No.3-B</b>   | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 194 bagian 3.2.3 Perencanaan Aristektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan         | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai peta kepemilikan data yang ada</p> |

| <b>No.3-C</b>   | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 194 bagian 3.2.3 Perencanaan Aristektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| <b>No.3-C</b> | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|---------------|---|
| Catatan       | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, data dictionary, syntax rules, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai <i>data dictionary</i> data yang ada</p> |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Syntax Rules</b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 194 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                           | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai <i>syntax rules</i> data yang ada</p> |

| <b>No.3-E</b>   | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data</b>   |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen 194 bagian 3.2.3 Perencanaan Arsitektur Informasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan         | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, data dictionary, syntax rules, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai klasifikasi level keamanan data yang ada</p> |

## 7.2. Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| <b>No.4</b>     | <b>Peta Aplikasi</b>   |
|-----------------|--|
| □ 3             | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 108 bab VI bagian peta solusi aplikasi <i>E-Government</i></li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.4    | Peta Aplikasi   |
|---------|---|
|         | <p>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</p> <p>4. Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</p> |
| Catatan | <p>Pada dokumen dijelaskan bahwa dalam pengembangan aplikasi yang ada menggunakan pemetaan berdasarkan aktivitas pemerintahan dengan menjelaskan fungsi dan modul tiap aplikasi</p>                                 |

| No.5                       | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows           | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK |
| Bukti pendukung            | <p>1. Dokumen halaman 46 bagian D. Aplikasi</p> <p>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</p>      |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen menjelaskan beberapa aplikasi yang mana sudah menerapkan <i>one stop windows</i>, berikut list contoh aplikasi</p>            |



| <b>No.5</b> | <b>Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window</b>   |
|-------------|---|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsat Online</li> <li>• SMS Centre</li> <li>• SPIPISE</li> <li>• Aplikasi Pengadaan</li> <li>• NTBinMyHand</li> <li>• Aplikasi Retribusi</li> <li>• SIPD</li> </ul> |

### 7.3. Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| <b>No.6</b>                                | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</b>   |
|--|---|
| □ <b>4</b>                                 | Sudah lengkap, semua cakupan dijelaskan secara rinci  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol> |
| Catatan                                    | Sudah lengkap menjelaskan ke-empat aspek namun ada beberapa yang  |

| <b>No.6</b> | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</b>                                |
|-------------|--|
|             | menjelaskan kondisi eksisting namun tidak menjelaskan perencanaan dan sebaliknya |

| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------------|--|
| □ <b>3</b>          | Ada, terdapat sekitar 2 jaringan komunikasi  |
| Jaringan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LAN</li> <li>2) WAN</li> <li>3) Internet</li> <li>4) VOIP dan lain lain.</li> </ol>  |
| Bukti pendukung     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAN – Halaman 49 Bagian E. Infrastruktur</li> <li>2. LAN – Dokumen halaman 154 bagian 6.5.2 Membangun Local Area Network (LAN) setiap SKPD</li> <li>3. Internet - Halaman 49 Bagian E. Infrastruktur</li> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran</li> </ol> |

| <b>No.6-A</b> | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------|--|
|               | Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah  |
| Catatan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen menjelaskan bahwa jaringan LAN sudah berhasil dibangun pada beberapa titik, akan tetapi tidak ada penjelasan bagaimana tentang kondisi eksisting hal tersebut (topologi, konfigurasi)</li> <li>2. Penjelasan mengenai rencana pembangunan jaringan LAN</li> <li>3. Menjelaskan pada kondisi eksisting jaringan internet yang digunakan (Provider dan besar bandwidth)</li> </ol> |

| <b>No.6-B</b>        | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |
|----------------------|---|
| □ 3                  | Ada, terdapat sekitar 2 perangkat pemrosesan  |
| Perangkat Pemrosesan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Server</li> <li>2) Workstation</li> <li>3) PC</li> </ol>  |
| Bukti pendukung      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server – halaman 49 bagian E. Infrastruktur</li> <li>2. Server – Dokumen halaman 158 bagian Server</li> </ol> |

| No.6-B  | Cakupan <b>Arsitektur     Infrastruktur</b><br><b>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>   |   |                                |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
|---------|---|---|--------------------------------|-------------|--------|---|--------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|---|------------|---|--------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|
|         | <p>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</p> <p>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</p>  |   |                                |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
| Catatan | <p>1. Pada bagian ini menjelaskan spesifikasi dan letak <i>server</i> yang dimiliki oleh pemerintah</p> <table border="1" data-bbox="387 727 826 943"> <tr> <th>No.</th><th>Fungsi Server</th><th>Spesifikasi</th><th>Lokasi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>LPSE- Server Utama</td><td>Merek HP, HDD : 1 TB ,<br/>Memory : 8 GB , SO : Debian</td><td>Bagian Kesekretariatan dan PDE</td></tr> <tr> <td>2</td><td>LPSE - Server BackUp</td><td>Merek HP, HDD : 1 TB ,<br/>Memory : 4 GB, SO : Ubuntu<br/>Server</td><td>Bagian Kesekretariatan dan PDE</td></tr> <tr> <td>3</td><td>SMS Center</td><td>Merk IBM , HDD : 73 GB<br/>Memory : 512 MB, SO :<br/>Mandrake Linux + SMS Tools</td><td>Bagian Kesekretariatan dan PDE</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Virtual Machine</td><td>Merk HP , HDD : 300 GB<br/>Memory : 16 GB , SO :<br/>vmWare</td><td>Bagian Kesekretariatan dan PDE</td></tr> </table> <p>Gambar 6.44 Tabel penjelasan <i>server</i> NTB</p> <p>2. Menjelaskan mengenai rencana pengembangan server kedepan. yaitu merencanakan dengan mengembangkan virtualisasi <i>server</i></p> <p>3. PC Memiliki akan tetapi tidak dijelaskan (spesifikasi, inventarisasi), begitu pula mengenai <i>workstation</i> apakah ada atau tidak.</p> | No.   | Fungsi Server                  | Spesifikasi | Lokasi | 1 | LPSE- Server Utama | Merek HP, HDD : 1 TB ,<br>Memory : 8 GB , SO : Debian | Bagian Kesekretariatan dan PDE | 2 | LPSE - Server BackUp | Merek HP, HDD : 1 TB ,<br>Memory : 4 GB, SO : Ubuntu<br>Server | Bagian Kesekretariatan dan PDE | 3 | SMS Center | Merk IBM , HDD : 73 GB<br>Memory : 512 MB, SO :<br>Mandrake Linux + SMS Tools | Bagian Kesekretariatan dan PDE | 4 | Virtual Machine | Merk HP , HDD : 300 GB<br>Memory : 16 GB , SO :<br>vmWare | Bagian Kesekretariatan dan PDE |
| No.     | Fungsi Server   | Spesifikasi   | Lokasi                         |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
| 1       | LPSE- Server Utama  | Merek HP, HDD : 1 TB ,<br>Memory : 8 GB , SO : Debian                         | Bagian Kesekretariatan dan PDE |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
| 2       | LPSE - Server BackUp  | Merek HP, HDD : 1 TB ,<br>Memory : 4 GB, SO : Ubuntu<br>Server                | Bagian Kesekretariatan dan PDE |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
| 3       | SMS Center  | Merk IBM , HDD : 73 GB<br>Memory : 512 MB, SO :<br>Mandrake Linux + SMS Tools | Bagian Kesekretariatan dan PDE |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |
| 4       | Virtual Machine   | Merk HP , HDD : 300 GB<br>Memory : 16 GB , SO :<br>vmWare                     | Bagian Kesekretariatan dan PDE |             |        |   |                    |   |                                |   |                      |  |                                |   |            |   |                                |   |                 |   |                                |

| <b>No.6-C</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>  |
|-----------------|---|
| □ <b>1</b>      | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Software System | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) <i>Application Development</i></li> <li>4) <i>System Management</i></li> </ol>  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman 46</li> <li>2. Sistem Operasi – Halaman 163 bagian OS</li> <li>3. RDMBS – Halaman 163</li> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan OS dan RDMBS saat ini di SKPD yang ada</li> </ol>  |

| No.6-C   | Cakupan   |  | Arsitektur | Infrastruktur |
|--|---|--|------------|---------------|
|  | Teknologi: Software System  |  |            |               |
|  | SIKNAS, Web base, Linux/Windows, SQLServer  | Dinas Kesehatan                                      |            |               |
|  | SIKDA Generic, Web base, Linux/Windows, MySQL   | Dinas Kesehatan                                      |            |               |
|  | Aplikasi Samsat se-NTB, Desktop, Windows Server, SQL Server                           | Dispenda   |            |               |
|  | Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi (SPIPISE), Web base, Windows/Linux | Badan Koordinasi Penanaman Modal & Perizinan Terpadu |            |               |
|  | Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah, Web, Windows/Linux                         | Badan Koordinasi Penanaman Modal & Perizinan Terpadu |            |               |
| <p>Gambar 6.45 Penggunaan OS dan RDMBS pada aplikasi</p> <p>2. Penjelasan mengenai kebijakan penggunaan <i>operating system</i> yang beragam, mengenai detail penggunaan sekarang tidak ada</p> <p>3. Penjelasan perencanaan penyeragaman penggunaan RDMBS</p> |   |  |            |               |

| No.6-D                     | Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br>Teknologi:      Perangkat      Media<br>Penyimpanan Data   |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
|                            |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |  |  |
| Media Penyimpanan Data     | <ul style="list-style-type: none"><li>• DRC</li><li>• Data Center</li></ul>  |  |  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Halaman 63 bagian kondisi kesenjangan</li><li>2. Halaman 158 bagian a. Data center</li><li>3. Halaman 164 bagian c. DRC</li></ol> |  |  |

| No.6-D  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data   |
|---------|--|
|         | 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan bahwa kondisi eksisting saat ini belum memiliki DRC dan <i>Data Center</i></li> <li>2. Menjelaskan rencana pembangunan <i>Data Center</i></li> <li>3. Menjelaskan perencanaan pembangunan DRC</li> </ol> |

#### E. Shared Services

| No.7                       | Shared Services  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, sudah diimplementasikan 3 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul> |
| Bukti Pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet - Halaman 49 Bagian E. Infrastruktur</li> <li>2. Email Service – halaman 50 bagian infrastruktur</li> </ol>                                   |

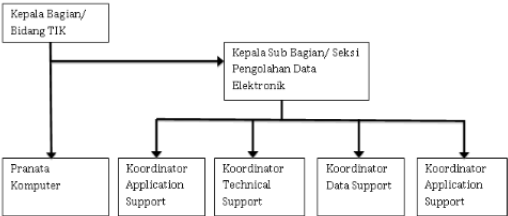
| No.7    | Shared Services  |
|---------|--|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Printing Service – halaman 51 bagian infrastruktur</li> <li>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dokumen menjelaskan bahwa telah mengimplementasikan internet service</li> <li>2. Memiliki email server berarti memiliki layanan email service</li> <li>3. Dijelaskan pada implementasikan LAN digunakan untuk layanan printing service</li> </ol> |

#### 7.4. Manajemen dan Organisasi

##### I. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8            | Struktur organisasi pengelola  |
|-----------------|--|
| □ 4             | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 163 bagian 6.6.1 Model Struktur Organisasi dan bagian 6.6.2 Uraian, Tugas, Produk Pokok dan Kompetensi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |



| No.8    | Struktur organisasi pengelola   |
|---------|---|
|         | <p>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</p>  |
| Catatan | <p>Menjelaskan menggunakan gambar struktur organisasi pengelola TIK yang ada</p>  <pre> graph TD     A[Kepala Bagian/ Bidang TIK] --&gt; B[Kepala Sub Bagian/ Seksi Pengolahan Data Elektronik]     A --&gt; C[Pranata Komputer]     B --&gt; D[Koordinator Application Support]     B --&gt; E[Koordinator Technical Support]     B --&gt; F[Koordinator Data Support]     B --&gt; G[Koordinator Application Support]   </pre> <p>Gambar 6.46 Pengelola TIK Provinsi NTB</p> <p>Dan untuk tupoksi tiap organisasi dijelaskan padabagian 6.6.2 Uraian, Tugas, Produk Pokok dan Kompetensi</p> |

## II. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                      | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem  |
|---------------------------|--|
| □ 1                       | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Aktivitas studi kelayakan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> </ul> |

| No.9            | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|-----------------|---|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis resiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul>  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen halaman 199 bagian V. Proses #3: Realisasi Sistem</li> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Pada bagian itu menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud.   |

## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|----------------------------|---|
| □ 2                        | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan</li> </ol> |

| No.10           | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|-----------------|---|
|                 | <p>(<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 199 bagian 5.2.2 Realisasi Software Aplikasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan         | <p>Pada bagian ini menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud</p>   |

| <b>No.11</b>                      | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 200 bagian 5.2.2 Realisasi Software Aplikasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                           | Pada bagian itu menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud, selain itu tidak ada penjelasan mengenai SI Transfer Pengetahuan                               |

### 1. Realisasi Infrastruktur Teknologi

| <b>No.12</b>                      | <b>Analisis Kebutuhan Kapasitas</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 200 bagian 5.2.3 Realisasi Infrastruktur Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                           | Pada bagian itu menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud   |

### III. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 201 bagian 5.2.4 Realisasi Pengelolaan Data</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                    | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud   |

## C. Pengoperasian Sistem

### 1. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Aspek kritikal             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 202 bagian 6.2.1 Manajemen Tingkat Layanan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud   |

### 3. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| □ 1                                       | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 202 bagian 6.2.2 Keamanan Keberlangsungan Sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                                   | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud  |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 203 bagian 6.2.2 Keamanan Keberlangsungan Sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud   |



| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekanisme Pengamanan   |
|--|---|
| □ 2                                    | Ada, telah dilaksanakan 1-3 mekanisme sisi infrastruktur teknologi  |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardening</li> <li>• Firewall</li> <li>• IDS/IPS</li> <li>• Network Monitoring Tool</li> <li>• Log processor &amp; analysis</li> </ul>   |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firewall – Halaman 50</li> <li>2. Lainnya - Halaman 203</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                                | Dijelaskan bahwa pemerintah NTB memiliki <i>firewall</i> untuk keamanan. Untuk aspek lainnya hanya disebutkan namun tidak diimplementasikan   |

## 5. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| □ 2   | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 203</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                                     | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud  |

### 3. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 52<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Dikatakan pada dokumen untuk pengaman data, secara rutin database dibackup pada media <i>harddisk</i> eksternal, akan tetapi tidak ada prosedur yang jelas bagaimana pelaksanaannya. |

### 3. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Ketentuan operasi sistem   | a. Manajemen tingkat layanan<br>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem<br>c. Manajemen Software Aplikasi<br>d. Manajemen Infrastruktur<br>e. Manajemen Data |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 203  |

| <b>No.20</b> | <b>Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga</b>   |
|--------------|--|
|              | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007                            |
| Catatan      | Pada bagian itu menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud |

#### **D. Pemeliharaan Sistem**

##### **I. Pemeliharaan Software Aplikasi**

| <b>No.21</b>               | <b>Pemeliharaan Software Aplikasi</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 206<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007                |
| Catatan                    | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1              | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| <i>Patching infrastruktur teknologi</i> | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server |
| Bukti pendukung                         | 1. Dokumen halaman 206<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007                         |
| Catatan                                 | Pada bagian itu menjelaskan sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan prosedur yang dimaksud                        |

## III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 206<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |

| No.23   | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|---------|--|
| Catatan | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud |

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24             | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi  |
|-------------------|---|
| □ 2               | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Fase siklus hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul> |
| Bukti pendukung   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 207</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>                                       |
| Catatan           | Pada bagian itu menjelaskan materi sama dengan panduan tata kelola TIK. Tidak ada penjelasan detail prosedur yang dimaksud  |

## 7.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 98 bagian 5.6.2 Tahapan pengembangan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Telah menjelaskan dengan membuat list dengan pembagian beberapa komponen seperti kelembagaan, kebijakan & perencanaan, infrastruktur, aplikasi  |

### 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |

| No.26   | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi NTB tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Pendapatan</li> <li>2) Pengurangan biaya</li> <li>3) Efisiensi proses kerja</li> <li>4) Peningkatan Pelayanan</li> <li>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi</li> <li>6) Peningkatan Kapabilitas TI</li> <li>7) Pengurangan Resiko</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi NTB tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian  |



| No.27 | Benefit Realization Ratio  |
|-------|--|
|       | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK provinsi NTB tidak ada penjelasan mengenai urgensitas pengembangan TIK beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 98 bagian 5.6.2 Tahapan pengembangan</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| No.29       | Pentahapan Pengembangan   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---------|------------------|------|---|------|--|---|---|---|---|-------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catatan     | Telah melakukan penyusunan jadwal terkait pelaksanaan pengembangan  |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | <table><tr><th rowspan="2">Dimensi</th><th rowspan="2">Program/Kegiatan</th><th colspan="2">2014</th><th colspan="2">2015</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td rowspan="6">Kelembagaan</td><td>Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD Pengelola TIK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Penetapan Pejabat CIO Provinsi NTB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pengembangan database profil SDM TIK yang komprehensif dan berkesinambungan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian bidang TIK</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Dimensi | Program/Kegiatan | 2014 |   | 2015 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | Kelembagaan | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD Pengelola TIK |  |  |  |  | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Penetapan Pejabat CIO Provinsi NTB |  |  |  |  | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK |  |  |  |  | Pengembangan database profil SDM TIK yang komprehensif dan berkesinambungan |  |  |  |  | Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian bidang TIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensi     | Program/Kegiatan  |         |                  | 2014 |   | 2015 |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |   | 1       | 2                | 1    | 2 |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelembagaan | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD Pengelola TIK  |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Penetapan Pejabat CIO Provinsi NTB   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK  |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Pengembangan database profil SDM TIK yang komprehensif dan berkesinambungan   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian bidang TIK   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |   |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Gambar 6.47 Penyusunan Jadwal Roadmap Provinsi NTB  |         |                  |      |   |      |  |   |   |   |   |             |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maros 2016-2020

### 8.1. Arsitektur Informasi

#### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: pertukaran data beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-B</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Datamart</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>datamart</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-C</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> beserta penjelasannya. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Informasi Tidak Terstruktur

| <b>No.2</b>                       | <b>Adanya model informasi tidak terstruktur</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br><br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur: (isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)   |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik – Pasal 1</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai model   |

| No.2 | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|------|--|
|      | informasi tidak terstruktur beserta penjelasannya.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-A</b>              | <b>Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: kelas-kelas data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-B</b>              | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi : peta kepemilikan data Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: <i>data dictionary</i> . Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Syntax Rules</i></b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada   |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: <i>syntax rules</i> keamanan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |



| No.3-E                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai matrik klasifikasi informasi: klasifikasi level keamanan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 8.2. Arsitektur Aplikasi

### A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>2. Cetak Biru (BluePrint)) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai pemetaan aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian  |

| No.4 | Peta Aplikasi  |
|------|--|
|      | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.5             | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window   |
|------------------|--|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.  |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK  |
| Bukti pendukung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 36 bagian 3.1.3 Aplikasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan          | <p>Berikut aplikasi yang menggunakan pendekatan <i>onestop windows</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mar0s Pengaduan</li> <li>• LPSE</li> <li>• SiRUP</li> <li>• Mar0s Sehat</li> <li>• Mar0s Izin</li> <li>• Mar0s Pendapatan</li> </ul> |

| No.5 | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window |
|------|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPKD</li> </ul>            |

### 8.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

#### A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi   |
|--|--|
| □ 1  | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jaringan Komunikasi</li> <li>2) Perangkat Pemrosesan (<i>Server</i>, Workstation, Peripheral lainnya)</li> <li>3) <i>Software System</i> (Sistem Operasi, Database RDMBS)</li> <li>4) Media Penyimpanan Data</li> </ol>    |
| Catatan                                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai cakupan arsitektur infrastruktur teknologi dilengkapi dan dijelaskan secara detail agar memenuhi kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.6-A</b>       | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|---------------------|--|
| □ 2                 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Jaringan Komunikasi | 1) LAN<br>2) WAN<br>3) Internet<br>4) VOIP<br>dan lain lain.   |
| Bukti pendukung     | 1. Halaman 43 bagian 4.14 infrastruktur<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007<br>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| Catatan             | LAN dan Internet disebutkan sudah diimplementasikan namun tidak ada penjelasan detail  |

| <b>No.6-B</b>        | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>           |
|----------------------|---|
| □ 2                  | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007 |
| Perangkat Pemrosesan | 1) Server<br>2) Workstation<br>3) PC  |

| <b>No.6-B</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>  |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 16, 75</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan         | Disebutkan bahwa memiliki perangkat <i>server</i> dan PC namun tidak ada penjelasan spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi  |

| <b>No.6-C</b>          | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>   |
|------------------------|--|
| □ 1                    | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| <i>Software System</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem Operasi</li> <li>2) Database RDMBS</li> <li>3) Application Development</li> <li>4) System Management</li> </ol> |
| Bukti pendukung        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 16</li> <li>2. Dokumen halaman 62</li> </ol>   |

| No.6-C  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur<br>Teknologi: Software System  |
|---------|---|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijelaskan menggunakan sistem operasi dan database RDMBS tetapi tidak dijelaskan detail kondisi eksistingnya.</li> <li>2. Perencanaan kebijakan mengenai penggunaan OS berbasis <i>open source</i></li> </ol>   |

| No.6-D                 | Cakupan Arsitektur Infrastruktur<br>Teknologi: Perangkat Media<br>Penyimpanan Data |
|------------------------|--|
| □ 1                    | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan                     |
| Media Penyimpanan Data | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>     |
| Bukti pendukung        | 1. Dokumen halaman 96  |

| No.6-D  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data  |
|---------|---|
|         | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan | Pemerintah kabupaten maros belum memiliki DRC dan data center akan tetapi dalam dokumen dijelaskan mengenai rencana pembangunan arsitektur tersebut |

## B. Shared Services

| No.7                       | Shared Services   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya mengimplementasi 1-2 jenis layanan <i>shared services</i>  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul>      |
| Bukti Pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 37</li> <li>2. Dokumen halaman 36</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:<br/>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatakan telah melakukan implementasi terhadap <i>internet service</i></li> </ol>   |

| No.7 | Shared Services   |
|------|---|
|      | 2. Telah melakukan implementasi terhadap <i>email service</i> |

## 8.4. Manajemen dan Organisasi

### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8                       | Struktur organisasi pengelola   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 4 | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 77 bagian 6.4.2 SKPD pengelola TIK</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Struktur organisasi tidak digambarkan dengan menggunakan gambar hanya disebutkan dengan narasi, akan tetapi telah dilengkapi dijelaskan mengenai tupoksi masing masing jabatan  |



## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| No.9                      | Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem   |
|---------------------------|---|
| □ 2                       | Ada, telah melakukan 1 aktivitas studi kelayakan  |
| Aktivitas studi kelayakan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (<i>benefit</i>) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |
| Bukti pendukung           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis resiko – dokumen halaman 40</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                   | Menjelaskan mengenai analisis resiko terkait komponen pengembangan: kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur dan perencanaan   |

II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <div>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</div> <div>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</div> <div>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</div> <div>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</div> <div>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</div> <div>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</div> <div>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</div> <div>8. Instalasi dan akreditasi</div> |

| <b>No.10</b>    | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan         | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur metode SDLC.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.11</b>               | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung            | 1. Halaman 53<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Dijelaskan bahwa ada perencanaan pelatihan terhadap aplikasi yang ada, akan tetapi belum ada perencanaan mengenai pembuatan SI transfer pengetahuan maupun pelatihan |

| No.12                      | Analisis Kebutuhan Kapasitas  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai analisis kebutuhan kapasitas Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13                      | Proedur Pengelolaan Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek tahapan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |

| No.13   | Proedur Pengelolaan Data  |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan data. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### D. Pengoperasian Sistem

##### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Aspek kritikal             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (availability) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur manajemen tingkat layanan. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian  |

| No.14 | Manajemen Tingkat Layanan  |
|-------|--|
|       | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| □ 1                                       | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 90</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>  |
| Catatan                                   | Dijelaskan perencanaan terhadap mekanisme untuk meningkatkan aspek keamanan   |

| No.16                   | Sisi pengamanan aplikasi  |
|-------------------------|---|
| □ 0                     | Tidak ada   |
| Mekanisme sisi aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem database yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                 | <p>Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur sisi pengamanan aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007</p>  |

| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekanisme Pengamanan  |
|--|--|
| □ 1                                    | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hardening</i></li> <li>• <i>Firewall</i></li> <li>• <i>IDS/IPS</i></li> <li>• <i>Network Monitoring Tool</i></li> <li>• <i>Log processor &amp; analysis</i></li> </ul>   |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 96</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan                                | Pada dokumen ada penjelasan mengenai perencanaan pengadaan firewall dan IPS, akan tetapi tidak ada penjelasan kondisi eksisting lainnya  |



### III. Manajemen Software Aplikasi

| No.18                                       | Manajemen Software Aplikasi   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 0                  | Tidak ada   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                                     | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur manajemen software aplikasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007            |

#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                             |
| Bukti pendukung            | Dokumen halaman 74<br>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007          |
| Catatan                    | Adanya kegiatan <i>backup</i> dan <i>recovery</i> namun tidak ada penjelasan mengenai prosedur pelaksanaannya |

#### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Ketentuan operasi sistem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |

| No.20   | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|---------|---|
| Catatan | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur pengelolaan pihak ketiga .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### E. Pemeliharaan Sistem

#### I. Pemeliharaan Software Aplikasi

| No.21                      | Pemeliharaan Software Aplikasi   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan software aplikasi.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                            | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0       | Tidak ada   |
| Patching infrastruktur teknologi | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server   |
| Bukti pendukung                  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                          | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur pemeliharaan infrastruktur teknologi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur teknis pemeliharaan data. Hal ini |

| No.23 | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data  |
|-------|--|
|       | penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Emerging technologies,</i></li> <li>• <i>Current technologies,</i></li> <li>• <i>Sunset technologies,</i></li> <li>• <i>Twilight technologies.</i></li> </ul>   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai prosedur siklus hidup dan likudasi sumber daya infrastruktur teknologi Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## 8.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 64 bab 6</li> <li>2. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol>         |
| Catatan                    | Menjelaskan bahwa telah melakukan list terhadap pengembangan dengan melakukan pengelompokan terhadap beberapa komponen seperti kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, perencanaan, informasi |

### 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Maros tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian  |

| No.26 | Pendanaan Pengembangan TIK   |
|-------|--|
|       | dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Manfaat pengembangan TIK   | 1) Peningkatan Pendapatan<br>2) Pengurangan biaya<br>3) Efisiensi proses kerja<br>4) Peningkatan Pelayanan<br>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi<br>6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Seharusnya ada <i>benefit realization ratio</i> demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007  |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, telah melakukan pembuatan tingkat urgensitas dari tiap daftar paket pengembangan TIK   |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 64 bagian 6.1 penentuan skala prioritas<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |
| Catatan                    | Menjelaskan telah membuat skala prioritas terhadap pengembangan yang akan dilaksanakan  |

#### 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan   |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 71 bagian 6.2 Tahapan Implementasi<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |



| No.29                       | Pentahapan Pengembangan   |      |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|------|---------|------|------|------|------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|----|---|---|--|--|--|--|----|---|---|--|--|--|--|----|--|---|--|--|--|--|----|--|---|--|--|--|--|----|---|---|--|--|--|--|
|                             | 3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)   |      |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| Catatan                     | Menggambarkan jadwal pelaksanaan pengembangan menggunakan tabel   |      |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
|                             | <table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td colspan="7"><b>A. Dimensi Kebijakan</b></td></tr><tr><td>1.</td><td>Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan egovernment/TIK terintegrasi</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | No   | Program | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>A. Dimensi Kebijakan</b> |  |  |  |  |  |  | 1. | Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan egovernment/TIK terintegrasi | √ |  |  |  |  | 2. | Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK | √ |  |  |  |  | 3. | Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK | √ |  |  |  |  | 4. | Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja | √ |  |  |  |  | 5. | Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD | √ |  |  |  |  |
| No                          | Program   | 2016 | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| <b>A. Dimensi Kebijakan</b> |   |      |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| 1.                          | Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan egovernment/TIK terintegrasi   | √    |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| 2.                          | Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK   | √    |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| 3.                          | Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK  | √    |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| 4.                          | Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja  | √    |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
| 5.                          | Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD   | √    |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |
|                             | Gambar 6.48 Jadwal impelementasi Kabupaten Maros  |      |         |      |      |      |      |      |                             |  |  |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |  |   |  |  |  |  |    |   |   |  |  |  |  |

## 9. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen 2016-2021

### 9.1. Arsitektur Informasi

#### A. Informasi Terstruktur

| No.1                       | Adanya model informasi terstruktur   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi terstruktur      | Pertukaran Data, <i>Datamart</i> , <i>Database</i> , <i>Database table</i>   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-A                     | Adanya model informasi terstruktur: Pertukaran Data  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: pertukaran data.Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-B                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Datamart</i>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>datamart</i> .Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.1-C                     | Adanya model informasi terstruktur:<br><i>Database</i>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database</i> Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| <b>No.1-D</b>                     | <b>Adanya model informasi terstruktur:<br/><i>Database table</i></b>   |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>0</b> | Tidak ada  |
| Bukti pendukung                   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                           | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai model informasi terstruktur: <i>database table</i> demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

## B. Informasi Tidak Terstruktur

| <b>No.2</b>                       | <b>Adanya model informasi tidak terstruktur</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Model informasi tidak terstruktur | Gambar, video, file dokumen<br><br>Penjelasan model informasi tidak terstruktur: (isi informasi, pemilik data informasi dan pengguna informasi)  |
| Bukti pendukung                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 50</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. UU 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik – Pasal 1</li> </ol> |

| No.2    | Adanya model informasi tidak terstruktur   |
|---------|--|
| Catatan | Dikatakan bahwa arsitektur informasi terdiri dari informasi tidak terstruktur akan tetapi tidak dijelaskan dengan detail |

### C. Penetapan Arsitektur Informasi

| No.3                       | Matriks klasifikasi informasi  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada.   |
| Informasi Terstruktur      | Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai matriks klasifikasi informasi. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

| No.3-A                     | Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 50</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |

| <b>No.3-A</b> | <b>Matriks Arsitektur Informasi: Kelas-kelas data</b>  |
|---------------|--|
| Catatan       | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada</p> |

| <b>No.3-B</b>              | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: Peta Kepemilikan Data</b>  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 50</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada</p> |

| <b>No.3-C</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Data dictionary</i></b>  |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung                   | 1. Dokumen halaman 50<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data<br><br>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada |

| <b>No.3-D</b>                     | <b>Matriks Klasifikasi Informasi: <i>Syntax Rules</i></b>   |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> <b>2</b> | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung                   | 1. Dokumen halaman 50<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                           | Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i> , <i>syntax rules</i> , klasifikasi level keamanan data<br><br>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada |

| No.3-E                     | Matriks Klasifikasi Informasi: klasifikasi level keamanan data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen halaman 50</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li></ol>  |
| Catatan                    | <p>Pada dokumen menyatakan bahwa klasifikasi informasi terdiri atas Kelas-kelas data, peta kepemilikan data, <i>data dictionary</i>, <i>syntax rules</i>, klasifikasi level keamanan data</p> <p>Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai kelas-kelas data yang ada</p> |

9.2. Arsitektur Aplikasi

A. Peta Aplikasi

| No.4                       | Peta Aplikasi   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, pemetaan aplikasi menggunakan aktivitas pemerintahan dan menjelaskan fungsi dan modul aplikasi   |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen halaman 69</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li></ol> |



| No.4    | Peta Aplikasi  |
|---------|--|
|         | <p>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</p> <p>4. Cetak Biru (BluePrint)) Sistem Aplikasi <i>E-Government</i> Bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kemkominfo</p> |
| Catatan | Terdapat pemetaan aplikasi dengan menggunakan kerangka aktivitas pemerintahan  |

| No.5             | Efisiensi Arsitektur Aplikasi Menggunakan Pendekatan One Stop Window  |
|------------------|---|
| □ 4              | Ada, terdiri lebih dari 6 aplikasi.   |
| One Stop Windows | Memungkinkan pelanggan/publik dapat mengakses satu sistem (dengan menggunakan beragam <i>delivery channel</i> ) untuk mendapatkan layanan TIK |
| Bukti pendukung  | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan          | Pada dokumen ataupun <i>website</i> tidak ada list aplikasi yang digunakan  |

9.3 Arsitektur Infrastruktur Teknologi

A. Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi

| No.6                                       | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1                 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Cakupan Arsitektur Infrastruktur Informasi | <div>1) Jaringan Komunikasi</div> <div>2) Perangkat Pemrosesan (Server, Workstation, Peripheral lainnya)</div> <div>3) Software System (Sistem Operasi, Database RDMBS)</div> <div>4) Media Penyimpanan Data</div> |
| Catatan                                    | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK nasional, tidak ada perencanaan pembangunan ataupun detail kondisi eksisting seperti: spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi  |

| No.6-A                     | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi                              |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007            |
| Jaringan Komunikasi        | <div>1) LAN</div> <div>2) WAN</div> <div>3) Internet</div> <div>4) VOIP dan lain lain.</div> |

| <b>No.6-A</b>   | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Jaringan Komunikasi</b>   |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 51 bagian Perencanaan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK nasional, tidak ada perencanaan pembangunan ataupun detail kondisi eksisting seperti: spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi  |

| <b>No.6-B</b>              | <b>Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>                            |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007                  |
| Perangkat Pemrosesan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Server</li> <li>2) Workstation</li> <li>3) PC</li> </ol> |

| <b>No.6-B</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur</b><br><b>Teknologi: Perangkat Pemrosesan</b>  |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen halaman 51 bagian Perencanaan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li><li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</li></ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK nasional, tidak ada perencanaan pembangunan ataupun detail kondisi eksisting seperti: spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi  |

| <b>No.6-C</b>              | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur</b><br><b>Teknologi: Software System</b>  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| <i>Software System</i>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sistem Operasi</li><li>2) Database RDMBS</li><li>3) <i>Application Development</i></li><li>4) <i>System Management</i></li></ol> |

| <b>No.6-C</b>   | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Software System</b>   |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 51 bagian Perencanaan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK nasional, tidak ada perencanaan pembangunan ataupun detail kondisi eksisting seperti: spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi  |

| <b>No.6-D</b>          | <b>Cakupan      Arsitektur      Infrastruktur<br/>Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data</b>   |
|------------------------|---|
| □ 1                    | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Media Penyimpanan Data | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRC</li> <li>• Data Center</li> </ul>  |
| Bukti pendukung        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 51 bagian Perencanaan Arsitektur Infrastruktur Teknologi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:</li> </ol> |

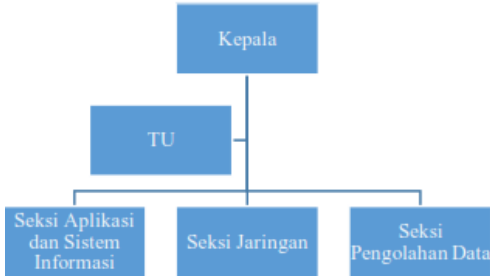
| No.6-D  | Cakupan Arsitektur Infrastruktur Teknologi: Perangkat Media Penyimpanan Data  |
|---------|---|
|         | 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah  |
| Catatan | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK nasional, tidak ada perencanaan pembangunan ataupun detail kondisi eksisting seperti: spesifikasi, konfigurasi, inventarisasi |

## B. Shared Services

| No.7                       | Shared Services  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Layanan Shared Services    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internet Service</i> (Koneksi Internet)</li> <li>• <i>Email Service</i></li> <li>• <i>File Service</i></li> <li>• <i>Printing Service</i></li> </ul> |
| Bukti Pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen tidak ada penjelasan mengenai service yang ada pada pemerintahan, hanya ada teori mengenai internet dsbnya  |

## 9.4. Manajemen dan Organisasi

### A. Struktur Organisasi Pengelola

| No.8            | Struktur organisasi pengelola  |
|-----------------|--|
| □ 4             | Ada, dijelaskan tugas pokok dan fungsi mengenai pengelola TIK tersebut   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 27 bagian 2.3.1 tata kelola dan kebijakan</li> <li>2. Dokumen halaman 43</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol>  |
| Catatan         | <p>Telah menggambarkan struktur organisasi pengelola TIK</p>  <pre> graph TD     Kepala[Kepala] --&gt; TU[TU]     Kepala --&gt; SeksiA[Seksi Aplikasi dan Sistem Informasi]     Kepala --&gt; SeksiJ[Seksi Jaringan]     Kepala --&gt; SeksiP[Seksi Pengolahan Data]   </pre> <p>Gambar 6.49 Struktur pengelola Kabupaten Sragen</p> <p>Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi ada pada halaman 43</p> |

## B. Realisasi Sistem

### I. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem

| <b>No.9</b>                | <b>Prosedur Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem</b>   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Aktivitas studi kelayakan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kebutuhan secara fungsional proses bisnis</li> <li>• Penentuan manfaat (benefit) apa yang hendak dicapai dengan keberadaan sistem yang akan dikembangkan</li> <li>• Analisis risiko terkait dengan proses bisnis</li> </ul> |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 57 bagian realisasi sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                    | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.  |



## II. Realisasi Software Aplikasi

| No.10                      | Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC   |
|----------------------------|---|
| □ 2                        | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Kebutuhan pada metode SDLC | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain</li> <li>2. Penyusunan desain detail dan teknikal software aplikasi, termasuk juga di sini pengendalian aplikasi (<i>Application Control</i>) (yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam software aplikasi akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit) dan pengendalian keamanan aplikasi (<i>application security control</i>) (yang memungkinkan terpenuhinya aspek: kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan integritas (<i>integrity</i>).</li> <li>3. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program (<i>coding</i>)</li> <li>4. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan</li> <li>5. Pelaksanaan penjaminan mutu (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>6. Uji coba (<i>testing</i>): <i>unit testing</i>, <i>system testing</i>, <i>integration testing</i>,</li> <li>7. <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>8. Instalasi dan akreditasi</li> </ol> |

| <b>No.10</b>    | <b>Realisasi Software Aplikasi: Prosedur Metode SDLC</b>  |
|-----------------|---|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 57 bagian keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.   |

| <b>No.11</b>    | <b>Training &amp; Transfer Pengetahuan Aplikasi</b>   |
|-----------------|---|
| □ 2             | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 55 bagian realisasi software/aplikasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.   |

| No.12           | Analisis Kebutuhan Kapasitas  |
|-----------------|---|
| □ 1             | Tidak Ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 55 bagian 2 realisasi infrastruktur teknologi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.   |

### C. Realisasi Pengelolaan Data

| No.13         | Proedur Pengelolaan Data   |
|---------------|--|
| □ 1           | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Aspek tahapan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• input, (prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.)</li> <li>• proses, (prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan)</li> <li>• output data (Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.)</li> </ul> |

| No.13           | Proedur Pengelolaan Data   |
|-----------------|--|
| Bukti pendukung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 55 bagian 3 realisasi pengelolaan data</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan         | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.  |

## D. Pengoperasian Sistem

### I. Manajemen Tingkat Layanan

| No.14                      | Manajemen Tingkat Layanan   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Aspek kritikal             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen.</li> <li>b. Prosentase tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) sistem TIK.</li> <li>c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 56 bagian manajemen tingkat layanan</li> </ol>  |

| No.14   | Manajemen Tingkat Layanan   |
|---------|---|
|         | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007           |
| Catatan | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

## II. Keamanan dan Keberlangsungan Sistem

| No.15                                     | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1                | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| aspek keamanan dan keberlangsungan sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Confidentiality</i>: akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.</li> <li>• <i>Integrity</i>: data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak</li> <li>• <i>Authentication</i>: untuk meyakinkan identitas pengguna sistem</li> <li>• <i>Availability</i>: terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.</li> </ul> |
| Bukti pendukung                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 57 bagian keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:</li> </ol>  |

| No.15   | Mekanisme Aspek Pengamanan dan Keberlangsungan Sistem                                       |
|---------|---|
|         | 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

| No.16                      | Sisi pengamanan aplikasi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Mekanisme sisi aplikasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode <i>scripting</i> software aplikasi yang aman</li> <li>• Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam <i>software</i> aplikasi yang tepat</li> <li>• Pengaturan keamanan sistem <i>database</i> yang tepat</li> </ul>  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 56 bagian keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran</li> </ol> |

| No.16   | Sisi pengamanan aplikasi  |
|---------|---|
|         | Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah                               |
| Catatan | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

| No.17                                  | Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekasisme Pengamanan   |
|--|---|
| □ 1                                    | Tidak ada, akan tetapi dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Mekanisme Sisi Infrastruktur Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hardening</i></li> <li>• <i>Firewall</i></li> <li>• <i>IDS/IPS</i></li> <li>• <i>Network Monitoring Tool</i></li> <li>• <i>Log processor &amp; analysis</i></li> </ul>  |
| Bukti pendukung                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 57 bagian keamanan dan keberlangsungan system</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum</li> </ol> |

| <b>No.17</b> | <b>Sisi pengamanan infrastruktur teknologi: Mekasisme Pengamanan</b>                        |
|--------------|---|
|              | Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah                   |
| Catatan      | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

### III. Manajemen Software Aplikasi

| <b>No.18</b>                                | <b>Manajemen Software Aplikasi</b>  |
|---|---|
| □ 2   | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007   |
| Dokumentasi pengoperasian software aplikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC</li> <li>• Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi</li> <li>• Materi transfer pengetahuan &amp; Materi Training untuk software aplikasi</li> </ul> |
| Bukti pendukung                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 59 bagian manajemen software aplikasi</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol>   |
| Catatan                                     | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.   |



#### IV. Manajemen Data

| No.19                      | Manajemen Data   |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2 | Ada, hanya menjelaskan materi yang ada pada panduan tata kelola TIK nasional 2007  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 57 bagian manajemen data</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> </ol> |
| Catatan                    | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.  |

#### V. Manajemen Layanan Oleh Pihak Ketiga

| No.20                      | Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan  |
| Ketentuan operasi sistem   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen tingkat layanan</li> <li>b. Keamanan dan keberlangsungan sistem</li> <li>c. Manajemen Software Aplikasi</li> <li>d. Manajemen Infrastruktur</li> <li>e. Manajemen Data</li> </ol> |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 58 bagian Manajemen Layanan Pihak Ketiga   |

| <b>No.20</b> | <b>Prosedur / Kebijakan Pengelolaan Pihak Ketiga</b>  |
|--------------|---|
|              | 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika<br>Nomor:<br>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007     |
| Catatan      | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

## **E. Pemeliharaan Sistem**

### **I. Pemeliharaan Software Aplikasi**

| <b>No.21</b>                      | <b>Pemeliharaan Software Aplikasi</b>  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> <b>1</b> | Tidak ada, akan tetapi masih dalam tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung                   | 1. Dokumen halaman 59 bagian Pemeliharaan Software Aplikasi<br><br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika<br>Nomor:<br>41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |
| Catatan                           | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.  |

## II. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi

| No.22                                   | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1              | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan  |
| <i>Patching infrastruktur teknologi</i> | a. <i>System software</i> Perangkat-perangkat jaringan<br>b. <i>System software</i> di server dan workstation<br>c. Database server                    |
| Bukti pendukung                         | 1. Dokumen halaman 59 bagian pemeliharaan infrastruktur teknologi<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |
| Catatan                                 | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.  |

## III. Pemeliharaan Data

| No.23                      | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| Bukti pendukung            | 1. Dokumen halaman 59 bagian pemeliharaan data<br>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 |

| No.23   | Prosedur Teknis Pemeliharaan Data   |
|---------|---|
| Catatan | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur. |

IV. Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi

| No.24                      | Prosedur terhadap siklus hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Tidak ada, akan tetapi masih dalam masa tahap perencanaan pembuatan   |
| Fase siklus hidup          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Emerging technologies,</i></li><li>• <i>Current technologies,</i></li><li>• <i>Sunset technologies,</i></li><li>• <i>Twilight technologies.</i></li></ul>                                  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen halaman 59 bagian Siklus Hidup dan Likuidasi Sumber Daya Infrastruktur Teknologi</li><li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li></ol> |
| Catatan                    | Hanya penjelasan dari panduan tata kelola TIK, belum dijelaskan melalui pembuatan prosedur.   |

## 9.5. Pendekatan Roadmap Implementasi

### 1. Paket Pengembangan TIK

| No.25                      | Paket Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Membuat list daftar tiap pengembangan TIK yang ada  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 87-105</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Telah membuat list daftar pengembangan dengan pengelompokkan menjadi beberapa komponen seperti: tata kelola kebijakan, infrastruktur, aplikasi, dan SDM   |

### 2. Pendaanaan Pengembangan TIK

| No.26                      | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada   |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007  |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai pendanaan pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan |

| No.26 | Pendanaan Pengembangan TIK  |
|-------|---|
|       | kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

### 3. Benefit Realization Ratio

| No.27                      | Benefit Realization Ratio  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Manfaat pengembangan TIK   | 1) Peningkatan Pendapatan<br>2) Pengurangan biaya<br>3) Efisiensi proses kerja<br>4) Peningkatan Pelayanan<br>5) Peningkatan Keunggulan Kompetitif Instansi<br>6) Peningkatan Kapabilitas TI<br>7) Pengurangan Resiko                                  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai <i>benefit realization ratio</i> Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 4. Urgensitas Pengembangan TIK

| No.28                      | Urgensitas Pengembangan TIK  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | Tidak ada  |
| Bukti pendukung            | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007   |
| Catatan                    | Pada dokumen <i>master plan</i> TIK kabupaten Sragen tidak ada penjelasan mengenai urgensitas pengembangan TIK. Hal ini penting demi terciptanya kelengkapan dan kesesuaian dengan panduan tata kelola teknologi dan informasi nasional tahun 2007 |

#### 5. Pentahapan Pengembangan

| No.29                      | Pentahapan Pengembangan   |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3 | Ada, melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pengerjaan paket pengembangan  |
| Bukti pendukung            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen halaman 87-105</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007</li> <li>3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (INPRES No. 3 Tahun 2003)</li> </ol> |
| Catatan                    | Pada dokumen telah melakukan penyusunan jadwal berdasarkan kelompok paket pengembangan  |

|       |   |
|-------|---|
| No.29 | Pentahapan Pengembangan                                   |
|       | Berikut contoh penjadwalan yang ada.<br><br>(Gambar 6.50) |

| No | Infrastruktur  | Tahun |      |      |      |      |      |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|
|    |  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | Penataan Cluster Infrastruktur Jaringan Nirkabel 5.8 GHz                           |       | √    | √    |      |      |      |
| 2  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone                                    |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 3  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk SKPD  |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 4  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Kecamatan                                   |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 5  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Desa  |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 6  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Masyarakat                       |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 7  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Pendidikan                       |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 8  | Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Telecenter Bisnis                           |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 9  | Pengintegrasian Jaringan SKPD Pemilik Proses Bisnis ke Jaringan SKPD Pengelola TIK |       | √    | √    | √    |      |      |
| 10 | Pemeliharaan, Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless                |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 11 | Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth                                       |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 12 | Penyediaan Public Access Point (Free WiFi)   |       | √    | √    | √    | √    | √    |
| 13 | Pembangunan Data Center dan/atau Data Recovery Center                              |       |      | √    |      | √    |      |
| 14 | Pembangunan Hybrid Cloud Computing (private cloud dan public cloud)                |       |      | √    |      |      |      |
| 15 | Pembangunan Emergency Call Center  |       |      | √    |      |      |      |

Gambar 6.50 Penjadwalan pengembangan TIK Kabupaten Sragen



## BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Muhammad Atsil Husni Rafi lahir di kota Purworejo pada tanggal 24 September 1996 merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Batik Perbaik Purworejo, SD Negeri Pangen Gudang Purworejo, SMP Negeri 2 Purworejo, dan SMA 1 Purworejo. Di tahun 2014 penulis masuk sebagai mahasiswa di Departemen Sistem Informasi – Fakultas Teknologi Informasi dan

Komunikasi – ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya, Penulis selain fokus pada bidang akademik juga aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di Departemen Sistem Informasi , seperti *staff* biro pemetaan pada HMSI Muda Berkarya, mengikuti kepanitiaan ISE, Pernah juga melakukan kerja praktek di salah satu *startup* bidang peternakan di Surabaya yaitu PT Ternaknesia Farm Innovation selama 1,5 bulan. di tahun 2017.

Pada pengerjaan tugas akhir di Departemen Sistem Informasi penulis mengambil bidang minat Laboratorium Manajemen Sistem Informasi dengan topik pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, yakni pada tema dokumen perencanaan pengembangan TIK di institusi pemerintahan. Apabila ada keperluan mengenai tugas akhir ini penulis dapat dihubungi melalui *email* mas\_rafi@yahoo.com